

# LkjIP

# 2025

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) TAHUN 2025



APBD 2025



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman [inspektorat.sumbarprov.go.id](http://inspektorat.sumbarprov.go.id), email: [inspektorat@sumbarprov.go.id](mailto:inspektorat@sumbarprov.go.id)

---

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197210261997031003

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat tersusun. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu kinerja setiap unit bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Secara garis besar Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun kelima periode Renstra 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang tercermin dalam setiap indikator kerjanya serta memuat aspek keuangan yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Besar harapan kami semoga Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Terima kasih.

Padang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas,  
  
**NOVRIAL, SE. MA. Ak**  
**Pembina Utama Madya**  
NIP. 19661105 199403 1 005



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2025 sebagai berikut.

## Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat



Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang ditetapkan.

Selama tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah berupaya untuk meningkatkan jumlah pelaku industri kecil dan menengah, dimana target pada tahun 2025 jumlah pelaku industri kecil dan menengah 56.803 unit usaha melebihi dari target tahun 2025 dengan jumlah unit usaha 58.426 unit usaha. Untuk target nilai produksi industri kecil dan menengah pada tahun 2025 Rp 30 triliun terealisasi dengan nilai produksi Rp 30,31 triliun. Pada sektor Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat juga terus melakukan upaya guna terwujudnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing yang diukur dengan nilai sektor perdagangan dalam PDRB dengan target pada tahun 2025 sebesar Rp 53,43 triliun terealisasi melebihi target yakni Rp 58,63 triliun.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat juga berupaya melakukan perbaikan kinerja



yang digambarkan melalui hasil nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 (penilaian kinerja 2024) dengan predikat A (80,29). Pada tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran APBD pada belanja operasi dimana termasuk didalamnya belanja pegawai pada tahun 2025 yakni sebesar 93,44 persen atau Rp. 25.387.766.676,- dari jumlah pagu anggaran belanja operasi sebesar Rp. 27.169.618.946,- serta realisasi fisik sebesar 99,06 persen. Untuk belanja operasi diluar belanja pegawai tahun 2025 sebesar 92 persen atau Rp 12.201.126.181,- dari jumlah pagu anggaran Rp.13.261.731.531,-.

Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi, tujuan dan sasaran strategis, serta indikator kinerja. Terdapat beberapa rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan upaya perbaikan dimasa yang akan datang, yakni

### Perencanaan Kinerja

<b>Rekomendasi LHE 2025</b>	<b>Rencana Aksi Lanjut</b>
Dokumen rencana aksi agar menjabarkan kegiatan atau aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada PK.	Melakukan penyelarasan rencana aksi dalam pencapaian kinerja pada PK
Dokumen realisasi rencana aksi seluruh unit kerja/bidang agar memuat kendala/hambatan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada PK.	Memuat kendala/hambatan pada rencana aksi seluruh unit kerja/bidang dalam pencapaian target pada PK.
Melengkapi dokumen hasil pantauan capaian kinerja organisasi yang dilaksanakan secara berkala	Melengkapi dokumen rapat bulanan dalam melakukan pemantauan capaian kinerja.

### Pengukuran Kinerja

<b>Rekomendasi LHE 2025</b>	<b>Rencana Aksi Lanjut</b>
Melaksanakan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang pada seluruh level organisasi.	Telah dilakukan inovasi dalam pengumpulan data capaian kinerja melalui google sheet dari eselon 2 sampai ke level staf yang bisa diakses kapan saja sehingga pemantauan lebih efektif. Untuk kedepannya pengukuran kinerja pada es 2 sampai es 3 beserta fungsional madya dipimpin oleh kadis setiap bulannya dan pengukuran kinerja secara berkala setiap bulan dari es 4, fungsional tertentu, sampai staf dipimpin oleh es 3 masing-masing yang dapat didokumentasikan.

iii



<b>Rekomendasi LHE 2025</b>	<b>Rencana Aksi Lanjut</b>
Melengkapi hasil monitoring pengukuran kinerja dengan kendala/hambatan pencapaian kinerja serta upaya pencapaian target kinerja.	Memuat kendala/hambatan pada dalam pencapaian target pada PK dan upaya dalam pencapaian target kinerja pada rapat-rapat evaluasi yang dituangkan dalam notulen rapat.
Terus berupaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh unit/satuan kerja dan pegawai atas hasil pengukuran kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disetiap rapat pimpinan/kadis menegaskan terkait kinerja dan capaiannya mulai dari es 3 sampai staf kepada seluruh ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>2. Melakukan desk capaian kinerja per bidang dan UPTD yang dihadiri oleh ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>3. Masing-masing ASN melakukan pengisian realisasi rencana aksi per TW dan melakukan pengisian capaian kinerja tiap bulannya</li> </ol>

### **Pelaporan Kinerja**

<b>Rekomendasi LHE 2025</b>	<b>Rencana Aksi Lanjut</b>
Informasi dalam Laporan Kinerja agar menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian indikator kinerja secara menyeluruh (orang, anggaran, mekanisme/SOP)	Laporan Kinerja akan menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian indikator kinerja secara menyeluruh (orang, anggaran, mekanisme/SOP)
Informasi dalam laporan kinerja agar menjadi perhatian pegawai dengan dilibatkannya seluruh pegawai dalam rapat evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala.	Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyusunan Renja dan Renja Perubahan, Perubahan Perjanjian Kinerja 2025, dan Perjanjian Kinerja 2026.

### **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

<b>Rekomendasi LHE 2025</b>	<b>Rencana Aksi Lanjut</b>
Dokumentasi evaluasi internal yang dilaksanakan agar menampilkan alternatif perbaikan pencapaian target organisasi.	Melakukan pemantauan kinerja mulai dari tingkat eselon 2 sampai staf secara berkala dan mendokumentasikannya



<b>Rekomendasi LHE 2025</b>	<b>Rencana Aksi Lanjut</b>
Hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP agar ditindaklanjuti dengan dokumen yang sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut.	Akan melakukan tindak lanjut dengan dokumen yang sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP dan Biro Organisasi

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah kategori Sangat Tinggi. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator setiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

### **Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>2025</b>		
				<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1	Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat	1.1. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah	unit usaha	56,803	58,426	102.86
2	Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah	2.1. Nilai produksi industri kecil dan menengah	Rp triliun	30.00	30.31	101.03
3	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	3.1. Nilai sektor perdagangan dalam PDRB	Rp triliun	53.43	58.63	109.73
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	4.1. Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	A	A	100.05
				(80.25)	(80.29)	
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	5.1. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Nilai	Baik	Baik	96.03
				(87.21)	(83.75)	
<b>Jumlah Capaian</b>						<b>509.71</b>
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>						<b>101.94</b>

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindag Prov. Sumbar 2025





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 GAMBARAN ORGANISASI

#### 1.1.1 DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dimana terbentuk 3 (tiga) UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, yaitu UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), UPTD Logam, dan UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri. UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

#### 1.1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Bab XXXI Bagian Kesatu Pasal 361 ayat 1 disebutkan bahwa "Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah". Selanjutnya pada Bagian Ketiga Paragraf 1 pasal 363 disebutkan Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 telah melaksanakan berbagai kegiatan yang ditunjang dengan dukungan dana, personil serta sarana yang tersedia agar tercapainya sasaran



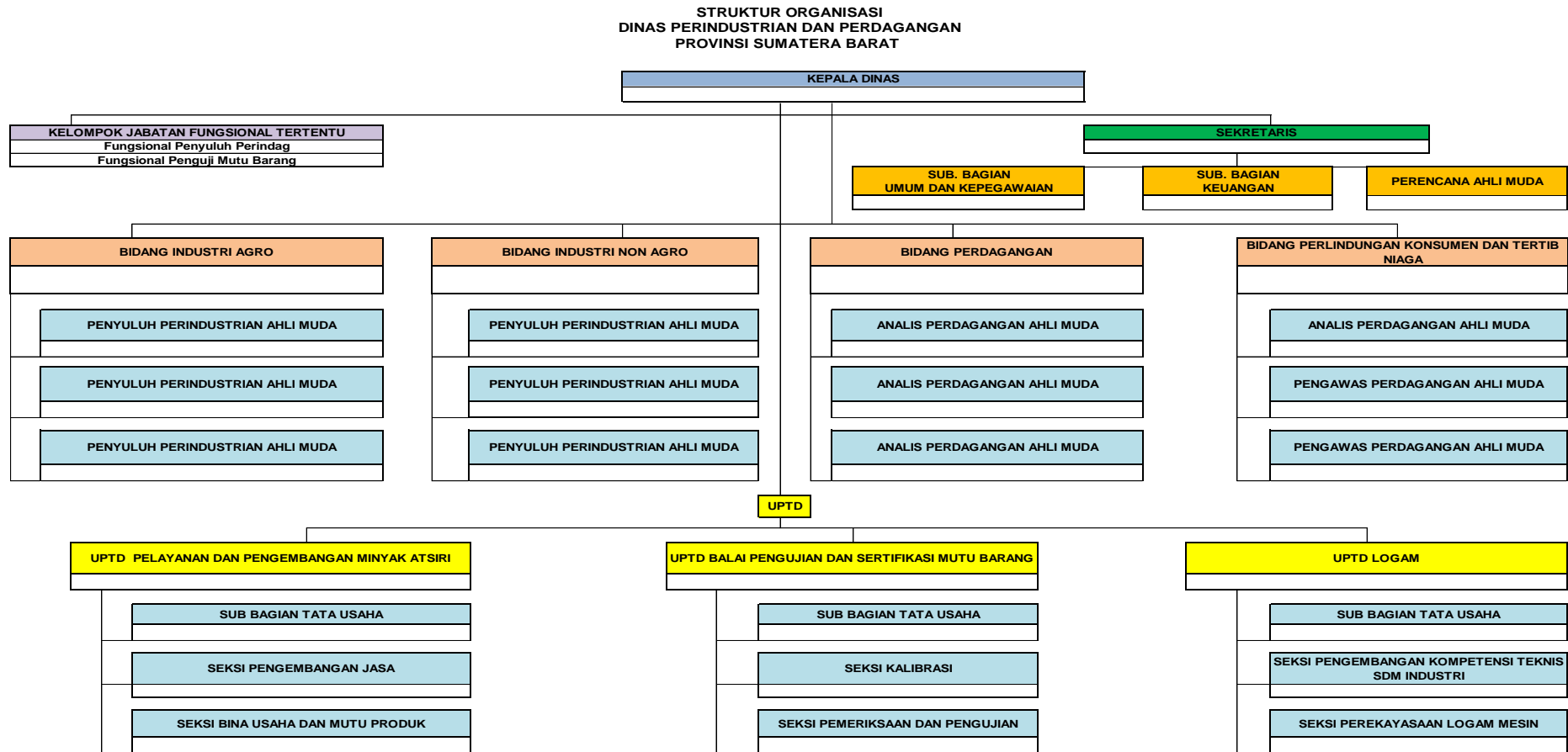
pembangunan ekonomi khususnya industri dan perdagangan di Sumatera Barat. Adapun program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

### **1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi yang terdiri atas 1 orang eselon II, 8 orang eselon III, 24 orang eselon IV dan Fungsional. Berikut jabaran struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur dimaksud:



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat**

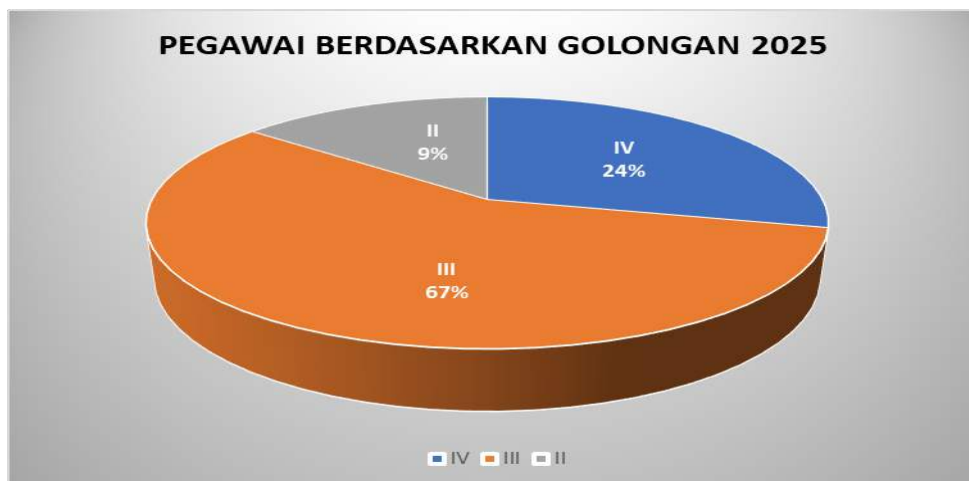
### 1.1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan di Sektor Perindustrian dan Perdagangan yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai jumlah total pegawai aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 87 orang yang terdiri dari golongan II sampai IV. Jumlah pegawai Dinas perindustrian dan Perdagangan berdasarkan golongan dapat dilihat pada **Tabel 1.1** berikut.

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Golongan**

No.	Unit Kerja	Golongan			Jumlah
		IV	III	II	
1.	Sekretariat	3	10	3	16
2.	Industri Non Agro	4	9	-	13
3.	Industri Agro	3	5	1	9
4.	Perdagangan	2	8	2	12
5.	PKTN	2	9	-	11
6.	UPTD BPSMB	3	9	1	13
7.	UPTD PPM. Atsiri	2	4	-	6
8.	UPTD Logam	2	4	1	7
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>87</b>

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat, 2025



Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat, 2025

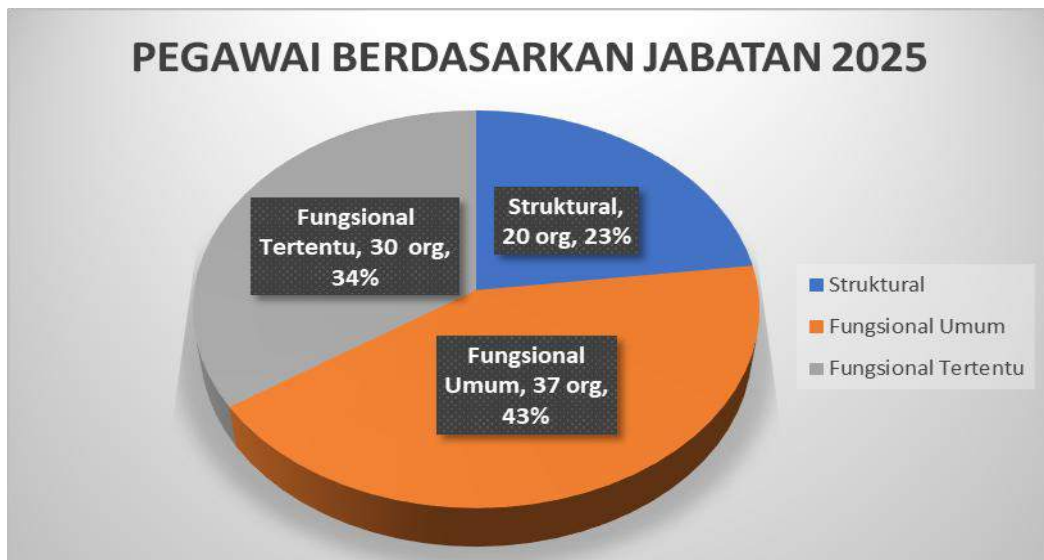
Gambar 1.2 Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Berdasarkan uraian jabatan, kekuatan jumlah pegawai yang terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada **Tabel 1.2** dan grafiknya dapat dilihat pada **Gambar 1.3**, dimana sebanyak 43% diisi oleh jabatan fungsional umum, 34% diisi oleh jabatan fungsional tertentu, dan 23% diisi oleh jabatan struktural.

**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Uraian Jabatan**

No.	Unit Kerja	Uraian Jabatan			Jumlah
		Struktural	Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	
1.	Sekretariat	4	11	1	16
2.	Industri Non Agro	1	6	6	13
3.	Industri Agro	1	4	4	9
4.	Perdagangan	1	5	6	12
5.	PKTN	1	3	7	11
6.	UPTD BPSMB	4	3	6	13
7.	UPTD PPM. Atsiri	4	2	0	6
8.	UPTD Logam	4	3	0	7
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>87</b>

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat, 2025



Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat, 2025

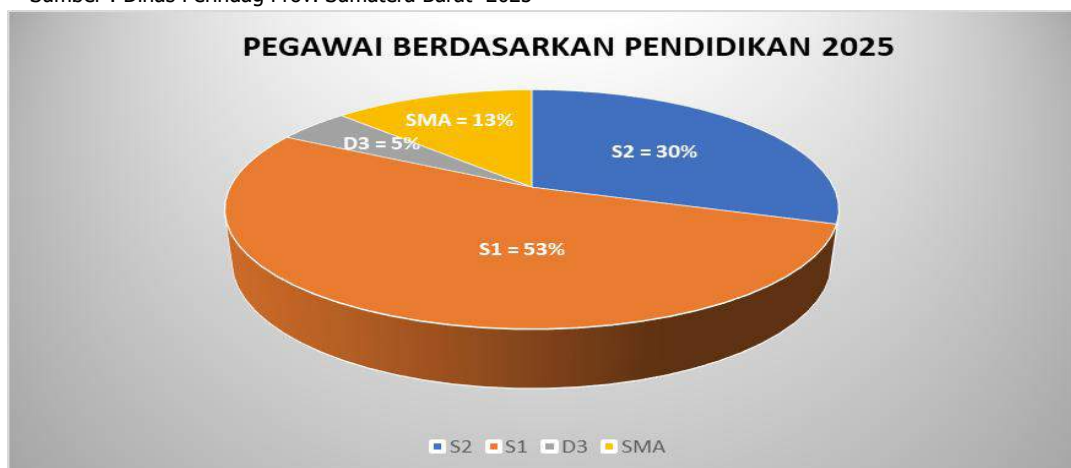
**Gambar 1.3** Kekuatan Pegawai Berdasarkan Uraian Jabatan

Berdasarkan tingkatan pendidikan, kekuatan jumlah pegawai yang terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada **Tabel 1.3** dan grafiknya dapat dilihat pada **Gambar 1.4**, dimana sebanyak 27% berpendidikan S2, 54% berpendidikan S1, 4% berpendidikan D3, dan 15% berpendidikan SMA. Pegawai tersebut tersebar di Sekretariat, 4 bidang dan 3 UPTD yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Unit Kerja	Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	
1.	Sekretariat	4	6	3	3	16
2.	Industri Non Agro	4	8	-	1	13
3.	Industri Agro	2	6	-	1	9
4.	Perdagangan	4	5	1	2	12
5.	PKTN	5	6	-	-	11
6.	UPTD BPSMB	2	9	-	2	13
7.	UPTD PPM. Atsiri	2	4	-	-	6
8.	UPTD Logam	3	2	-	2	7
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>87</b>

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat 2025



Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat, 2025

**Gambar 1.4** Kekuatan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



## **1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan urusan perindustrian dan perdagangan. Sasaran kepala daerah yang didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni pada sasaran pada misi ke-4 yakni meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital. Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama pada misi ke-4 Dinas Perindag mengusung indikator pertama sampai keempat, yakni kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, laju pertumbuhan sektor perdagangan dan jumlah sentra industri kecil dan menengah, meliputi :

1. Peningkatan daya saing produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui peningkatan kualitas produk, kontinuitas produksi, dan sertifikasi produk.
2. Pengembangan sentra Industri Kecil dan menengah melalui peningkatan sarana dan prasarana sentra, pendampingan dan penguatan SDM
3. Peningkatan hilirisasi dan diversifikasi produk melalui pelatihan dan pembinaan lanjutan
4. Penumbuhan millineal dan women entrepreneur sektor industri
5. Peningkatan sistem distribusi dan tata niaga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui penataan, pembinaan dan pengembangan pasar, stabilisasi ketersediaan harga bahan pokok dan barang penting di pasar dan pengembangan sistem perdagangan digital
6. Peningkatan perlindungan konsumen, pengawasan perdagangan, dan standardisasi mutu komoditi potensial
7. Pengembangan pasar ekspor produk unggulan daerah.

## **1.3 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Pembangunan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan tak lepas dari isu strategis yang mempengaruhi kinerja sektor industri dan perdagangan. Isu strategis adalah permasalahan utama yang dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, telah diidentifikasi isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Trend tumbuh cepatnya perdagangan elektronik melalui aplikasi belanja daring dengan berbagai aplikasi untuk daya saing pelaku usaha di Sumatera Barat.
2. Dukungan bagi peningkatan kemampuan manajerial melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan usaha dalam rangka peningkatan daya saing produk Industri Kecil Menengah baik dari segi kualitas, desain, harga, kemasan, kontinuitas produksi
3. Penguasaan teknologi tepat guna yang masih rendah
4. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya semangat wirausaha dikalangan masyarakat millineal, women entrepreneur dan pelaku ekonomi kreatif
5. Perlunya hilirisasi industri agricultur dan perikanan untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah



6. Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli.
7. Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya.
8. Masih banyak ditemui barang beredar yang tidak memenuhi ketentuan, seperti barang yang tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kadaluarsa, tanda SNI, manual dan garansi.
9. Peningkatan kerjasama regional diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 TUJUAN DAN SASARAN OPD

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan satu pada misi keempat RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital***, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan perdagangan tahun 2021-2026 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan  
Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing dengan memfokuskan kepada peningkatan pasar produk dalam negeri, mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, peningkatan eksportir daerah dan negara tujuan ekspor, stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar serta peningkatan standar dan mutu produk potensial.
2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah  
Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah di Sumatera Barat dengan memfokuskan pada peningkatan pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat serta peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah.
3. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.  
Menekankan kepada peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, peningkatan pengawasan organisasi dan peningkatan kualitas layanan organisasi.

Ketiga tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat tersebut beserta indikator kerjanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Tujuan				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	-1,14	-1,10	-1,00	1,00	1,01	1,02
2.	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	sentra	358	368	379	390	401	413
3.	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai akuntabilitas kinerja (nilai)	nilai	BB	BB	BB	A	A	A
		Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	nilai		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026



Penjabaran dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan

Perdagangan memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian daerah maupun nasional. Peningkatan usaha perdagangan akan berdampak terhadap kestabilan pendapatan. Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan diupayakan dengan peningkatan usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing yang dilakukan melalui peningkatan pasar produk dalam negeri termasuk pasar ekspor, stabilisasi ketersediaan harga bahan pokok dan barang penting, peningkatan standar dan mutu produk potensial, yang ditunjang dengan konsumen yang berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing, dengan indikator:
  - Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp triliun).

2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah

Pembangunan di sektor industri ikut memberikan peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Pertumbuhan industri kecil dan menengah dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah pelaku industri kecil dan menengah serta nilai produksi industri kecil dan menengah. Untuk meningkatkan jumlah pelaku industri kecil dan menengah serta nilai produksi perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat, dengan indikator:
  - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha).
- b. Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah, dengan indikator :
  - Nilai produksi industri kecil dan menengah (Rp triliun).

3. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kinerja organisasi adalah :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator :
  - Nilai akuntabilitas kinerja OPD.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator :
  - Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.



Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi Kepala Daerah untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Lebih dari itu, perumusan tujuan dan sasaran strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Kepala Daerah telah dicapai mengingat tujuan dan sasaran strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur sebagaimana digambarkan pada *cascading (pohon kinerja) yang terdapat pada lampiran.*

Sementara itu, untuk tujuan dan sasaran utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan target Jangka Menengah yang telah disepakati dapat dilihat pada **Rumusan tujuan dan sasaran** yang diuraikan sebagai berikut



**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan									
Misi ke-4 Gubernur dan Wakil Gubernur : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital									
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	SS 1 Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat	1.1 Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	39,403	41,373	43,263	45,363	47,673	50,193
		SS 2 Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah	2.1 Nilai produksi industri kecil dan menengah (Rp triliun)	15.40	15.70	16.00	16.30	16.70	17.00
2.	Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan	SS 3 Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	3.1 Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp triliun)	39.30	41.27	44.16	48.57	53.43	58.78
3.	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	SS 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	4.1 Nilai akuntabilitas kinerja OPD (nilai)	BB	BB	BB	A	A	A
		SS 5 Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	5.1 Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026



## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah ditetapkan pada Januari 2025 sebagaimana lampiran I dikarenakan tidak ada mengalami perubahan target kinerja sehingga hanya melakukan penyesuaian anggaran. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dibawah ini sudah menyesuaikan dengan anggaran perubahan tahun 2025. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya jumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah di Sumatera Barat	1.1	Jumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah (unit usaha)	56,803
2.	Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah	2.1	Nilai produksi industri kecil dan menengah (Rp triliun)	30.00
3.	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	3.1	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp triliun)	53.43
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	4.1.	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	A (80,25)
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	5.1.	Tingkat kepuasan terhadap organisasi	Baik (87,21)
NO.	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	4,721,228,943.00	APBD
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	16,714,000.00	APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	154,880,000.00	APBD
4.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	1,638,682,649.00	APBD
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	1,816,430,000.00	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	18,821,683,354.00	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>27,169,618,946.00</b>	

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat Tahun 2025 Pagu Yang Sudah Sesuai Perubahan

Berikut perbandingan antara anggaran pada APBD awal 2025 dengan anggaran perubahan Tahun 2025.



**Tabel 2.4 Anggaran Awal dan Anggaran Perubahan Tahun 2025 Disperindag**

NO.	Program	APBD Awal		APBD Perubahan
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	6,320,878,126.14	4,721,228,943.00
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	19,140,000.00	16,714,000.00
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	177,170,000.00	154,880,000.00
4.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	1,694,043,960.00	1,638,682,649.00
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	1,949,250,110.00	1,816,430,000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	21,137,361,644.86	18,821,683,354
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>31,297,843,841</b>	<b>27,169,618,946</b>

Sumber : Dinas Perindag, 2025

Bila dibandingkan dengan anggaran pada APBD awal terjadi pengurangan anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp 4.128.224.895,- atau sebesar 13,19%. Perubahan anggaran pada tahun 2025 tidak mempengaruhi target indikator kinerja pada eselon 2.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada pragraf 2 pasal 19 poin d.3, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

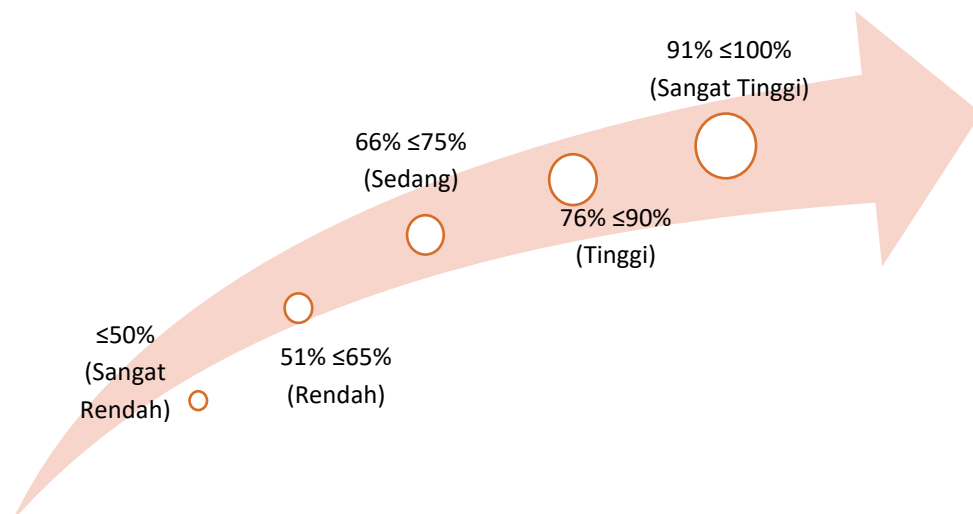
2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:





Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{((PA \times CK) - RA)}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%), maksimal capaian kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left( \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Nilai ini yang akan disajikan sebagai tingkat efisiensi OPD. Untuk yang Nilai efisiensinya tercapai >100% maka nilai efisiensinya dibulatkan 100%.

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut.



**Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025			
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat	1.1.	Jumlah pelaku industri kecil dan menengah	unit usaha	56,803	58,426	102.86
2	Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah	2.1.	Nilai produksi industri kecil dan menengah	Rp triliun	30.00	30.31	101.03
3	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	3.1.	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB	Rp triliun	53.43	58.63	109.73
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	4.1.	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	A	A	100.05
					(80.25)	(80.29)	
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	5.1.	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Nilai	Baik	Baik	96.03
					(87.21)	(83.75)	
<b>Jumlah Capaian</b>							<b>509.71</b>
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>							<b>101.94</b>

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindag Prov. Sumbar 2025

Dari hasil analisis terhadap 5 sasaran yang mencakup 5 indikator kinerja sasaran, dapat diketahui bahwa terdapat 5 indikator berpredikat sangat tinggi yaitu indikator meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat yakni 102,86%, indikator kinerja meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah dengan capaian kinerja sebesar 101,03%, indikator nilai sektor perdagangan dalam PDRB dengan capaian kinerja sebesar 109,73%, indikator meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi sebesar 100,05%, dan indikator meningkatnya kualitas pelayanan organisasi sebesar 96,03%.

### 3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

#### Analisis Capaian Tujuan 1 Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil Dan Menengah



#### Penjelasan Terkait Tujuan yang Akan Diukur serta Indikator yang Digunakan

Sumatera Barat memiliki banyak potensi dalam pengembangan Industri Kecil Menengah. Pertumbuhan industri kecil dan menengah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat. Untuk kedepannya usaha industri kecil menengah di Sumatera Barat lebih dapat meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah secara terpadu, komprehensif, intensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian peranan sektor industri akan semakin besar dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang berupa Kawasan *Padang Industrial Park* (PIP).

Berdasarkan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran "Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah" sebagai sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah yang tangguh dan berdaya saing. Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah salah satunya laju pertumbuhan sektor industri.

#### Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Pengukuran indikator tersebut berdasarkan data dari Data BPS Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan indikator baru mulai pada tahun 2024 dan rencananya akan dipakai pada tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan. Target tahun 2025 ini 2,58% berdasarkan proyeksi data dasar pada tahun 2024 untuk beberapa tahun kedepan.

#### Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian tujuan Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah pada tujuan 1, diukur dengan indikator kinerja laju pertumbuhan sektor industri. Lebih jelasnya target, realisasi, dan capaian pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.



### Target, Realisasi, dan Capaian Pengukuran Kinerja Tujuan 1 (dalam %)

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	1.1. Laju pertumbuhan sektor industri (%)	2,58	5,42	210,08%	Sangat Tinggi

Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

### Pengukuran Realisasi Kinerja

Realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan sektor industri sebesar 5,42% di tahun 2025 diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.12/02/13/Th.XXIX tanggal 05 Februari 2026 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV-2025 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Laju} \\ \text{Pertumbuhan} \\ \text{Sektor Industri} \end{aligned} = \frac{\text{Rp } 18,86 \text{ triliun} - \text{Rp } 17,89 \text{ triliun}}{\text{Rp } 17,89 \text{ triliun}} \times 100\% = 5,42\%$$

Keterangan:

Nilai PDRB sub sektor industri tahun 2025 (ADHK) sebesar Rp. 18,86 triliun  
Nilai PDRB sub sektor industri tahun 2024 (ADHK) sebesar Rp. 17,89 triliun

### Pengukuran Capaian Kinerja

Pada indikator tujuan 1 : **Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah**, tingkat capaian kinerja indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja laju pertumbuhan sektor industri tahun 2025 adalah

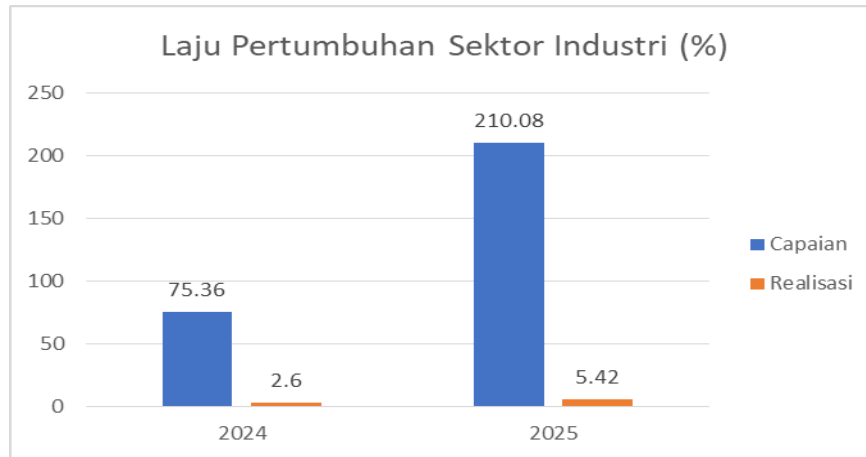
$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{5,42}{2,58} \times 100\% \\ &= 210,08\% \end{aligned}$$

Realisasi laju pertumbuhan sektor industri tahun 2025 sebanyak 5,42% dari target pada tahun 2025 pada RPJMD di tahun 2025 adalah 2,58%, sehingga diperoleh capaian 210,08%.



### Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Jika dilihat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2024 terjadi kenaikan laju pertumbuhan sektor industri dari 2,6% menjadi 5,42% di Tahun 2025. Perbandingan target dan realisasi untuk indikator laju pertumbuhan sektor industri Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



### Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi kinerja tujuan 1 pada tahun 2025 berdasarkan target RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

#### Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian terhadap Renstra 2025
1	Laju pertumbuhan sektor industri (%)	5,42%	3,55%	152,67 %

Dari tabel terlihat bahwa laju pertumbuhan sektor industri di Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah 5,42%. Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja laju pertumbuhan sektor industri di Sumatera Barat ditargetkan mencapai 3,55% pada tahun 2026 dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 152,67%, sudah melebihi dari target.

### Perkembangan Indikator Tujuan 1 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir

Laju pertumbuhan sektor industri dari tahun 2021-2025 menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuatif. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2025 sebesar 5,42 dan terendah

sebesar 1,75 terjadi di tahun 2022. Perkembangan laju pertumbuhan sektor industri tahun 2021-2025 ditampilkan pada gambar berikut :



Peningkatan laju pertumbuhan industri tahun 2025 dikarenakan adanya hilirisasi CPO yakni penambahan 2 industri baru yakni PT. Sumatera Karya Agro dan PT. Hamparan Kemilau Indah serta terjadinya peningkatan nilai ekspor sektor industri pengolahan melonjak 37,73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

Untuk indikator kinerja tujuan 1, Target Nasional pada RPJMN 2025-2029, untuk indikator laju pertumbuhan sektor industri tidak ada dalam target nasional. Kinerja terkait urusan industri pada RPJMN 2025-2029 yakni rasio PDRB industri pengolahan yang ditargetkan 8-46-8,53. Dimana pada tahun 2025 realisasi rasio PDRB industri pengolahan di Sumatera Barat sebesar 8,55% sudah mencapai target nasional.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta faktor lain yang mendorong tercapainya indikator tujuan 1 ini adalah

1. Peningkatan kapasitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui Bimtek dan Pelatihan sebanyak 1.226 pelaku IKM pada tahun 2025.
2. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah terkait dengan kualitas produk, manajemen produk, kebersihan dapur produksi, dan terkait pemasaran produk.
3. Penumbuhan dan peningkatan kualitas SDM enterpreneur.
4. Peningkatan kualitas produk IKM melalui pelatihan teknis mutu produk dan pelatihan Cara Produk Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
5. Memberikan bantuan mesin peralatan kepada sentra-sentra industri atau kelompok pelaku industri kecil dan menengah dengan terlebih dahulu dilakukan pelatihan dan bimtek.
6. Pelaksanaan bimtek izin usaha industri dan melakukan pengawasan industri.



Disamping itu, terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian indikator tujuan 1, diantaranya

1. Masih terbatasnya kemampuan sebagian SDM pelaku IKM dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
2. Belum semua IKM yang paham akan pentingnya legalitas usaha termasuk sertifikasi produk yang dimiliki, karena jika ingin memperluas akses pasar maka diperlukan legalitas dan sertifikasi yang lengkap
3. Belum semua sentra/kelompok usaha memiliki mesin produksi yang lengkap
4. Bencana alam banjir yang mengganggu produksi yang menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak infrastruktur dan mengganggu rantai pasok produksi industri.

Sehingga untuk mencapai tujuan Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah maka terdapat 2 sasaran strategis yang ingin dicapai, yakni :

1. Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat
2. Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1**

**“Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat ”**

### **Penjelasan Terkait Sasaran yang Akan Diukur serta Indikator yang Digunakan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dijelaskan bahwa perindustrian merupakan tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Sasaran strategis 1 yakni Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat dapat diukur dengan indikator kinerja Jumlah pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat. Semakin banyak jumlah unit usaha industri kecil dan menengah di Sumatera Barat maka akan semakin dapat mewujudkan sasaran meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat.

### **Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja**

Penetapan target jumlah pelaku industri kecil dan menengah pada tahun 2025 sebesar 56.803 unit dari realisasi tahun sebelumnya yang sudah melebihi target pada Renstra 2021-2026.



### Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian sasaran Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat pada sasaran strategis 1, diukur dengan indikator kinerja jumlah pelaku industri kecil dan menengah. Lebih jelasnya target, realisasi, dan capaian pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat	1.1. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	56.803	58.426	102,86%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Olahan Data Disperindag, BPS Sumbar Dalam Angka, 2025

Jumlah pelaku industri kecil dan menengah ditargetkan 56.803 unit usaha, terealisasi 58.426 unit usaha dengan capaian 102,86% termasuk predikat sangat tinggi.

### Pengukuran Realisasi Kinerja

Realisasi jumlah pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat sebesar 58.426 unit berasal dari akumulasi jumlah industri kecil dan menengah dari 19 Kab/kota di Sumatera Barat termasuk usaha yang berizin (formal) maupun yang belum berizin (non formal). Biasanya data ini akan dimunculkan pada data Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025. Hasil indikator kinerja jumlah pelaku industri kecil dan menengah diukur melalui penghitungan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Jumlah pelaku industri kecil dan menengah} = \text{Jumlah unit usaha industri kecil menengah sampai dengan tahun N}$$

Jumlah pelaku industri kecil dan menengah, jumlah tenaga kerja, dan nilai investasi pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3 Jumlah Pelaku Industri Kecil dan Menengah di Sumatera Barat Tahun 2025**

NO.	KABUPATEN / KOTA	UNIT USAHA (UU)	TENAGA KERJA (ORANG)	NILAI INVESTASI (RP.000)
	<b>Kabupaten</b>			
1	Pesisir Selatan	5.303	14.754	1.803.552.937
2	Solok	4.018	8.385	512.910.060
3	Sijunjung	1.236	3.336	75.707.763
4	Tanah Datar	5.956	15.262	183.050.778
5	Padang Pariaman	3.035	7.884	1.451.034.248
6	Agam	4.997	12.921	83.083.507

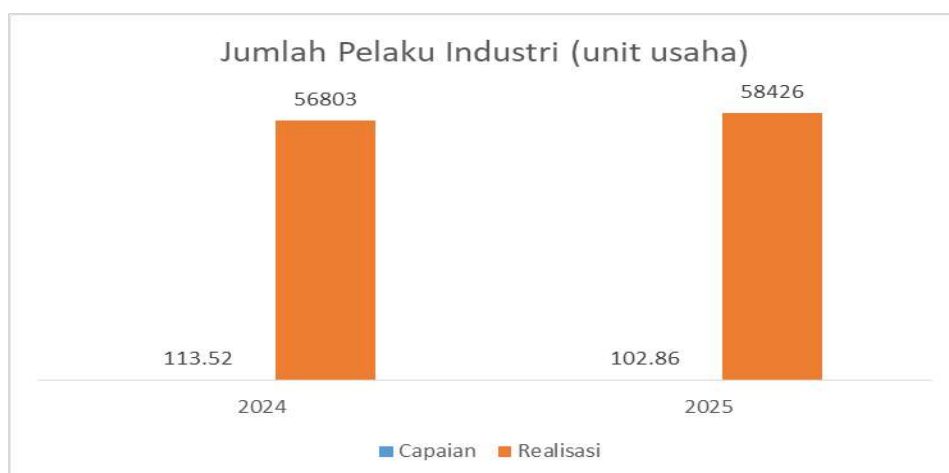


NO.	KABUPATEN / KOTA	UNIT USAHA (UU)	TENAGA KERJA (ORANG)	NILAI INVESTASI (RP.000)
	<b>Kabupaten</b>			
7	50 Kota	6.113	20.321	181.426.899
8	Pasaman	1.678	10.591	37.744.853
9	Kep. Mentawai	766	1.885	9.922.375
10	Pasaman Barat	1.760	4.969	63.597.008
11	Solok Selatan	1.529	3.051	25.982.275
12	Dharmasraya	1.170	3.598	4.345.512
	<b>Kota</b>			
13	Padang	9.176	12.491	6.357.717.068
14	Solok	1.047	3.593	25.074.379
15	Sawahlunto	1.801	2.716	173.347.300
16	Padang Panjang	818	1.903	8.080.957
17	Bukittinggi	3.696	7.942	64.293.430
18	Payakumbuh	2.500	7.563	108.991.974
19	Pariaman	1.827	5.640	46.155.929
	<b>JUMLAH</b>	<b>58.426</b>	<b>148.805</b>	<b>9.559.115.848</b>

Sumber : Disperindag dan BPS Sumbar Dalam Angka, 2025

### Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Jumlah Pelaku Industri Kecil dan Menengah serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Jika dilihat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2024 terjadi kenaikan jumlah pelaku industri kecil dan menengah dari 56.803 unit usaha naik menjadi 58.426 unit usaha di Tahun 2025. Perbandingan realisasi dan capaian untuk indikator jumlah pelaku industri kecil dan menengah Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



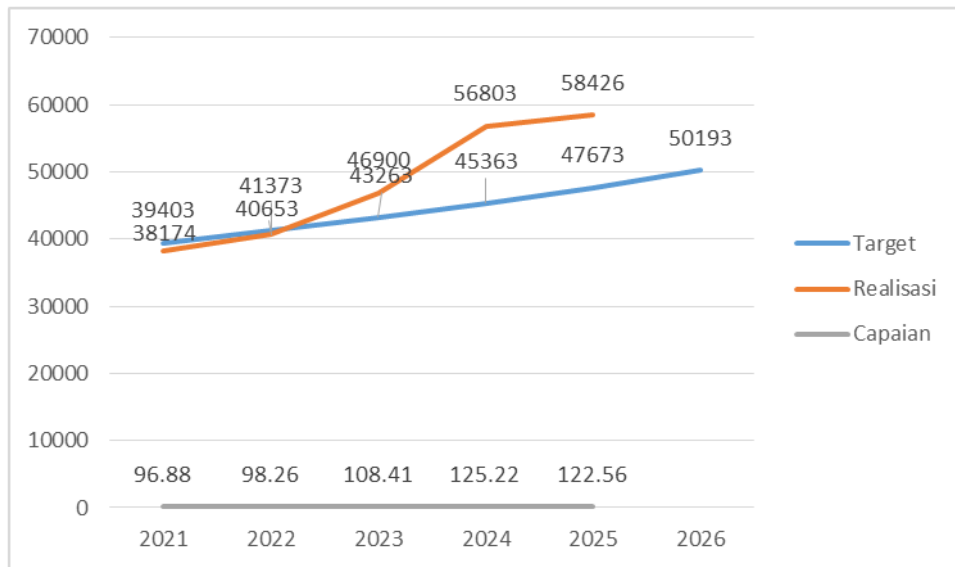
**Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Pelaku Industri Kecil dan Menengah Tahun 2024 dan 2025**

**Tabel 3.4 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun Ini, Tahun Lalu, dan Beberapa Tahun Terakhir**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat	1.1. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	39,403	38,174	96,88	41,373	40,653	98,26	43,263	46,900	108,41	50,040	56,803	113,52	56,803	58,426	102,86
Capaian Sasaran Strategis 1			96,88 (sangat baik)			98,26 (sangat baik)			108,41 (sangat baik)			113,52 (sangat baik)			102,86 (sangat baik)		

Jika dilihat dari tabel diatas, target kinerja pada sasaran strategis 1 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 5% tiap tahunnya, angka peramalan (forecasting) ini diperoleh dari data kondisi eksisting lima tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, dilakukan penyesuaian target pada PK dengan melihat capaian tahun sebelumnya. Capaian target kinerja pada sasaran strategis 1 dari tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan dari 96,88% menjadi 102,86% pada tahun 2025.

Perbandingan target kinerja pada sasaran strategis 1 selama tahun renstra 2021-2026 dengan realisasi dan capaian 2021 sampai 2025, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



**Gambar 3.2 Target, Realisasi dan Capaian Jumlah Pelaku Industri Kecil dan Menengah Tahun 2021 s.d 2026 serta Target Jangka Menengah**

**Membandingkan Realisasi Kinerja Jumlah Pelaku Industri kecil dan Menengah Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Organisasi**

Capaian realisasi kinerja sasaran strategis 1 Meningkatnya jumlah pelaku industri kecil dan menengah pada tahun 2025 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

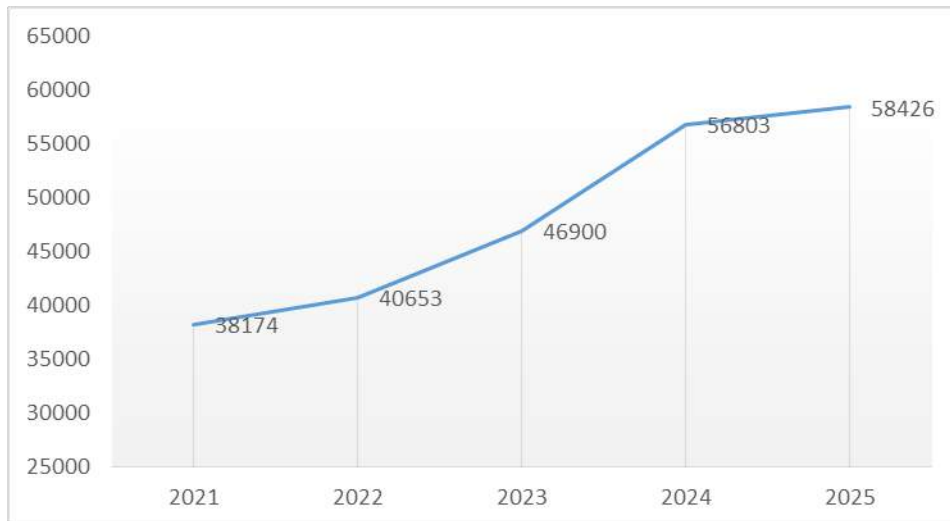
**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian terhadap Renstra 2025
1	Jumlah pelaku industri kecil dan menengah	58.426 unit usaha	50.193 unit usaha	116,40%

Dari tabel terlihat bahwa jumlah pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah sebanyak 58.426 unit usaha. Berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026, indikator kinerja jumlah pelaku industri kecil dan menengah ditargetkan mencapai 50.193 unit usaha pada tahun 2026 dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 116,40%. Sampai kondisi tahun 2025 telah tercapai target akhir renstra 2026.

### **Perkembangan Realisasi Indikator Sasaran Strategis 1 Jumlah Pelaku Industri Kecil dan Menengah Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir**

Perkembangan jumlah pelaku industri kecil dan menengah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 3.3 Perkembangan Jumlah Pelaku Industri Kecil Menengah Tahun 2021-2025**

Dari grafik terlihat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara keseluruhan terjadi trend menaik untuk indikator sasaran strategis 1 Jumlah pelaku industri kecil dan menengah. Walaupun terjadi fluktuasi yang disebabkan terjadinya pandemi covid pada tahun 2020 dan 2021.

### **Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

Untuk indikator kinerja pada Sasaran 1 yaitu jumlah pelaku industri kecil dan menengah, tidak ada Standar Nasional sebagai Pembanding. Pada RPJMN dan Renstra Kementerian



Perindustrian RI Tahun 2025-2029, yang menjadi indikator kinerja utamanya adalah pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas dan kontribusi PDB industri pengolahan non migas.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan**

Peningkatan jumlah pelaku industri kecil dan menengah pada tahun 2025 disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Perekonomian di Sumatera Barat yang sudah mulai membaik dan kembali dibukanya pelaksanaan even-even nasional ataupun pameran dan objek wisata di Sumatera Barat sehingga pelaku usaha industri kecil dan menengah semakin bertambah dengan bertambahnya peluang pasar lokal;
2. Hilirisasi produk berbasis sumber daya alam khususnya untuk komoditas unggulan, mendorong tumbuhnya industri pengolahan baru di kabupaten/kota;
3. Kemudahan sistem perizinan berusaha dengan OSS (*One Single Submission*) sehingga banyak pelaku usaha industri kecil dan menengah yang selama ini belum tercatat menjadi bertambah dengan kemudahan pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha).
4. Pengembangan industri halal dan ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Barat mendorong pelaku usaha lokal terutama bidang industri makanan dan fashion.

Untuk meningkatkan pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat perlu diketahui faktor pendorong dan faktor penghambat serta strategi pemecahan masalah, sehingga bisa disusun program dan kegiatan yang dapat mengatasinya.

Dalam upaya pencapaian sasaran ***Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat***, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi atau upaya pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut:



#### **Faktor Pendorong**

1. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Barat Tahun 2018-2038 sebagai pedoman dalam mengembangkan sektor industri di Provinsi Sumatera Barat;
2. Tersedianya tenaga Fungsional Penyuluh Perindag yang siap untuk membantu meningkatkan kompetensi pelaku usaha industri dalam mengembangkan usahanya kemudian penyederhanaan birokrasi dimana pejabat administrator dialih fungsikan menjadi fungsional perindustrian sehingga akan membantu fungsional penyuluh Perindag yang ada;
3. Melakukan hilirisasi dan diversifikasi produk industri di kabupaten/kota terutama terhadap industri kecil menengah;
4. Dukungan pemerintah mewujudkan millineal entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif;
5. Potensi produk pangan dan produk kerajinan di Sumatera Barat;



6. Pemerintah Daerah mendukung kebijakan pemulihan ekonomi untuk menggunakan produk lokal dan bangga buatan produk Indonesia;
7. Dicanangkannya Sumatera Barat sebagai destinasi wisata memberi peluang kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah.



### Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

Tabel 3.6

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Keterbatasan kualitas SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah	Melakukan bimtek penguatan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah
2.	Belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah	Melakukan bimtek dan pelatihan hilirisasi produk serta bantuan peralatan bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah
3.	Peserta pelatihan penumbuhan wirausaha baru belum semuanya aktif menjalankan usahanya	Perlunya pembinaan secara bersama antara kabupaten/kota dan provinsi untuk melakukan pembinaan lanjutan baik itu terhadap bimtek dan pelatihan peningkatan kualitas, dan fasilitasi sertifikasi halal untuk produk makanan



### Upaya-upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2025

Dalam rangka mencapai sasaran strategis satu yakni meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat, upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peningkatan jumlah pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat adalah

1. Peningkatan kapasitas pelaku IKM melalui Bimtek dan Pelatihan  
Selama Tahun 2025, khususnya urusan industri telah melakukan bimtek dan pelatihan kepada pelaku industri kecil dan menengah kepada 1.226 pelaku IKM, yang terdiri dari pelatihan dan bimtek :
  - a. Pelatihan Sulam dan Bordir
  - b. Pelatihan Menjahit dan Bantuan Alat
  - c. Pelatihan Peningkatan Kompetensi IKM Menjahit
  - d. Pelatihan Pengembangan Desain Produk Fashion
  - e. Pelatihan Peningkatan Desain Produk Batik
  - f. Pelatihan Pengembangan Produk Kerajinan Olahan Kayu
  - g. Bimtek Pengolahan Makanan dan Minuman
  - h. Pelatihan Kuliner
  - i. Pelatihan Pembuatan Keripik dan Bantuan Peralatan
  - j. Pelatihan Roasting Kopi
  - k. Bimtek Produksi Bagi WUB IKM Logam Mesin



2. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah yang terkait dengan pembinaan kualitas produk, manajemen produk, kebersihan dapur produksi, dan terkait pemasaran produk.
3. Penumbuhan dan peningkatan kualitas SDM entrepreneur  
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Keputusan Gubernur Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat dimana Dinas Perindag merupakan salah satu Perangkat Daerah pengusung program unggulan (progul). Dengan program unggulan mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif. Dimana untuk tahun 2025 sesuai dengan target di Perda yakni sebesar 2.200 orang, dengan realisasi sebesar 1.535 orang. Ketidak tercapaian target progul disebabkan oleh beberapa hal yakni terjadinya efisiensi anggaran sehingga target progul yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Untuk urusan industri sebesar 1.186 orang, yang terdiri dari pelatihan teknis dan pelatihan manajemen untuk wirausaha baru. Pelatihan yang berkaitan dengan penumbuhan dan peningkatan kualitas SDM entrepreneur adalah :
  - a. Pelatihan Wira Usaha Baru Olahan Makanan di Kota Padang
  - b. Pelatihan Bordir di Kab. Lima Puluh Kota
  - c. Pelatihan Menjahit di Kota Padang dan Kab. Lima Puluh Kota
  - d. Bimtek Pengolahan Makanan dan Minuman di Kota Padang
  - e. Bimtek Makanan Kuliner di Kota Bukittinggi
  - f. Pelatihan Kuliner di Kota Padang
  - g. Pelatihan Roasting Kopi di Kab. Solok Selatan
  - h. Bimtek Produksi Bagi WUB IKM Logam Mesin di Kota Padang



### **Upaya-upaya yang dilakukan untuk masa mendatang**

1. Melanjutkan peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah melalui hilirisasi produk industri dan peningkatan pengembangan dan desain produk. Sepuluh industri unggulan yang akan dikembangkan di Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPIP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 Perda Nomor 14 Tahun 2018 yakni industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan kakao, industri pengolahan makanan, industri pengolahan gambir, industri pengolahan minyak atsiri, industri pengolahan semen, industri pengolahan kulit, industri pengolahan tekstil dan produk tekstil, industri alat dan mesin pertanian, industri maritim, industri pengolahan kelapa dan industri pengolahan kelapa sawit.
2. Tetap melaksanakan peningkatan wirausaha industri kecil melalui pelatihan manajemen dan teknis bagi wirausaha industri kecil dan fasilitasi perizinan usaha. Hal ini dilakukan dalam mendukung progul Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan millineal entrepreneur, women entrepreneur, dan pelaku ekonomi kreatif sehingga diharapkan akan memberikan sumbangan bagi peningkatan jumlah pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat yang bergerak di 12 industri unggulan di Sumatera Barat.
3. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah yang terkait dengan pembinaan kualitas produk, manajemen produk, kebersihan dapur produksi, dan terkait pemasaran produk.



4. Melakukan kolaborasi dengan pendekatan pentahelix yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pencapaian indikator kinerja dan program daerah

#### **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan terhadap analisis efisiensi penggunaan anggaran, efisiensi penggunaan SDM, dan sarana prasarana.

Analisis dari efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian *sasaran strategis meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat* didukung oleh 3 (tiga) Program yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (3 kegiatan yakni 2 di bidang, 1 di UPTD Logam, dan 1 di UPTD PPM Atsiri, 3 sub kegiatan), Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (1 kegiatan, 1 sub kegiatan), dan Program Pengendalian Izin Usaha Industri (1 kegiatan, 1 sub kegiatan). Dimana anggaran pada APBD Perubahan 2025 diluar belanja pegawai sebesar Rp 4.892.822.943,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.570.278.925,- atau 93,41% dengan realisasi fisik kegiatan 100%. Terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 322.544.018,- atau 6,59%. Efisiensi yang dilakukan terkait diantaranya sebagai berikut :

1. Sisa akomodasi, tiket pesawat narsum, honor narsum, belanja bahan praktek, sewa alat, sewa bus, dan makan minum kegiatan;
2. Sisa e-katalog dari pengadaan mesin bantuan peralatan;

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis 1 tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{((PA \times CK) - RA)}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%), maksimal capaian kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} &= \frac{(Rp\ 4.892.822.943 \times 102,86\%) - Rp\ 4.570.278.925}{Rp\ 4.892.822.943} \times 100\% \\ &= 0,09\% \end{aligned}$$

Tingkat efisiensi sebesar 0,09% artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah optimal untuk mencapai sasaran.

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left( \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$



$$= 50\% + \left(\frac{0,09}{20} \times 50\right) = 73,63 \%$$

Nilai efisiensi sebesar 73,63 % jika lebih besar dari 20% artinya nilai efisiensi adalah 100%.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran 1 Meningkatkan Pelaku Industri Kecil dan Menengah di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Jumlah SDM yang berkompeten dalam meningkatkan pelaku industri kecil dan menengah	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup (memadai). Dimana tenaga fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan belum bisa aktif melakukan pembinaan kepada pelaku IKM maupun pelayanan pada Klinik Konsultasi IKM disebabkan juga merangkap melakukan pelaksanaan kegiatan di bidang. Berdasarkan analisa kebutuhan anjab dibutuhkan 64 orang untuk urusan industri, saat ini yang masih dipenuhi baru sekitar 37 orang.	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis, dengan efisiensi sebesar 73,63%, nilai efisiensi 100%	Anggaran belum dapat mengakomodir kegiatan secara maksimal untuk kegiatan pelatihan wirausaha baru, pelatihan teknis/bimtek pada 12 industri unggulan daerah yang terdapat dalam RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat)	Optimalisasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja dan program daerah melalui kolaborasi pentahelix yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media



No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
3	Sarana dan prasarana yang lengkap sehingga dapat mendukung capaian kinerja sasaran strategis 1	Jumlah sarana dan prasarana dalam mendukung capaian kinerja saat ini belum cukup (memadai). Saat ini dilakukan pengoptimalan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana, baik itu sarana dan prasarana pada UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri maupun pada UPTD Logam pada saat kebutuhan pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk sarana dan prasarana kendaraan dinas dalam melakukan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan ke kab/kota	Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk melakukan pengadaan mesin peralatan pada UPTD secara bertahap.

#### **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program-program yang dilaksanakan tersebut sudah menunjang pencapaian sasaran strategis *meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat*, begitupun dengan kegiatan pada masing-masing program. Lebih lengkapnya program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 *meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat* dan capaian masing-masing program kegiatan pendukung sasaran strategis 1 terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.7  
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2025 Pendukung Sasaran Strategis Satu**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya jumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah di Sumatera Barat	1.1 Jumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah (unit usaha)	TW 1	-	-	-						4,892,822,943	4,570,278,925	
			TW 2	49,176	56,803	116%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri							
			TW 3	52,989	56,803	107%		1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	29 Sentra	28 Sentra	4,721,228,943	4,406,928,725	
			TW 4	56,803	58,426	102.86%		1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	28 dokumen	31 dokumen	3,986,404,610	3,723,212,785	Ind. Agro & Non Agro
								2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	3 dokumen	3 dokumen	624,726,392	576,823,166	UPTD Logam
								3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	110,097,941	106,892,774	UPTD PPMA



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	Ket
							Program Pengendalian Izin Usaha Industri					16,714,000	10,345,000	
								1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah aparat dan pelaku industri yang mendapatkan Bimtek IUI dan pengawasan	100%	100%	16,714,000	10,345,000	Ind. Non Agro
								1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	16,714,000	10,345,000	
							Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					154,880,000	153,005,200	
								1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah pelaku industri	47,673	58,426	154,880,000	153,005,200	
								1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui SIINas	1 dokumen	1 dokumen	154,880,000	153,005,200	Ind. Non Agro



Kemudian dalam rangka mewujudkan tujuan Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah yang didukung oleh dua sasaran strategis yakni selain dengan meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat, juga meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis 2 tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### Sasaran Strategis 2

“Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah”

#### Penjelasan Terkait Sasaran yang Akan Diukur serta Indikator yang Digunakan

Sasaran strategis 2 yakni *Meningkatkan nilai produksi industri kecil dan menengah*, untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kinerja Nilai produksi industri kecil dan menengah dalam Rupiah triliun. Indikator ini digunakan karena dapat menunjukkan pencapaian sasaran meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah di Sumatera Barat. Dimana nilai produksi industri kecil dan menengah menunjukkan jumlah produksi barang IKM dalam 1 tahun yang dinyatakan dalam rupiah. Semakin meningkat nilai produksi IKM berarti semakin banyak produksi barang/produk industri yang dihasilkan oleh pelaku IKM di Sumatera Barat sehingga semakin meningkat pula pendapatan pelaku IKM.

#### Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Penetapan target Nilai produksi industri kecil dan menengah pada tahun 2025 sebesar Rp 30 triliun dari realisasi tahun sebelumnya yang sudah melebihi target pada Renstra 2021-2026.

#### Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian sasaran Meningkatkan nilai produksi industri kecil dan menengah pada sasaran strategis 2, diukur dengan indikator kinerja nilai produksi industri kecil dan menengah. Lebih jelasnya target, realisasi, dan capaian pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.8 Target, Realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah	1.1. Nilai produksi industri kecil dan menengah (Rp triliun)	30,00	30,31	101.03%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Olahan Data Disperindag, BPS Sumbar Dalam Angka, 2025



## Pengukuran Realisasi Kinerja

Nilai produksi industri kecil dan menengah di Sumatera Barat berasal dari akumulasi nilai produksi barang industri kecil dan menengah dalam 1 tahun dari 19 Kab/kota di Sumatera Barat termasuk usaha yang berizin (formal) maupun yang belum berizin (non formal) yang diberasal dari 19 kab/kota di Sumatera Barat. Biasanya data ini akan dimunculkan pada data Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025. Hasil indikator kinerja nilai produksi industri kecil dan menengah diukur melalui penghitungan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Nilai produksi industri kecil dan menengah} = \text{Jumlah produksi barang industri kecil dan menengah dalam 1 tahun} \times \text{harga satuan barang dalam rupiah}$$

Nilai produksi Industri kecil dan menengah diperoleh dari akumulasi jumlah produksi per unit usaha dalam 1 tahun dikali harga satuan barang dalam rupiah. Nilai produksi ini kemudian diakumulasi per kabupaten/kota di Sumatera Barat. Nilai produksi industri kecil dan menengah di Sumatera Barat Tahun 2025 Rp 30,31 triliun. Nilai produksi industri kecil dan menengah pada tahun 2025 senilai Rp 30.307.027.341,- lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai bahan baku industri kecil dan menengah tahun 2025 yakni senilai Rp6.234.751.093,- artinya pelaku usaha mengalami untung dalam melakukan produksi karena nilai produksi lebih tinggi dari nilai bahan baku. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.9 Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah di Sumatera Barat Tahun 2025**

NO.	KABUPATEN / KOTA	UNIT USAHA (UU)	NILAI PRODUKSI (RP.000)	NILAI BAHAN BAKU/ BAHAN PENOLONG (RP. 000)
	<b>Kabupaten</b>			
1	Pesisir Selatan	5.303	1.803.552.937	259.709.611
2	Solok	4.018	1.042.404.002	269.206.340
3	Sijunjung	1.236	1.235.413.854	183.050.778
4	Tanah Datar	5.956	10.794.088.027	1.676.170.785
5	Padang Pariaman	3.035	1.518.136.160	657.3349.144
6	Agam	4.997	472.316.031	61.652.852
7	50 Kota	6.113	1.316.944.484	180.570.067
8	Pasaman	1.678	1.023.847.643	87.619.147
9	Kep. Mentawai	766	193.473.388	21.284.280
10	Pasaman Barat	1.760	1.156.289.453	205.272.408
11	Solok Selatan	1.529	607.334.864	55.930.584
12	Dharmasraya	1.170	756.335.628	95.526.658

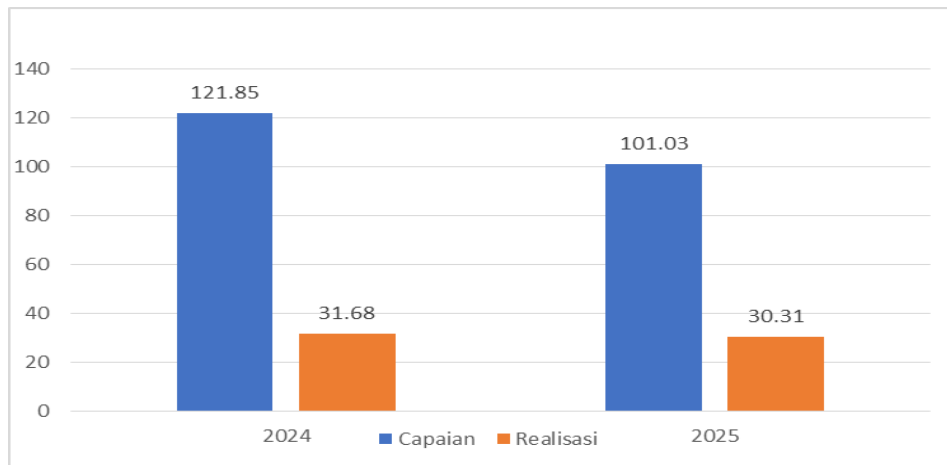


	Kota			
13	Padang	9.176	4.368.662.783	1.323.505.617
14	Solok	1.047	43.552.635	3.622.323
15	Sawahlunto	1.801	282.742.715	386.589.493
16	Padang Panjang	818	317.917.941	1.042.404.002
17	Bukittinggi	3.696	1.445.743.932	314.845.626
18	Payakumbuh	2.500	1.100.479.872	179.210.363
19	Pariaman	1.827	827.790.994	218.685.049
<b>JUMLAH</b>		<b>58.426</b>	<b>30.307.027.341</b>	<b>6.234.751.093</b>

Sumber : Hasil Olahan Data Disperindag, BPS Sumbar Dalam Angka, 2025

### Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Jika dilihat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2024 terjadi penurunan nilai produksi industri kecil dan menengah dari Rp 31,68 triliun rupiah menjadi Rp 30,31 triliun rupiah di Tahun 2025. Perbandingan target dan realisasi untuk indikator nilai produksi industri kecil dan menengah Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2024 dan 2025**

Pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan nilai produksi disebabkan diantaranya lemahnya permintaan domestik terutama terlihat pada momen lebaran dan periode tertentu di 2025, bencana alam banjir yang mengganggu produksi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak infrastruktur dan mengganggu rantai pasok produksi industri.

Perbandingan realisasi kinerja, capain kinerja tahun ini dan tiga tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

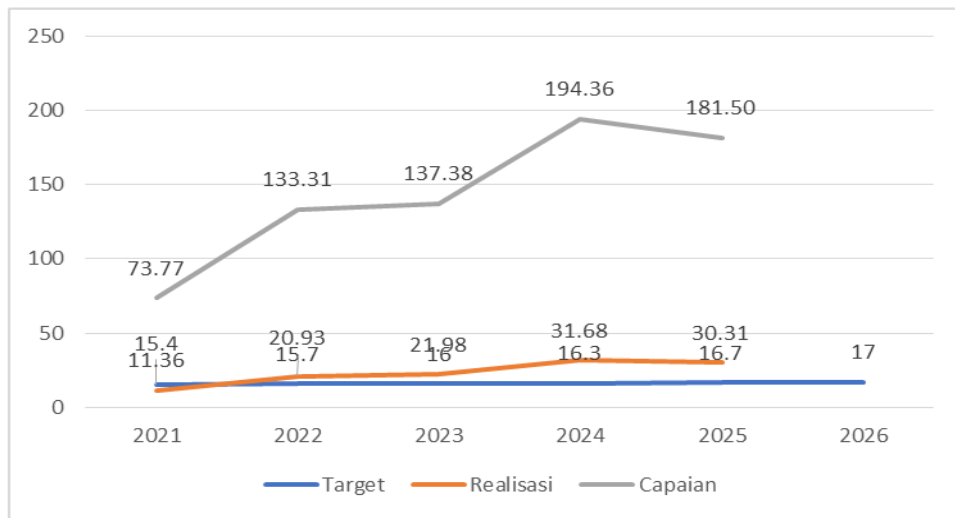


**Tabel 3.10 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun Ini, Tahun Lalu, dan Beberapa Tahun Terakhir**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah	2.1. Nilai produksi industri kecil dan menengah (Rp triliun)	15.40	11.36	73.77	15.70	20.93	133.31	16.00	21.98	137.38	26.00	31.68	121.85	30.00	30.31	101.03
Capaian Sasaran Strategis 2			73.77 (sedang)			133.31 (sangat baik)			137.38 (sangat baik)			121.85 (sangat baik)			101.03 (sangat baik)		

Jika dilihat dari tabel diatas, target kinerja pada sasaran strategis 2 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 2% tiap tahunnya, angka peramalan (forecasting) ini diperoleh dari data kondisi eksisting lima tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, dilakukan penyesuaian target pada PK dengan melihat capaian tahun sebelumnya. Capaian target kinerja pada sasaran strategis 2 dari tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan dari 73,77% menjadi 101,03% pada tahun 2025.

Perbandingan target kinerja pada sasaran strategis 2 selama tahun renstra 2021-2026 dengan realisasi dan capaian 2021 sampai 2025, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



**Gambar 3.5 Target, Realisasi dan Capaian Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2021 s.d 2026 serta Target Jangka Menengah**

### **Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja Nilai Produksi Industri kecil dan Menengah Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah**

Capaian realisasi kinerja sasaran strategis 2 Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah pada tahun 2025 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

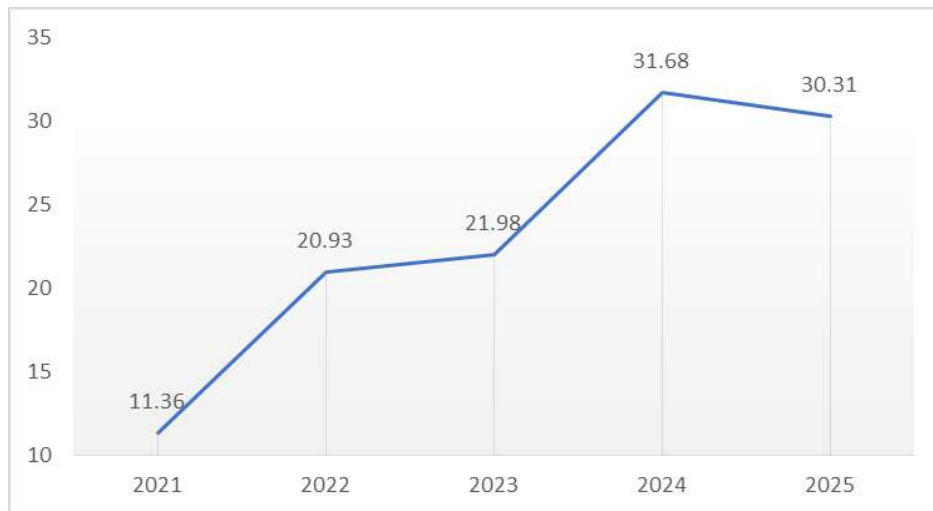
**Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian terhadap Renstra 2024
1	Nilai produksi industri kecil dan menengah	Rp 30,31 triliun	Rp 17 triliun	178,29%

Dari tabel terlihat bahwa nilai produksi industri kecil dan menengah di Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 30,31 triliun. Berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026, indikator kinerja nilai produksi industri kecil dan menengah ditargetkan mencapai Rp 17 triliun pada tahun 2026 dengan capaian renstra pada tahun 2025 sebesar 178,29%. Untuk kondisi saat ini sudah dapat mencapai target renstra 2026 yang telah ditetapkan.

### **Perkembangan Realisasi Indikator Sasaran Strategis 2 Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir**

Perkembangan nilai produksi industri kecil dan menengah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 3.6 Perkembangan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah Tahun 2021-2025**

Berdasarkan grafik perkembangan nilai produksi industri kecil menengah terlihat mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan nilai produksi disebabkan diantaranya lemahnya permintaan domestik terutama terlihat pada momen lebaran dan periode tertentu di 2025, bencana alam banjir yang mengganggu produksi yang menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak infrastruktur dan mengganggu rantai pasok produksi industri.

### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Untuk indikator kinerja pada Sasaran 2 yaitu nilai produksi industri kecil dan menengah, tidak ada Standar Nasional sebagai Pembanding. Pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2025-2029, yang menjadi indikator kinerja utamanya adalah pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas dan kontribusi PDB industri pengolahan non migas.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan Terhadap Sasaran Strategis Dua

Analisis penyebab nilai produksi industri kecil dan menengah pada tahun 2025 disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Perekonomian di Sumatera Barat yang sudah mulai membaik dan kembali dibukanya pelaksanaan even-even nasional ataupun pameran dan objek wisata di Sumatera Barat sehingga terjadi penambahan permintaan barang dari tahun sebelumnya;
2. Pemberian bantuan mesin peralatan produksi kepada sentra atau kelompok usaha industri kecil dan menengah sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi;
3. Terbukanya peluang usaha baru dengan melakukan hilirisasi dan diversifikasi produk industri kecil dan menengah di kabupaten/kota;
4. Kemudahan sistem perizinan berusaha dengan OSS (*One Single Submission*) sehingga banyak pelaku usaha industri kecil dan menengah yang selama ini belum tercatat menjadi bertambah dengan kemudahan pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Untuk meningkatkan nilai produksi industri kecil dan menengah di Sumatera Barat perlu diketahui faktor pendorong dan faktor penghambat serta strategi pemecahan masalah, sehingga bisa disusun program dan kegiatan yang dapat mengatasinya.

Dalam upaya pencapaian sasaran ***Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah di Sumatera Barat***, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi atau upaya pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut:



1. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Barat Tahun 2018-2038 sebagai pedoman dalam mengembangkan sektor industri di Provinsi Sumatera Barat;
2. Tersedianya tenaga Fungsional Penyuluh Perindag yang siap untuk membantu meningkatkan kompetensi pelaku usaha industri dalam mengembangkan usahanya kemudian penyederhanaan birokrasi dimana pejabat administrator dialihfungsikan menjadi fungsional perindustrian sehingga akan membantu fungsional penyuluh Perindag yang ada;
3. Melakukan sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada pelaku industri kecil dan menengah dan memberikan bantuan mesin peralatan produksi sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan nilai produksi;

4. Melakukan hilirisasi dan diversifikasi produk industri di kabupaten/kota terutama terhadap industri kecil menengah;
5. Dukungan pemerintah mewujudkan millineal entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif;
6. Meningkatkan pemahaman IKM akan pentingnya legalitas usaha termasuk sertifikasi produk melalui bimbingan teknis serta memfasilitasi sertifikasi secara gratis sehingga dapat memperluas akses pasar;
7. Pemerintah Daerah mendukung kebijakan pemulihan ekonomi untuk menggunakan produk lokal dan bangga buatan produk Indonesia;
8. Dicanangkannya Sumatera Barat sebagai destinasi wisata memberi peluang kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah.



### **Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

**Tabel 3.12 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Masih terbatasnya kemampuan sebagian SDM pelaku IKM dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Melakukan peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM terhadap penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
2.	Belum semua IKM yang paham akan pentingnya legalitas usaha termasuk sertifikasi produk yang dimiliki, karena jika ingin memperluas akses pasar maka diperlukan legalitas dan sertifikasi yang lengkap	Meningkatkan pemahaman IKM akan pentingnya legalitas usaha termasuk sertifikasi produk melalui bimbingan teknis serta memfasilitasi sertifikasi secara gratis sehingga dapat memperluas akses pasar
3.	Belum semua sentra/kelompok usaha industri kecil menengah memiliki legalitas usaha dan memiliki mesin produksi yang lengkap	Memfasilitasi sentra/kelompok usaha untuk pengurusan legalitas usaha dan pemberian bantuan mesin/peralatan produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi



### **Upaya-upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2025**

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dua yakni meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah di Sumatera Barat, upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah di Sumatera Barat adalah

1. Peningkatan kualitas produk IKM  
Peningkatan kualitas produk dilakukan melalui pelatihan teknis peningkatan mutu produk dan Pelatihan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) bagi produk



- pangan. Pada Tahun 2025 dilaksanakan pelatihan dan Bimtek untuk meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah, yakni :
- a. Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengolahan Pangan Berdasarkan CPPOB dengan jumlah peserta 50 orang
  - b. Pelatihan Teknis Peningkatan Kualitas IKM Menjahit dengan jumlah peserta keseluruhan 80 orang
  - c. Pelatihan Peningkatan Kualitas IKM Sulam dan Bordir, jumlah peserta 20 orang
  - d. Pelatihan Peningkatan Kualitas IKM Bordir, jumlah peserta 20 orang
  - e. Sosialisasi CPPOB produk pangan dan bantuan peralatan, jumlah peserta 16 orang
2. Melakukan Pelatihan Diversifikasi Produk kepada pelaku IKM  
Pelatihan Diversifikasi Produk merupakan pelatihan penganekaragaman produk dari bahan baku yang sama yang dilaksanakan kepada pelaku IKM yang pada mulanya hanya memproduksi satu jenis produk sehingga dengan diadakannya pelatihan ini pelaku IKM bisa menghasilkan beberapa produk dengan bahan baku yang sama. Selama Tahun 2024 telah dilaksanakan pelatihan Diversifikasi produk kepada IKM, dalam bentuk pelatihan :
- a. Pelatihan Diversifikasi Produk dari Kulit untuk alas kaki dengan jumlah peserta 15 orang
  - b. Pelatihan Diversifikasi Produk dari Kulit untuk tas dengan jumlah peserta 50 orang
  - c. Pelatihan Diversifikasi Produk dari Resin dengan jumlah peserta 15 orang
  - d. Pelatihan Diversifikasi Produk dari Sabut Kelapa dengan jumlah peserta 20 orang
  - e. Pelatihan Pengembangan Produk Kerajinan Olahan Kayu dengan jumlah peserta 25 orang
3. Memberikan bantuan mesin peralatan kepada sentra-sentra industri atau kelompok usaha pelaku industri kecil dan menengah dengan terlebih dahulu dilakukan pelatihan dan bimtek. Selama tahun 2025, telah diberikan bantuan mesin peralatan terhadap sentra-sentra yang sudah dilatih yakni sebanyak 28 sentra yang terdiri dari sentra makanan dan minuman, sentra tenun, sentra jahit, sentra bordir, dan sentra logam mesin.
4. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui SIINas yang diikuti oleh 19 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Pelaksanaan Bimtek Izin Usaha Industri (IUI) yang diikuti oleh aparat dan pelaku industri dengan peserta 40 orang.



### **Upaya-upaya yang dilakukan untuk masa mendatang**

1. Melanjutkan peningkatan kualitas produk industri melalui peningkatan kompetensi SDM IKM dan aparatur industri, peningkatan penerapan standarisasi produk industri oleh IKM serta peningkatan fasilitasi standarisasi dan legalitas produk IKM.
2. Tetap melakukan peningkatan kuantitas produk industri. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna dan peningkatan diversifikasi produk industri.



3. Memberikan bantuan mesin peralatan kepada sentra-sentra industri atau kelompok usaha pelaku industri kecil dan menengah dengan terlebih dahulu dilakukan pelatihan dan bimtek.
4. Melakukan Sosialisasi Prototipe Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada pelaku IKM Sosialisasi Prototipe Teknologi Tepat Guna (TTG) dilaksanakan kepada pelaku IKM Pangan.
5. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui SIINas yang diikuti oleh 19 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Pelaksanaan Bimtek Izin Usaha Industri (IUI) yang diikuti oleh aparat dan pelaku industri.
7. Melakukan kolaborasi dengan pendekatan pentahelix yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pencapaian indikator kinerja dan program daerah

### **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan terhadap analisis efisiensi penggunaan anggaran, efisiensi penggunaan SDM, dan sarana prasarana.

Untuk mendukung pencapaian ***sasaran strategis meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah*** didukung oleh 3 (tiga) Program yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (3 kegiatan yakni 2 di bidang, 1 di UPTD Logam, dan 1 di UPTD PPM Atsiri, 3 sub kegiatan), Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (1 kegiatan, 1 sub kegiatan), dan Program Pengendalian Izin Usaha Industri (1 kegiatan, 1 sub kegiatan). Dimana anggaran pada APBD Perubahan 2025 diluar belanja pegawai sebesar Rp 4.892.822.943,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.570.278.925,- atau 93,41% dengan realisasi fisik kegiatan 100%. Terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 322.544.018,- atau 6,59%. Efisiensi yang dilakukan terkait diantaranya sebagai berikut :

1. Sisa akomodasi, tiket pesawat narsum, honor narsum, belanja bahan praktek, sewa alat, sewa bus, dan makan minum kegiatan;
2. Sisa e-katalog dari pengadaan mesin bantuan peralatan;

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis 1 tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{((PA \times CK) - RA)}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%), maksimal capaian kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran



$$\begin{aligned} \text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} &= \frac{(\text{Rp } 4.892.822.943 \times 101,03\%) - \text{Rp } 4.570.278.925}{\text{Rp } 4.892.822.943} \times 100\% \\ &= 0,08\% \end{aligned}$$

Tingkat efisiensi sebesar 0,08% artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah optimal untuk mencapai sasaran.

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{Nilai efisiensi} &= 50\% + \left( \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right) \\ &= 50\% + \left( \frac{0,08}{20} \times 50 \right) = 69,06\% \end{aligned}$$

Nilai efisiensi sebesar 69,06% jika lebih besar dari 20% artinya nilai efisiensi adalah 100%.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran 2 Meningkatkan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Jumlah SDM yang berkompeten dalam meningkatkan nilai produksi industri kecil dan menengah	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup (memadai). Dimana tenaga fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan belum bisa aktif melakukan pembinaan kepada pelaku IKM maupun pelayanan pada Klinik Konsultasi IKM serta pelayanan pada pengujian mutu minyak atsiri disebabkan juga merangkap melakukan pelaksanaan kegiatan di bidang. Berdasarkan analisa kebutuhan anjab dibutuhkan 64 orang untuk urusan industri, saat ini yang masih dipenuhi baru sekitar 37 orang.	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai



No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
2	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis, dengan efisiensi sebesar 69,06%, nilai efisiensi 100%	Anggaran belum dapat mengakomodir kegiatan secara maksimal untuk kegiatan pelatihan wirausaha baru, pelatihan teknis/bimtek pada 12 industri unggulan daerah yang terdapat dalam RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat)	Optimalisasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja dan program daerah melalui kolaborasi pentahelix yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media
3	Sarana dan prasarana yang lengkap sehingga dapat mendukung capaian kinerja sasaran strategis 2	Jumlah sarana dan prasarana dalam mendukung capaian kinerja saat ini belum cukup (memadai). Saat ini dilakukan pengoptimalan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana, baik itu sarana dan prasarana pada UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri maupun pada UPTD Logam pada saat kebutuhan pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk sarana dan prasarana kendaraan dinas dalam melakukan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan ke kab/kota	Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk melakukan pengadaan mesin peralatan pada UPTD secara bertahap.

### Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program-program yang dilaksanakan tersebut sudah menunjang pencapaian sasaran strategis *meningkatkan nilai produksi industri kecil dan menengah*, begitupun dengan kegiatan pada masing-masing program. Lebih lengkapnya program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 2 *meningkatkan nilai produksi industri kecil dan menengah* dan capaian masing-masing program kegiatan pendukung sasaran strategis 2 terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.13  
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2025 Pendukung Sasaran Strategis Dua**

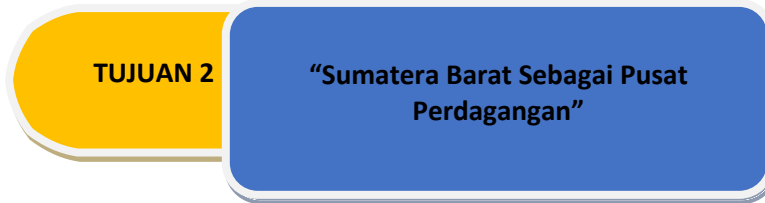
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Ket	
2.	Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah	2.1 Nilai produksi industri kecil dan menengah (Rp triliun)	TW 1	-	-	-	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>					4,892,822,943.00	4,570,278,925.00		
			TW 2	20.87	30	143.75%						4,721,228,943.00	4,406,928,725.00		
			TW 3	25.44	30	117.92%		1. <b>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan</b>	<b>29 Sentra</b>	<b>28 Sentra</b>	<b>4,721,228,943</b>	<b>4,406,928,725</b>		
			TW 4	30	30.31	101.03%		1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	28 dokumen	31 dokumen	3,986,404,610	3,723,212,785	Ind. Agro & Non Agro	
								2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	3 dokumen	3 dokumen	624,726,392	576,823,166	UPTD Logam	
								3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	110,097,941	106,892,774	UPTD PPMA	
								<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>					<b>16,714,000</b>	<b>10,345,000</b>	
								2. <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah aparat dan pelaku industri yang mendapatkan Bimtek IUI dan pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>16,714,000</b>	<b>10,345,000</b>	Ind. Non Agro	
								1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	16,714,000	10,345,000		



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	Ket
							Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					154,880,000	153,005,200	
								3. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah pelaku industri	47,673	58,426	154,880,000	153,005,200	
								1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui SIINas	1 dokumen	1 dokumen	154,880,000	153,005,200	Ind. Non Agro

## Analisis Capaian Tujuan 2 Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan



Tujuan kedua Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat guna mendukung tercapainya misi empat RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah *Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan*.

### Penjelasan Terkait Tujuan yang Akan Diukur serta Indikator yang Digunakan

Sektor perdagangan memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian daerah. Aktivitas di sektor ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dan saling memperkuat dengan sektor-sektor lain, seperti sektor produksi yang mencakup pertanian, industri, dan pertambangan, serta sektor keuangan, transportasi, dan telekomunikasi. Di Provinsi Sumatera Barat, sektor perdagangan termasuk sektor andalan karena kontribusinya yang signifikan dan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan "Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan" sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai. Untuk mengukur tujuan tersebut digunakan indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan. Laju pertumbuhan sektor perdagangan merupakan kenaikan perekonomian daerah yang dihasilkan dari nilai perdagangan dalam jangka waktu tertentu. Kegunaannya adalah untuk mengukur kinerja sektor perdagangan.

### Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 1,01%. Penetapan target ini didasarkan pada angka kondisi tahun 2020 yang kemudian diproyeksi untuk lima tahun kedepan.

### Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian tujuan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan pada tujuan 2, diukur dengan indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan. Lebih jelasnya target, realisasi, dan capaian pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.



### Target, Realisasi, dan Capaian Pengukuran Kinerja Tujuan 2 (dalam %)

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan	1.1. Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	1,01	3,19	315,84%	Sangat Tinggi

Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

### Pengukuran Realisasi Kinerja

Realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 3,19% di tahun 2025 diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.12/02/13/Th.XXIX tanggal 05 Februari 2026 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV-2025 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan} = \frac{\text{Rp. 34,64 triliun} - \text{Rp. 33,57 triliun}}{\text{Rp. 33,57 triliun}} \times 100\% = 3,19\%$$

Keterangan:

Nilai PDRB sub sektor perdagangan tahun 2025 (ADHK) sebesar Rp. 34,64 triliun  
Nilai PDRB sub sektor perdagangan tahun 2024 (ADHK) sebesar Rp. 33,57 triliun

### Pengukuran Capaian Kinerja

Pada indikator tujuan 2 : **Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan**, tingkat capaian kinerja indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2025 adalah

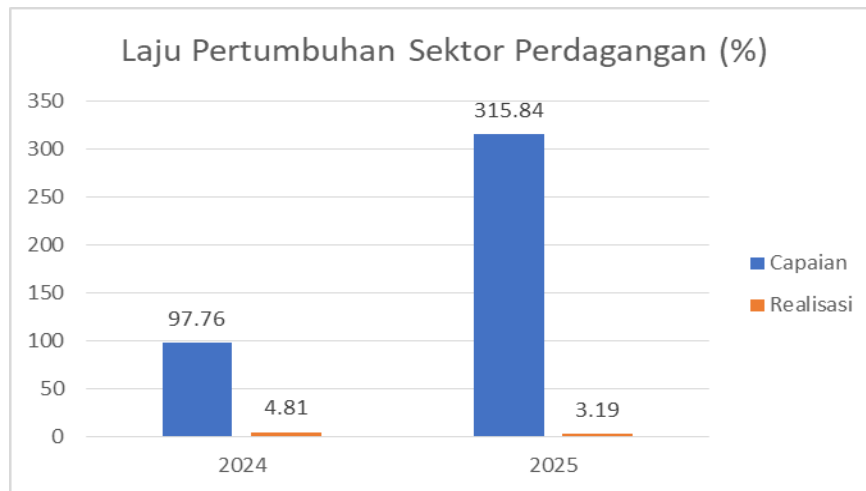
$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{3,19}{1,01} \times 100\% \\ &= 315,84\% \end{aligned}$$



Realisasi laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2025 sebanyak 3,19% dari target pada tahun 2025 pada RPJMD di tahun 2025 adalah 1,01%, sehingga diperoleh capaian 315,84%.

### **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu**

Jika dilihat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2024 terjadi penurunan kenaikan laju pertumbuhan sektor perdagangan dari 4,81% melambat menjadi 3,19% di Tahun 2025. Perbandingan target dan realisasi untuk indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Perlambatan laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2025 disebabkan :

1. Penurunan daya beli dan konsumsi domestik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, salah satunya disebabkan keberpihakan masyarakat dalam penggunaan produk domestic masih kurang.
2. Gangguan logistic akibat bencana alam banjir dan longsor menghambat distribusi barang dan menekan kinerja perdagangan antar daerah.
3. Terjadinya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah, beras, dan cabe merah



## Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi kinerja tujuan 2 pada tahun 2025 berdasarkan target RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

### Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian terhadap Renstra 2025
1	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	3,19%	1,02%	312,75 %

Dari tabel terlihat bahwa laju pertumbuhan sektor perdagangan di Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah 3,19%. Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan di Sumatera Barat ditargetkan mencapai 1,02% pada tahun 2026 dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 312,75%, sudah melebihi dari target.

### Perkembangan Indikator Tujuan 2 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir

Laju pertumbuhan sektor perdagangan dari tahun 2021-2025 menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuatif. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 5,6 dan terendah sebesar 3,19 terjadi di tahun 2025. Perkembangan laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2021-2025 ditampilkan pada gambar berikut :





## Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Untuk indikator kinerja tujuan 2, Target Nasional pada RPJMN 2025-2029, untuk indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan ditargetkan tumbuh rata-rata 5,7% - 6% per tahun. Laju pertumbuhan sektor perdagangan di Sumatera Barat pada tahun 2025 sebesar 3,19% terjadi perlambatan pertumbuhan dari target nasional 5,7% per tahun. Sedangkan realisasi laju pertumbuhan sektor perdagangan nasional sebesar 5,49% pada Tahun 2025 lebih tinggi sedikit pertumbuhannya dari laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat 4,86% Tahun 2025. Perlambatan ini disebabkan struktur ekonomi yang belum stabil pasca bencana tahun 2024 dan 2025 dan minimnya investasi, serta sektor perdagangan masih sangat bergantung pada komoditas pertanian dan perkebunan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta faktor lain yang mendorong tercapainya indikator tujuan 2 ini adalah

1. Adanya sinergitas program dan kegiatan kab/kota dengan provinsi dalam melakukan pemeliharaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar melalui pembinaan pengelolaan pasar di Sumatera Barat.
2. Adanya upaya pemerintah dalam menstabilkan harga terutama kebutuhan pokok baik melalui pasar murah/operasi pasar serta melakukan pemantauan harga bahan pokok di kab/kota.
3. Melaksanakan dan mengikuti promosi dan bazar dengan mengikut sertakan produk IKM lokal.
4. Adanya komitmen pemerintah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan konsumen dari kecurangan perdagangan sehingga konsumen Sumatera Barat merasa nyaman dalam aktivitas berbelanja.
5. Melakukan Bimtek Marketing Digital kepada pelaku usaha sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan produk IKM melalui pemasaran online yang sudah eksist.

Disamping itu, terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian indikator tujuan 2, diantaranya

1. Terjadinya kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok seperti cabai merah, bawang merah, dan beras.
2. Keberpihakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang.
3. Belum optimalnya fasilitas bagi pedagang dan pelaku ekonomi kreatif dalam penguatan pariwisata Sumatera Barat.
4. Struktur ekonomi yang belum stabil pasca bencana tahun 2024 dan 2025 dan minimnya investasi, serta sektor perdagangan masih sangat bergantung pada komoditas pertanian dan perkebunan.

Untuk lebih jelasnya potret kinerja tujuan *Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan* dapat dilihat pada 1 (satu) sasaran strategis yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dimaksud. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



### Sasaran Strategis 3

#### Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing

#### Penjelasan Terkait Sasaran yang Akan Diukur serta Indikator yang Digunakan

Sasaran strategis 3 yakni *Meningkatkan usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing*, untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kinerja Nilai sektor perdagangan dalam PDRB dengan satuan Rp triliun. Menurut BPS indikator ini relevan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing karena nilai sektor perdagangan dalam PDRB diperoleh dari penghitungan total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan sektor perdagangan dalam suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh BPS. Semakin tinggi nilai sektor perdagangan dalam PDRB dalam suatu wilayah artinya semakin banyak produksi barang dan jasa di sektor perdagangan yang menunjukkan semakin kondusif dan berdaya saing sektor perdagangan tersebut.

#### Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Penetapan target Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp triliun) pada tahun 2025 sebesar Rp 53,43 triliun dari angka peramalan (forecasting) dari data kondisi eksisting lima tahun sebelumnya pada saat pembuatan target indikator kinerja pada renstra 2021-2026.

#### Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian sasaran Meningkatkan usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing pada sasaran strategis 3, diukur dengan indikator kinerja nilai sektor perdagangan dalam PDRB. Lebih jelasnya target, realisasi, dan capaian pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.14 Target, Realisasi, dan Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga (dalam %)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	1.1. Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp triliun)	53,43	58,63	109,73%	Sangat Tinggi

Sumber : BPS Sumatera Barat 2025



Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada sasaran strategis 3 dimana target pada tahun 2025 sebesar Rp 53,43 triliun dengan realisasi pada tahun 2025 sesuai data BPS sebesar Rp 58,63 triliun, dengan angka capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 109,73% dengan kategori predikat sangat tinggi.

### Pengukuran Realisasi Kinerja

Nilai sektor perdagangan dalam PDRB merupakan komponen lapangan usaha perdagangan yang dihitung dalam komponen PDRB yang dilakukan oleh BPS Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Pada tahun 2025 berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) No. 12/02/13/ThXXIX, 5 Februari 2026 nilai sektor perdagangan dalam PDRB sebesar Rp 58,63 triliun.

Hasil indikator kinerja nilai sektor perdagangan terhadap PDRB diukur melalui penghitungan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Nilai sektor perdagangan dalam PDRB} = \text{Nilai sektor perdagangan pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun N}$$

### Pengukuran Capaian Kinerja

Pada indikator sasaran strategis 3 : **Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing**, tingkat capaian kinerja indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Nilai sektor perdagangan dalam PDRB tahun 2025 adalah

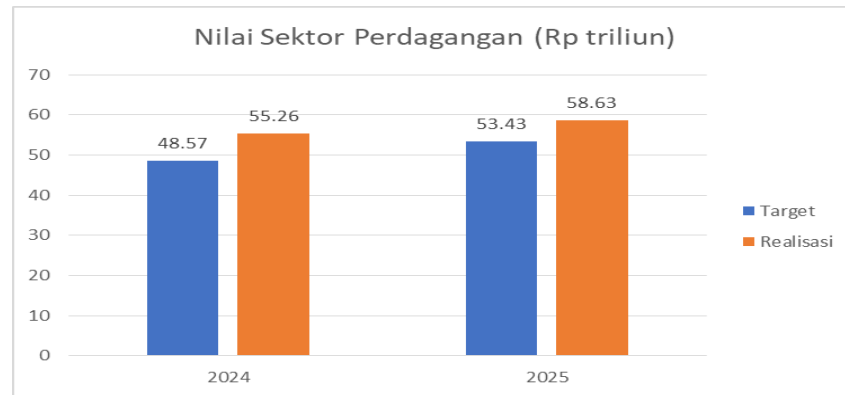
$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{58,63}{53,43} \times 100\% \\ &= 109,73 \% \end{aligned}$$

Realisasi Nilai sektor perdagangan dalam PDRB tahun 2025 sebanyak Rp 58,63 triliun dari target pada tahun 2025 pada renstra pada tahun 2025 adalah Rp 53,43 triliun, sehingga diperoleh capaian 109,73 %.

### Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Nilai Sektor Perdagangan Dalam PDRB serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Jika dilihat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2024 terjadi kenaikan nilai sektor perdagangan dalam PDRB dari Rp 55,26 triliun rupiah naik menjadi Rp 58,63 triliun rupiah di

Tahun 2025. Perbandingan target dan realisasi untuk indikator nilai sektor perdagangan dalam PDRB Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 3.7 Perbandingan Capaian dan Realisasi Nilai Sektor Perdagangan dalam PDRB Tahun 2024 dan 2025**

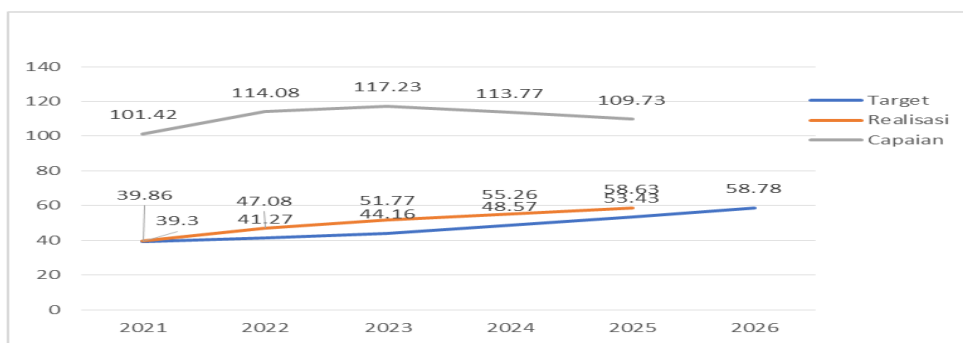
**Tabel 3.15 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun Ini, Tahun Lalu, dan Beberapa Tahun Terakhir**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	3.1. Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp triliun)	39.30	39.86	101.42	41.27	47.08	114.08	44.16	51.77	117.23	48.57	55.26	113.77	53.43	58.63	109.73
Capaian Sasaran Strategis 3			101.42 (sangat baik)			114.08 (sangat baik)			117.23 (sangat baik)			113.77 (sangat baik)			109.73 (sangat baik)		

Jika dilihat dari tabel diatas, target kinerja pada sasaran strategis 3 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 5% tiap tahunnya, angka peramalan (forecasting) ini diperoleh dari data kondisi eksisting lima tahun sebelumnya. Capaian target kinerja pada sasaran strategis 3 dari tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan dari 101,42% menjadi 109,73% pada tahun 2025.

Perbandingan target kinerja pada sasaran strategis 3 selama tahun renstra 2021-2026 dengan realisasi dan capaian 2021 sampai 2025, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Gambar 3.8 Target, Realisasi dan Capaian Nilai Sektor Perdagangan Tahun 2021 s.d 2026 serta Target Jangka Menengah**



### Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja Nilai Sektor Perdagangan Dalam PDRB Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi kinerja sasaran strategis 3 Meningkatnya nilai sektor perdagangan dalam PDRB pada tahun 2025 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian terhadap Renstra 2025
1	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB	Rp 58,63 triliun	Rp 58,78 triliun	99,74 %

Dari tabel terlihat bahwa nilai sektor perdagangan dalam PDRB di Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 58,63 triliun. Berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026, indikator kinerja nilai sektor perdagangan dalam PDRB di Sumatera Barat ditargetkan mencapai Rp58,78 triliun pada tahun 2026 dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 99,74%. Butuh kenaikan Rp0,15 triliun untuk dapat mencapai target renstra 2026 yang telah ditetapkan.

### Perkembangan Realisasi Indikator Sasaran Strategis 3 Nilai Sektor Perdagangan Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir

Perkembangan nilai sektor perdagangan dalam PDRB selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 3.9 Perkembangan Realisasi Nilai Sektor Perdagangan dalam PDRB Tahun 2021-2025**

Pada grafik terlihat perkembangan nilai sektor perdagangan dalam PDRB dari tahun 2021-2025 memperlihatkan trend menaik, walaupun sempat terjadi fluktuasi pada tahun 2021 yang disebabkan pasca pandemic covid 19.

### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Untuk indikator kinerja pada Sasaran 3 Target Nasional pada RPJMN 2025-2029 pada Renstra Kemendag 2025-2029, untuk indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan ditargetkan tumbuh rata-rata 5,7% - 6% per tahun. Laju pertumbuhan sektor perdagangan di Sumatera Barat pada tahun 2025 sebesar 3,71% terjadi perlambatan pertumbuhan dari target nasional 5,7% per tahun. Sedangkan realisasi laju pertumbuhan sektor perdagangan nasional sebesar 5,49% pada Tahun 2025 lebih tinggi sedikit pertumbuhannya dari laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat 4,86% Tahun 2025. Perlambatan ini disebabkan struktur ekonomi yang belum stabil pasca bencana tahun 2024 dan 2025 dan minimnya investasi, serta sektor perdagangan masih sangat bergantung pada komoditas pertanian dan perkebunan.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan Terhadap Sasaran Strategis Tiga

Dalam upaya pencapaian sasaran *Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing* terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi atau upaya pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut:



#### Faktor Pendorong

1. Permintaan domestik meningkat dimana konsumsi rumah tangga tumbuh positif sehingga meningkatkan volume perdagangan eceran dan konsumsi barang di masyarakat.
2. Adanya upaya pemerintah dalam menstabilkan harga terutama kebutuhan pokok baik melalui bazar yang bekerjasama dengan industri/distributor, TTIC (Toko Tani Indonesia Center), dan Bulog serta melakukan pemantauan harga bahan pokok di kab/kota.
3. Melaksanakan dan mengikuti promosi pada even-even nasional dan bazar dengan mengikut sertakan produk IKM lokal.
4. Adanya komitmen pemerintah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan konsumen yang dirugikan dari kecurangan perdagangan melalui sosialisasi kepada konsumen dan menyediakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat sehingga konsumen merasa nyaman dalam aktivitas berbelanja.
5. Melakukan Bimtek Marketing Digital kepada pelaku usaha sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan produk IKM melalui pemasaran online yang sudah eksist.
6. Pertumbuhan transaksi pembayaran digital melalui QRIS semakin meningkat di Sumatera Barat mempermudah transaksi dagang sehingga meningkatkan volume sektor perdagangan.
7. Peningkatan ekspor komoditas unggulan di Sumatera Barat terutama pada triwulan III tahun 2025 naik 38% terutama untuk komoditas pertanian dan perikanan, yang mendorong peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri.



### Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

**Tabel 3.17 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Terjadinya kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang merah.	Melakukan pemantauan harga bahan pokok di kab/kota dan melakukan operasi pasar/bazar
2.	Keberpihakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang	Melaksanakan dan mengikuti pameran dan bazar yang mengikut sertakan produk-produk lokal, maupun dengan mengadakan bimtek marketing digital sehingga produk-produk pelaku usaha sudah dipasarkan melalui e-commerce



### Upaya-upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2025

1. Menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar, melalui pemantauan pasokan dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting dengan stakeholder terkait. Hal ini dilakukan dengan cara Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab/Kota selain 17 komoditas harga bahan pokok (beras, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, tepung terigu, kedelai, cabe, bawang, ikan, garam, mie instan, kacang, dan ketela pohon). Kemudian dilakukan operasi pasar (pasar murah) dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang juga bekerja sama dengan TTIC (Toko Tani Indonesia Center), Bank Indonesia, Bulog, dan industri/distributor minyak goreng.  
Capaian ini diperoleh dengan kegiatan antara lain :
  - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab/Kota dengan cara merekap data terkait harga yang dikirimkan kab/kota dan merekap harga bahan pokok tersebut setiap minggunya sehingga tampak kenaikan dan lonjakan harga yang cukup signifikan setiap kab/kota di Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Melakukan kegiatan operasi pasar bersamaan dengan pelaksanaan Bazar Ramadhan pada saat menjelang lebaran dengan bekerja sama dengan TTIC (Toko Tani Indonesia Center), Bank Indonesia, Bulog, dan industri/distributor minyak goreng.
2. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan dalam negeri melalui peningkatan pembinaan dan perkuatan akses pasar dalam negeri dengan melakukan pembinaan dan promosi produk Sumatera Barat baik melalui bazar maupun pameran dan even-even nasional.  
Pada tahun 2025 terdapat 4 pameran dan bazar dengan jumlah pelaku IKM yang berpartisipasi 360 orang pelaku industri kecil dan menengah dengan jumlah omset selama pameran Rp1.338.182.000,-. Rekapitan pameran yang diikuti beserta jumlah peserta pelaku usaha yang berpartisipasi dan omset penjualannya terlihat sebagai berikut.



No	Pameran	Pelaksanaan	Transaksi 2025 (Rp)	Jumlah Peserta (Org)
1	INACRAFT I Jakarta	5 - 9 Februari 2025	795.390.000	8
2	Bazar Ramadhan	24 - 27 Maret 2025	196.400.000	179
3	Pameran HUT Dekranas	9 - 11 Juli 2025	145.500.000	2
4	Sumbar Expo	27 - 28 Oktober 2025	200.892.000	171
Jumlah			1.338.182.000	360

Disamping pemasaran secara offline, pelaku usaha juga dikenalkan dengan pemasaran secara online melalui e-commerce lewat Bimtek Marketing Digital. Ini juga sejalan dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam rangka Pemanfaatan teknologi informasi dan marketing digital dimana Dinas Perindag sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mendukung progul tersebut telah melaksanakan Bimtek Marketing Digital dengan jumlah peserta sebanyak 349 orang.

- Meningkatkan standar dan mutu komoditi potensial, melalui pengujian mutu, peningkatan pengawasan mutu komoditi potensial ekspor, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengujian komoditi ekspor dan peningkatan kompetensi SDM Labor penguji. Melalui kegiatan : pengujian mutu produk, pemantauan mutu produk komoditi potensial, pengembangan layanan kalibrasi, reakreditasi laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi.  
Pengujian mutu produk dilakukan pada komoditi Cassia, Biji Kopi, Minyak Pala, Minyak Sereh Wangi, Biji Kakao, Biji Pinang, Biji Jagung, Gambir, *Rubber* (Karet), dan Cengkeh (*Clove*) dengan jumlah laporan hasil analisa atau sertifikat pengujian mutu barang yang diterbitkan pada tahun 2025 sebanyak 377 laporan hasil analisa.  
Pemantauan mutu produk potensial dilakukan pada 7 produk potensial yakni biji jagung, biji kopi dan cassia, biji kakao dan biji pinang, gambir dan minyak sereh.  
Pengembangan layanan kalibrasi telah dilakukan kalibrasi alat ukur agar sesuai dengan standar nasional dan internasional, selama tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 1795 sertifikat untuk alat ukur kesehatan dan usaha industri.
- Meningkatkan tertib usaha di bidang perdagangan melalui peningkatan pengawasan barang beredar di pasaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku SNI Wajib, peningkatan ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga serta meningkatkan pemberdayaan terhadap konsumen.  
Pada tahun 2025 telah dilakukan pengawasan label, pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan), dan pengawasan barang wajib SNI. Pengawasan label dilakukan pada 4 produk yakni pakaian bayi, pakaian dalam, selimut, dan handuk pada 14 merek barang beredar di pasaran. Pengawasan barang K3L dilakukan pada 3 produk yakni alas kaki (yang terbuat dari karet dan plastic), penghapus, dan crayon pada 16 merek barang beredar di pasaran. Pengawasan barang wajib SNI dilakukan pada 4 produk yakni puzzle, boneka, mainan beroda, dan baby walker pada 15 merek barang beredar di pasaran yang ada di 19 kabupaten/kota. Dari pengawasan



tersebut didapat 103 berita acara dimana semua produk dan merk dimana lebih dari 97% barang yang diawasi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biasanya terhadap barang beredar yang tidak sesuai dengan ketentuan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat melakukan teguran dan pemberitahuan kepada pelaku usaha yang menjual barang-barang tersebut.

Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi konsumen cerdas yang dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan diikuti oleh 336 orang peserta yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, akademisi dan mahasiswa.



### **Upaya-upaya yang dilakukan untuk masa mendatang**

1. Menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar, melalui pemantauan pasokan dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting dengan stakeholder terkait. Hal ini dilakukan dengan cara Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab/Kota selain 17 komoditas harga bahan pokok (beras, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, tepung terigu, kedelai, cabe, bawang, ikan, garam, mie instan, kacang, dan ketela pohon). Kemudian dilakukan operasi pasar (pasar murah) dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang juga bekerja sama dengan TTIC (Toko Tani Indonesia Center), Bank Indonesia, Bulog, dan industri/distributor minyak goreng. Diharapkan dengan adanya operasi pasar akan meningkatkan daya beli masyarakat dan sektor usaha perdagangan tetap bergairah.
2. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan dalam negeri melalui peningkatan pembinaan dan perkuatan akses pasar dalam negeri dengan melakukan pembinaan dan promosi produk Sumatera Barat baik melalui bazar, pameran nasional dan internasional, dan berpartisipasi pada even-even nasional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sebagai pendukung progul meningkatkan keahlian/keterampilan bagi pelaku usaha industri kecil/umkm dan ekraf dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga diharapkan produk-produk pelaku usaha sudah dipasarkan melalui e-commerce.
3. Meningkatkan tertib usaha di bidang perdagangan melalui peningkatan pengawasan barang beredar di pasaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SNI Wajib dan uji sampel garam), peningkatan pelaku usaha dalam tertib niaga dengan melakukan pengawasan terhadap perizinan minol untuk tingkat distributor dan bahan berbahaya serta pengawasan gas elpiji 3kg. Selain itu juga meningkatkan pemberdayaan terhadap konsumen melalui sosialisasi konsumen cerdas dan pelayanan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
4. Meningkatkan standar dan mutu komoditi potensial, melalui pengujian mutu, peningkatan pengawasan mutu komoditi potensial ekspor, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengujian komoditi ekspor dan peningkatan kompetensi SDM Labor penguji. Melalui kegiatan : pengujian mutu produk, verifikasi mutu produk komoditi potensial, reakreditasi laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi.
5. Melakukan kolaborasi dengan pendekatan pentahelix yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pencapaian indikator kinerja dan program daerah.



### Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan terhadap analisis efisiensi penggunaan anggaran, efisiensi penggunaan SDM, dan sarana prasarana.

Untuk mendukung pencapaian *sasaran strategis meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing* didukung oleh 2 program yaitu 1) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (2 kegiatan, 2 sub kegiatan), 2) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (3 kegiatan, 5 sub kegiatan). Dimana anggaran pada APBD Perubahan 2025 diluar belanja pegawai sebesar Rp Rp. 3.455.112.649,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.114.757.756,- atau 90,15%. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 340.354.893,- (9,85%). Dengan capaian fisik kegiatan 92,96%. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- i. Efisiensi perjalanan dinas (efisiensi biaya tiket pesawat, sisa akomodasi, dan efisiensi biaya perjalanan dinas), biaya BBM, dan rapat-rapat
- ii. Sewa stand dan dekorasi pameran Kriya Nusa yang batal terlaksana disebabkan terjadinya aksi demo.

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis 3 tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{((PA \times CK) - RA)}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} &= \frac{(Rp\ 3.455.112.649 \times 109,73\%) - Rp\ 3.114.757.756}{Rp\ 3.455.112.649} \times 100\% \\ &= 0,20\% \end{aligned}$$

Tingkat efisiensi sebesar 0,20% artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah optimal untuk mencapai sasaran.

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{Nilai efisiensi} &= 50\% + \left( \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right) \\ &= 50\% + \left( \frac{0,20}{20} \times 50 \right) = 98,95\% \end{aligned}$$



Nilai efisiensi sebesar 98,95% jika lebih besar dari 20% artinya nilai efisiensi adalah 100%.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran 3 Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Jumlah SDM yang berkompeten dalam meningkatkan usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup (memadai). Dimana tenaga fungsional Analis Perdagangan, Pengawas perdagangan, dan penguji mutu barang belum bisa aktif melakukan pelayanan disebabkan juga merangkap melakukan pelaksanaan kegiatan di bidang. Berdasarkan analisa kebutuhan anjab dibutuhkan 55 orang untuk urusan perdagangan, saat ini yang masih dipenuhi baru sekitar 38 orang.	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis, dengan efisiensi sebesar 98,95%, nilai efisiensi 100%	Anggaran belum dapat mengakomodir kegiatan secara maksimal untuk operasi pasar, pengawasan barang beredar, pengujian mutu barang, pembinaan pelaku ekspor, fasilitasi promosi, pemasaran digital pelaku usaha	Optimalisasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja dan program daerah melalui kolaborasi pentahelix yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media
3	Sarana dan prasarana yang lengkap sehingga dapat mendukung capaian kinerja sasaran strategis 3	Jumlah sarana dan prasarana dalam mendukung capaian kinerja saat ini belum cukup (memadai). Saat ini dilakukan pengoptimalan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana, baik itu sarana dan prasarana pada UPTD BPSMB terkait peralatan yang sudah mulai kurang efektif (habis umur ekonomisnya). Termasuk sarana dan prasarana kendaraan dinas dalam melakukan pelayanan pengujian ke kab/kota	Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk melakukan pengadaan mesin peralatan pada UPTD secara bertahap.



### **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program-program yang dilaksanakan tersebut sudah menunjang pencapaian sasaran strategis *meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing*, begitupun dengan kegiatan pada masing-masing program. Lebih lengkapnya program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 3 *meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing* dan capaian masing-masing program kegiatan pendukung sasaran strategis 3 terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.18  
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2025 Pendukung Sasaran Strategis Tiga**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	Ket
3.	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	3.1 Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp triliun)	TW 1	-	-	-						3,455,112,649.00	3,114,757,756.00	
			TW 2	13.36	14.13	105.78%	<b>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>					1,638,682,649	1,616,572,240	
			TW 3	26.72	28.61	107.07%		1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	90%	91.38%	1,455,172,000	1,444,732,515	PKTN
			TW 4	53.43	58.63	109.73%		1. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	8 BPSK	8 BPSK	1,455,172,000	1,444,732,515	
								2. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	78%	200%	1,150,000	1,125,000	PKTN
								1. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan perdagangan yang diawasi	2 laporan	2 laporan	1,150,000	1,125,000	
								3. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	26%	89.92%	182,360,649	170,714,725	UPTD BPSMB
								1. Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah sertifikasi kalibrasi yang diterbitkan	1200 sertifikat	1795 sertifikat	39,078,870	34,537,900	
								2. Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan /Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	300 laporan	377 laporan	73,911,181	70,995,475	
								3. Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	7 produk	7 produk	69,370,598	65,181,350	



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	Ket
							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					1,816,430,000	1,498,185,516	
							4.	Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	5%	-%	208,720,000	156,720,000	Perdagangan
							1.	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	11 UMKM	10 UMKM	208,720,000	156,720,000	
							5.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	5%	-%	1,607,710,000	1,341,465,516	Perdagangan
							1.	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	549 UMKM	1587 UMKM	1,607,710,000	1,341,465,516	

■



Untuk mencapai tujuan *Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani* telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yakni meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dan meningkatnya kualitas pelayanan organisasi. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### Sasaran Strategis 4

#### Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

#### Penjelasan Terkait Sasaran yang Akan Diukur serta Indikator yang Digunakan

Sasaran strategis 4 yakni *Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi*, untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD. Nilai akuntabilitas OPD diperoleh dari beberapa unsur mulai dari 4 (empat) komponen yakni komponen Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi internal (25%). Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja OPD maka semakin baik akuntabilitas dari OPD tersebut.

#### Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Penetapan target Nilai akuntabilitas kinerja OPD pada tahun 2025 sebesar 80,25 (A) berasal dari target indikator kinerja pada renstra 2021-2026, serta komitmen Kepala Daerah dan Kepala OPD untuk mewujudkan nilai SAKIP Pemda A pada tahun 2024, dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh Kepala OPD di Istana Gubernur Rumah Dinas Gubernur.

#### Membandingkan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Gambaran pencapaian sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja pada perjanjian kinerja sebelumnya diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu indikator nilai akuntabilitas kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan perubahan atas Perjanjian Kinerja (PK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan 1 (satu) indikator yaitu nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan nilai dan capaian pada tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.19 Target, Realisasi, dan Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Empat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1.1. Nilai akuntabilitas kinerja OPD (Nilai)	80,25	80,29	100,05	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat, 2025



## Pengukuran Realisasi Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun N.

Nilai SAKIP atau nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan indikator/tolok ukur bagaimana tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang tercermin dari bagaimana Pemerintah Daerah tersebut mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP ini diperoleh dari penilaian terhadap 4 komponen SAKIP yaitu:

1. Komponen Perencanaan Kinerja (30%),
2. Pengukuran Kinerja (30%),
3. Pelaporan Kinerja (15%),
4. Evaluasi internal (25%) dan

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD merupakan nilai hasil evaluasi penerapan SAKIP di OPD yang evaluasinya dilakukan oleh Inspektorat Daerah setiap tahun. Range nilai evaluasi mengacu pada Permenpan 12 tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai AA (>90 -100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60 -70), CC (>50 -60), C (>40 -50)

Hasil indikator kinerja nilai akuntabilitas diukur melalui penghitungan dengan rumus sebagai berikut.

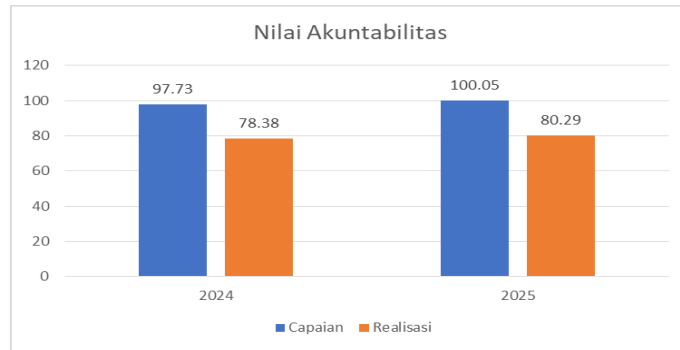
$$\text{Nilai akuntabilitas} = (30\% \text{ Perencanaan Kinerja} + 30\% \text{ Pengukuran Kinerja} + 15\% \text{ Pelaporan Kinerja} + 25\% \text{ Evaluasi Internal})$$

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun
			2025
1	Perencanaan Kinerja	30	26,72
2	Pengukuran Kinerja	30	24,32
3	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4	Evaluasi Internal	25	16,50
<b>Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>80,29</b>
<b>Kategori</b>			<b>A</b>

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat, 2025

## Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Jika dilihat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2024 terjadi sedikit kenaikan nilai akuntabilitas dari 78,38 naik menjadi 80,29 di Tahun 2025. Perbandingan target dan realisasi untuk indikator nilai akuntabilitas Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



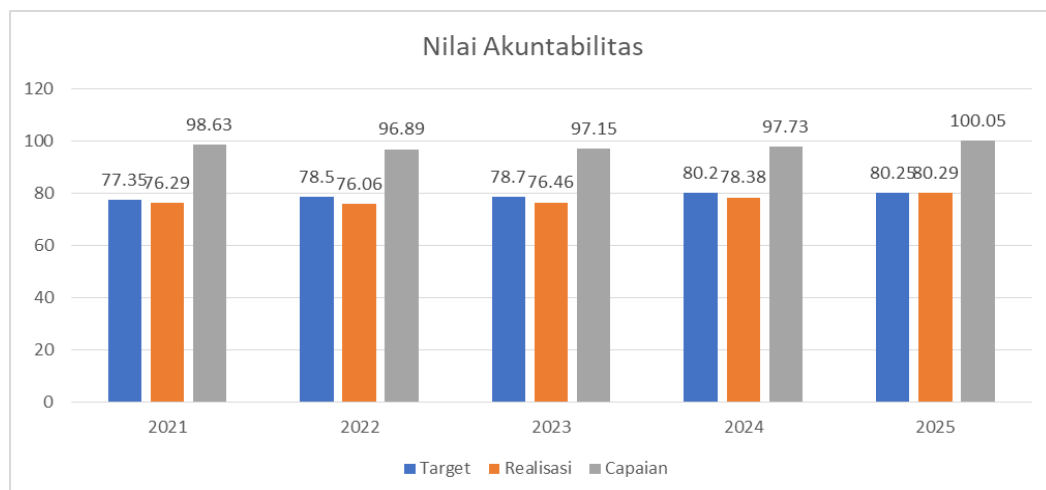
**Gambar 3.10 Perbandingan Capaian dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2024 dan 2025**

**Tabel 3.20 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun Ini, Tahun Lalu, dan Beberapa Tahun Terakhir**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	4.1. Nilai akuntabilitas kinerja OPD (Nilai)	BB	BB		BB	BB		BB	BB		A	BB		A	A	
			77.35	76.29	98.63	78.50	76.06	96.89	78.70	76.46	97.15	80.20	78.38	97.73	80.25	80.29	100.05
Capaian Sasaran Strategis 4			98.63 (sangat baik)			96.89 (sangat baik)			97,15 (sangat baik)			97,73 (sangat baik)			100,05 (sangat baik)		

Jika dilihat dari tabel diatas, target kinerja pada sasaran strategis 4 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, angka peramalan (forecasting) ini diperoleh dari data kondisi eksisting tahun sebelumnya. Capaian target kinerja pada sasaran strategis 4 dari tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami fluktuasi dari 98,63% menjadi 100,05% pada tahun 2025.

Perbandingan target kinerja pada sasaran strategis 4 selama tahun renstra 2021-2026 dengan realisasi dan capaian 2021 sampai 2025, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



**Gambar 3.11 Target, Realisasi dan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 s.d 2025**



### Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi kinerja sasaran strategis 4 Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja organisasi pada tahun 2025 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian terhadap Renstra 2025
1	Nilai akuntabilitas kinerja organisasi	A (80,29)	A (81,5)	98,52 %

Dari tabel terlihat bahwa nilai akuntabilitas kinerja organisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 80,29. Berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026, indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja organisasi ditargetkan mencapai A (81,5) pada tahun 2026 dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 98,52%. Butuh kenaikan 1,21 untuk dapat mencapai target renstra 2026 yang telah ditetapkan.

### Perkembangan Realisasi Indikator Sasaran Strategis 4 Nilai Akuntabilitas Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir

Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja organisasi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.22  
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Tahun 2020-2025  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat**

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun			Bobot	Tahun		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	26.49	26.33	26.68	30	26.89	26.03	26.72
2	Pengukuran Kinerja	25	18.75	18.75	19.10	30	19.98	24,64	24,32
3	Pelaporan Kinerja	15	12.68	13.61	12.68	15	11.52	12,63	12,75
4	Evaluasi Internal	10	6.46	6.35	6.35	25	18,08	15,08	16,50
5	Capaian Kinerja	20	8.50	11.25	11.25	-	-	-	-
	<b>Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>72.87</b>	<b>76.29</b>	<b>76.06</b>		<b>76.46</b>	<b>78.38</b>	<b>80,29</b>
	<b>Kategori</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 untuk penilaian kinerja tahun 2024 dinyatakan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

mendapat nilai 80,29 dengan kategori A. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah berorientasi hasil, akuntabilitas kinerja sudah baik, akuntabel dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal walaupun belum begitu optimal.

Dibandingkan tahun sebelumnya ada perbaikan skor dalam perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal, namun disisi lain ada penurunan kualitas pengukuran kinerja.

### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi

Untuk indikator kinerja pada Sasaran 4 yaitu nilai akuntabilitas kinerja organisasi, tidak ada Standar Nasional sebagai pembanding. Namun dapat digunakan pembanding nilai akuntabilitas Provinsi Sumatera Barat dimana tahun 2025 ditargetkan nilai akuntabilitas Provinsi Sumatera Barat dengan nilai BB (79). Masih lebih rendah sedikit nilai akuntabilitas pada OPD dari target nilai provinsi yakni senilai 1,29.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan Terhadap Sasaran Strategis Empat

Dalam upaya pencapaian sasaran ***Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi*** terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi atau upaya pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut;



#### Faktor Pendorong

1. Komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
2. Adanya pembinaan dan arahan dari tim terkait Laporan Kinerja (LKj) yaitu Biro Organisasi dan Inspektorat.
3. Ketersediaan dokumen perencanaan dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang terukur;



#### Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

Tabel 3.23 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Dokumen realisasi rencana aksi belum memuat kendala/hambatan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja	Memuat kendala/hambatan pada rencana aksi seluruh unit kerja/bidang dalam pencapaian target Perjanjian Kinerja



2.	Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja dilaksanakan secara berjenjang tetapi sampai dengan level staf	Melakukan inovasi dalam pengumpulan data capaian kinerja melalui google sheet sampai ke level staf sehingga pemantauan lebih efektif
3.	Perlu peningkatan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja	1. Disetiap rapat pimpinan/kadis menegaskan terkait kinerja dan capaiannya mulai dari es 3 sampai staf kepada seluruh ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Melakukan desk capaian kinerja per bidang dan UPTD yang dihadiri oleh ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Masing-masing ASN melakukan pengisian realisasi rencana aksi per TW dan melakukan pengisian capaian kinerja tiap bulannya
4.	Informasi dalam laporan kinerja agar menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian indikator kinerja secara menyeluruh (orang, anggaran, mekanisme/SOP)	Laporan Kinerja menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian indikator kinerja secara menyeluruh (orang, anggaran, mekanisme/SOP)
5.	Evaluasi internal yang dilaksanakan belum seluruhnya menampilkan alternatif perbaikan pencapaian target organisasi.	Melakukan pemantauan kinerja mulai dari tingkat eselon 2 sampai staf secara berkala serta menampilkan alternatif perbaikan pencapaian target melalui PK Perubahan dan Realisasi Rencana Aksi



**Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025**

1. Menyusun Perjanjian Kinerja mulai dari Esselon II, Esselon III, Esselon IV, Fungsional tertentu dan Staf termasuk distribusi target kinerja secara proporsional melalui proses cascading;
2. Menetapkan dengan Keputusan atau Piagam Penghargaan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam hal pemberian penghargaan/reward dan hukuman/punishment dalam penilaian kinerja;
3. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pengukuran penilaian kinerja ASN sehingga pengukuran kinerja dapat diidentifikasi lebih tepat dan cepat dan dapat dimonitor pencapaiannya secara berkala;
4. Melakukan penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) dari Kepala Dinas sampai ke staf berdasarkan jabatannya;
5. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja baik terhadap Perjanjian Kinerja maupun Rencana Aksi melalui rapat internal dan eksternal bersama Biro Organisasi, Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan di Perangkat Daerah serta melakukan rapat-rapat internal lebih intens dan mendalam, baik dilakukan bulanan,



triwulan dan semester yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan efektifitas dan efisiensi kinerja;

6. Memuat kendala/hambatan pada rencana aksi seluruh unit kerja/bidang dalam pencapaian target pada PK;
7. Membuat penyajian laporan kinerja dengan menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian indikator kinerja secara menyeluruh (orang, anggaran, mekanisme/SOP).



### Upaya yang dilakukan pada masa yang akan datang

1. Menyusun Perjanjian Kinerja mulai dari Esselon II, Esselon III, Esselon IV, Fungsional tertentu dan Staf termasuk distribusi target kinerja secara proporsional melalui proses cascading;
2. Menetapkan dengan Keputusan atau Piagam Penghargaan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam hal pemberian penghargaan/reward dan hukuman/punishment dalam penilaian kinerja;
3. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pengukuran penilaian kinerja ASN sehingga pengukuran kinerja dapat diidentifikasi lebih tepat dan cepat dan dapat dimonitor pencapaiannya secara berkala;
4. Melakukan penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) dari Kepala Dinas sampai ke staf berdasarkan jabatannya;
5. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja baik terhadap Perjanjian Kinerja maupun Rencana Aksi melalui rapat internal dan eksternal bersama Biro Organisasi, Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan di Perangkat Daerah serta melakukan rapat-rapat internal lebih intens dan mendalam, baik dilakukan bulanan, triwulan dan semester yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan efektifitas dan efisiensi kinerja;
6. Melakukan perbaikan pada langkah-langkah kerja yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran kinerja dinas pada Rencana Aksi agar lebih spesifik;

### **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan terhadap analisis efisiensi penggunaan anggaran, efisiensi penggunaan SDM, dan sarana prasarana.

Untuk mendukung pencapaian *sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi* didukung oleh 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2 kegiatan yakni kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 4 sub kegiatan). Dimana anggaran pada APBD Perubahan 2025 diluar belanja pegawai sebesar Rp. 391.306.000,- dengan realisasi sebesar Rp.376.221.000,- atau 96,14%. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar



Rp.15.085.000,- (3,86%). Dengan capaian fisik kegiatan 100%. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- i. SILPA makan minum rapat yang disesuaikan dengan harga e-purchasing

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis 4 tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{((PA \times CK) - RA)}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} &= \frac{(Rp\ 391.306.000 \times 100,05\%) - Rp\ 376.221.000}{Rp\ 391.306.000} \times 100\% \\ &= 0,04\% \end{aligned}$$

Tingkat efisiensi sebesar 0,04 % artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah optimal untuk mencapai sasaran.

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{Nilai efisiensi} &= 50\% + \left( \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right) \\ &= 50\% + \left( \frac{0,04}{20} \times 50 \right) = 59,76\% \end{aligned}$$

Nilai efisiensi sebesar 59,76 % jika lebih besar dari 20% artinya nilai efisiensi adalah 100%.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran 4 meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Jumlah SDM yang berkompeten dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup (memadai). Berdasarkan analisa kebutuhan anjab dibutuhkan 11 orang untuk keuangan dan perencanaan, saat ini yang masih dipenuhi baru sekitar 8 orang.	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis, dengan efisiensi sebesar 59,76%, nilai efisiensi 100%	Anggaran belum dapat mengakomodir kegiatan secara maksimal untuk kegiatan perencanaan dan terkait verifikasi keuangan	Optimalisasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja dan program daerah melalui kolaborasi dengan internal perangkat daerah dan pihak yang berkompeten terhadap pencapaian target indikator kinerja
No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
3	Sarana dan prasarana yang lengkap sehingga dapat mendukung capaian kinerja sasaran strategis 4	Jumlah sarana dan prasarana dalam mendukung capaian kinerja saat ini belum cukup (memadai). Saat ini dilakukan pengoptimalan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana, terutama terkait mesin/peralatan yang memudahkan pekerjaan.	Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk melakukan pengadaan mesin peralatan kantor secara bertahap.

### Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program-program yang dilaksanakan tersebut sudah menunjang pencapaian sasaran strategis *meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi*, begitupun dengan kegiatan pada masing-masing program. Lebih lengkapnya program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 4 *meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi* dan capaian masing-masing program kegiatan pendukung sasaran strategis 4 terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.24  
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2025 Pendukung Sasaran Strategis Empat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	Ket
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	4.1 Nilai akuntabilitas kinerja OPD (nilai)	TW 1	-	-	-						391,306,000	376,221,000	
			TW 2	A (80,25)	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	11,146,000	11,115,000	Sekretariat
			TW 3	A (80,25)	A(80,29)	100.05%		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11 dokumen	11 dokumen	3,216,000	3,210,000	
			TW 4	A (80,25)	A(80,29)	100.05%		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 Laporan	3,660,000	3,645,000	
								3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4,270,000	4,260,000	
								2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	380,160,000	365,106,000	Sekretariat
								1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	380,160,000	365,106,000	



### Sasaran Strategis 5

### Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

#### Penjelasan Terkait Sasaran yang Akan Diukur serta Indikator yang Digunakan

Sasaran strategis 5 yakni *Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi*, untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Semakin meningkat kualitas pelayanan organisasi maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan pada OPD tersebut. Tingkat kepuasan masyarakat dilihat dari informasi layanan yang diberikan, kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan, kompetensi/kemampuan personil yang melayani, kedisiplinan personil dalam melayani, ketepatan waktu pelayanan sesuai sop, kesopanan dan keramahan personil dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab personil dalam memberikan pelayanan, keadilan personil dalam memberikan pelayanan, dan dukungan infrastruktur penunjang pelayanan yang ada.

#### Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Penetapan target Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2025 sebesar 87,21 (Baik) berasal dari kenaikan realisasi indikator kinerja pada tahun sebelumnya.

#### Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Lima

Gambaran pencapaian sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja pada perubahan perjanjian kinerja diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan survey kepuasan pelayanan organisasi pada Desember 2025 pada aplikasi SEPAKAT dengan nilai dan capaian pada tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.25 Target, Realisasi, dan Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Lima**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1.1. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik (87,21)	Baik (83,75)	96,03%	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat, 2025



### Pengukuran Realisasi Kinerja

Nilai kualitas pelayanan organisasi diukur berdasarkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Pelayanan yang dimaksud disini merupakan pelayanan yang diberikan kepada ASN/Masyarakat yang menjadi stakeholder dari OPD yang bersangkutan. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan kepada masyarakat yakni terkait pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) pada Bidang Perdagangan, pelayanan pengujian mutu barang komoditi serta kalibrasi pada UPTD BPSMB, pelayanan pengujian mutu minyak atsiri pada UPTD Atsiri, serta masyarakat di sentra produksi industri yang mendapatkan bimtek dan pelatihan peningkatan kompetensi teknis pengolahan industri.

Nilai kualitas pelayanan dilakukan dengan metode pengukurannya melalui survey dengan kuesioner.

interval nilai yang digunakan :

25 - 64,99 = tidak baik

65 - 76,60 = kurang baik

76,61 - 88,30 = baik

88,31 - 100 = sangat baik

(pedoman : Permenpan 14 Tahun 2017)

Hasil indikator kinerja nilai akuntabilitas diukur melalui penghitungan dengan rumus sebagai berikut.

Cara menetapkan Nilai Penimbang

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

Nilai kualitas pelayanan = N : Bobot Nilai Unsur

Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Ket : Nilai penimbang = 25

### Capaian Nilai Persepsi, Interval dan Mutu Kinerja

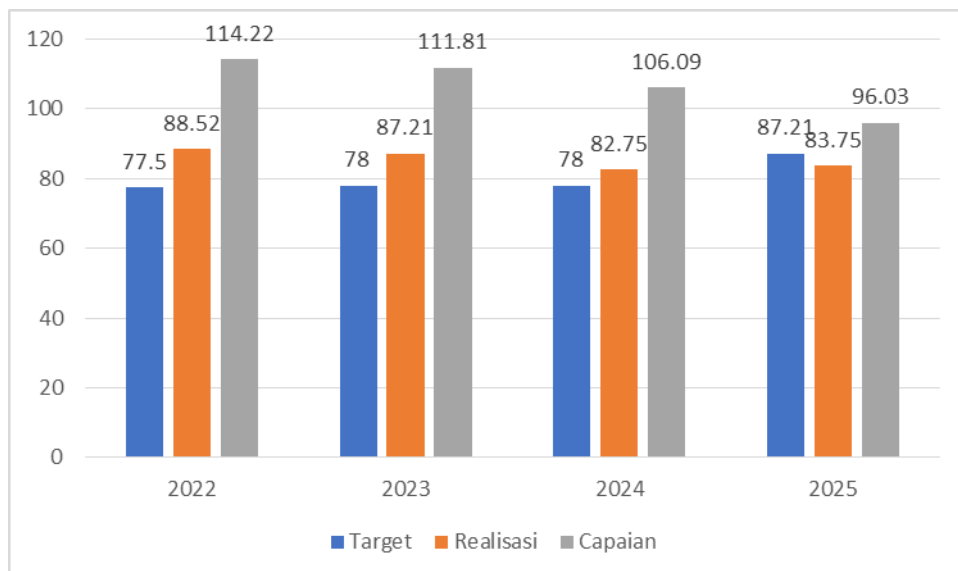
No	Unsur	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Kinerja Unsur
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Jenis Pelayanannya	3,34	0,37	Baik
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan di Unit Kerja	3,31	0,36	Baik
3	Ketepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	3,15	0,35	Baik
4	Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	3,59	0,4	Baik



No	Unsur	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Kinerja Unsur
5	Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang Tercantum dalam Standar Pelayanan dengan Hasil yang Diberikan	3,30	0,36	Baik
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan	3,38	0,37	Baik
7	Perilaku Petugas dalam Pelayanan terkait Kesopanan dan Keramahan	3,44	0,38	Baik
8	Penanganan Pengaduan Pelayanan, Saran dan Masukan	3,17	0,35	Baik
9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,69	0,41	Baik
IKM			3,35	
Konversi IKM			83,75	
Nilai Mutu Pelayanan			B	
Kinerja Pelayanan			Baik	

### Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Nilai Kualitas Pelayanan Organisasi serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi merupakan sasaran baru pada Renstra 2021-2026, sehingga pengukuran kualitas pelayanan organisasi baru dilakukan pada tahun 2022, sejak tahun 2024 sudah mulai dilakukan perhitungan kualitas pelayanan organisasi yg dikoordinir oleh Biro Organisasi dengan aplikasi SEPAKAT (Survey Kepuasan Masyarakat).



Gambar 3.12 Perbandingan Capaian dan Realisasi Nilai Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d 2025

**Tabel 3.26 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun Ini, Tahun Lalu, dan Beberapa Tahun Terakhir**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	5.1. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	-	-	-	Baik 77.50	Baik 88.52	114.22	Baik 78.00	Baik 87.21	111.81	Baik 78.00	Baik 82.75	106.09	Baik 87.21	Baik 83.75	96.03
Capaian Sasaran Strategis 5			-			114.22 (sangat baik)			111.81 (sangat baik)			106.09 (sangat baik)			96.03 (sangat baik)		

Jika dilihat dari tabel diatas, target kinerja pada sasaran strategis 5 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, angka peramalan (forecasting) ini diperoleh dari data kondisi eksisting tahun sebelumnya. Capaian target kinerja pada sasaran strategis 5 dari tahun 2022 sampai tahun 2025 mengalami fluktuasi dari 114,22% menjadi 96,03% pada tahun 2025.

### Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pelayanan Organisasi Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi kinerja sasaran strategis 5 Meningkatnya nilai kualitas pelayanan organisasi pada tahun 2025 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian terhadap Renstra 2025
1	Nilai kualitas pelayanan organisasi	Baik (83,75)	Baik (85,21)	98,29 %

Dari tabel terlihat bahwa nilai kualitas pelayanan organisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 83,75. Berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026, indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja organisasi ditargetkan mencapai Baik (85,21) pada tahun 2026 dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 98,29%. Butuh kenaikan 1,46 untuk dapat mencapai target renstra 2026 yang telah ditetapkan.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan Terhadap Sasaran Strategis Lima

Dalam upaya pencapaian sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi* terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi atau upaya pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut;



1. Adanya pembinaan dan arahan dari tim terkait penilaian kinerja kualitas pelayanan organisasi yakni Kuesioner pelayanan publik dari Biro Organisasi;

2. Adanya komitmen bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan organisasi.



### Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

**Tabel 3.28 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Belum semua masyarakat paham peraturan perundangan terbaru terkait pelayanan	Dinas Perindag aktif dalam memberikan informasi baik melalui sosial media maupun melalui website dinas serta melalui podcast
2.	Munculnya pelayanan pengujian yang sama yang dilaksanakan oleh pihak swasta dengan harga yang bersaing	Memberikan nilai tambah yang berbeda dari pihak swasta walaupun dengan harga yang bersaing. Disamping itu juga memperluas cakupan pengujian komoditi



### Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025

1. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pengukuran kualitas pelayanan organisasi;
2. Peningkatan kualitas pelayanan organisasi karena Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah teknis yang melakukan urusan perindustrian dan perdagangan termasuk perbaikan fasilitas fisik, penambahan sarana dan prasarana kantor agar bekerja lebih nyaman, serta mengoptimalkan penyebaran informasi pada masyarakat melalui social media baik itu melalui acara podcast, pelatihan/kegiatan OPD melalui instagram, youtube maupun tiktok;
3. Berusaha dengan cepat menanggapi keluhan kerusakan Aset Dinas (Pemeliharaan BMD);
4. Menyediakan data baik itu kepegawaian, data urusan industri dan data urusan perdagangan yang terbaru sehingga mudah diakses baik melalui permintaan data secara langsung dan maupun website OPD.



### Upaya yang dilakukan pada tahun mendatang

1. Tetap melakukan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pengukuran kualitas pelayanan organisasi;
2. Peningkatan kualitas pelayanan organisasi karena Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah teknis yang melakukan urusan perindustrian dan perdagangan termasuk perbaikan fasilitas fisik, penambahan sarana dan prasarana kantor agar bekerja lebih nyaman, serta mengoptimalkan



- penyebarluasan informasi pada masyarakat melalui social media baik itu melalui acara podcast, pelatihan/kegiatan OPD melalui instagram, youtube maupun tiktok;
3. Berusaha dengan cepat menanggapi keluhan kerusakan Aset Dinas (Pemeliharaan BMD);
  4. Menyediakan data baik itu kepegawaian, data urusan industri dan data urusan perdagangan yang terbaru sehingga mudah diakses baik melalui permintaan data secara langsung dan maupun website OPD.

### **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan terhadap analisis efisiensi penggunaan anggaran, efisiensi penggunaan SDM, dan sarana prasarana.

Untuk mendukung pencapaian **sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi** didukung oleh 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5 kegiatan, ). Dimana anggaran pada APBD Perubahan 2025 diluar belanja pegawai sebesar Rp Rp. 4.522.489.939,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.139.868.500,- atau 91,54%. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 382.621.439,- (8,46%). Dengan capaian fisik kegiatan 100%. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- i. SILPA kontrak laptop, scanner pada e- katalog
- ii. Pembayaran asuransi sesuai kebutuhan
- iii. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas sesuai kebutuhan
- iv. Belanja perjalanan dinas sesuai kebutuhan

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis 5 tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{((PA \times CK) - RA)}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} &= \frac{(Rp4.522.489.939 \times 96,03\%) - Rp 4.139.868.500}{Rp 4.522.489.939} \times 100\% \\ &= 0,04\% \end{aligned}$$



Tingkat efisiensi sebesar 0,04% artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah optimal untuk mencapai sasaran.

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{Nilai efisiensi} &= 50\% + \left( \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right) \\ &= 50\% + \left( \frac{0,04}{20} \times 50 \right) = 61,23\% \end{aligned}$$

Nilai efisiensi sebesar 61,23 % jika lebih besar dari 20% artinya nilai efisiensi adalah 100%.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran 5 meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Jumlah SDM yang berkompoten dalam meningkatkan pelayanan organisasi	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup (memadai). Berdasarkan analisa kebutuhan anjab dibutuhkan 11 orang untuk keuangan dan perencanaan, saat ini yang masih dipenuhi baru sekitar 8 orang.	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis, dengan efisiensi sebesar 61,23%, nilai efisiensi 100%	Anggaran belum dapat mengakomodir kegiatan secara maksimal untuk kegiatan pemeliharaan/rehab gedung kantor, pengadaan sarana dan prasarana	Optimalisasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja dan program daerah melalui kolaborasi dengan internal perangkat daerah dan pihak yang berkompeten terhadap pencapaian target indikator kinerja

No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
3	Sarana dan prasarana yang lengkap sehingga dapat mendukung capaian kinerja sasaran strategis 5	Jumlah sarana dan prasarana dalam mendukung capaian kinerja saat ini belum cukup (memadai). Saat ini dilakukan pengoptimalan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana, terutama terkait mesin/peralatan yang memudahkan pekerjaan.	Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk melakukan pengadaan mesin peralatan kantor secara bertahap.



### **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program-program yang dilaksanakan tersebut sudah menunjang pencapaian sasaran strategis *meningkatnya kualitas pelayanan organisasi*, begitupun dengan kegiatan pada masing-masing program. Lebih lengkapnya program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 5 *kualitas pelayanan organisasi* dan capaian masing-masing program kegiatan pendukung sasaran strategis 5 terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.29  
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2025 Pendukung Sasaran Strategis Lima**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	Ket
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	5.1 Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	TW 1	-	-	-						4,522,489,939	4,139,868,500	
			TW 2	-	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	3,000,000	1,911,032	Sekretariat
			TW 3	-	-	-		1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	1,911,032	Sekretariat
			TW 4	Baik (87,21)	Baik (83,75)	96.03%		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	1,844,550,762	1,544,103,850	
								1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	5,028,000	4,600,856	Sekretariat
								2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	1,261,000	1,261,000	UPTD BPSMB
								3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	2,430,000	2,430,000	UPTD Logam
								4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	42 paket	42 paket	77,222,000	74,717,625	Sekretariat
								5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	42 paket	42 paket	4,297,600	4,296,000	UPTD BPSMB
								6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	17 paket	17 paket	5,615,700	5,615,700	UPTD Logam
								7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	9 paket	9 paket	48,650,320	48,246,465	Sekretariat
								8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	7 paket	7 paket	4,774,300	4,774,300	UPTD BPSMB



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	Ket
								9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	4 paket	5,595,000	5,595,000	UPTD Logam
								10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2 paket	2,620,100	2,620,100	UPTD PPMA
								11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	33 dokumen	33 dokumen	5,390,000	5,390,000	Sekretariat
								12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9 dokumen	6 dokumen	1,215,000	405,000	UPTD BPSMB
								13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9 dokumen	9 dokumen	1,215,000	1,215,000	UPTD Logam
								14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan	1,679,236,742	1,382,936,804	Sekretariat
							<b>3. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>53,954,580</b>	<b>47,889,301</b>		
							1. Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	1 paket	3,913,200	3,900,001	Sekretariat	
							2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	5 unit	50,041,380	43,989,300	Sekretariat	
							<b>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,361,393,597</b>	<b>2,291,040,927</b>		
							1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	900,000	105,000	UPTD BPSMB	
							2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	229,664,000	227,004,510	Sekretariat	
							3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	110,040,000	103,791,073	(UPTD BPSMB)	
							4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	66,594,000	62,711,166	(UPTD Logam)	



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	Ket
								5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	53,386,500	45,703,875	(UPTD PPMA)
								6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1,900,809,097	1,851,725,303	Sekretariat
								<b>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>259,591,000</b>	<b>254,923,390</b>	
								1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	12 unit	168,180,000	166,698,330	Sekretariat
								2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	63 unit	63 unit	47,915,000	45,731,000	Sekretariat
								3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	9 unit	7,760,000	7,760,000	UPTD BPSMB
								4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 unit	8 unit	5,080,000	5,080,000	UPTD Logam
								5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	14 unit	9,180,000	8,180,000	UPTD PPMA
								6. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	1 unit	1 unit	21,476,000	21,474,060	UPTD PPMA



### 3.4 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Analisa akuntabilitas keuangan pada laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat diuraikan atas beberapa bagian yang memuat tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

#### 3.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit penghasil yang ada dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan target sebesar Rp. 69.893.012,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 70.420.363,- (100,75%). Adapun sumber atau unit penghasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.30  
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

NO. REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PAD TAHUN 2025	REALISASI PAD TAHUN 2025	% Capaian	KET
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	69,893,012	70,420,363	100.75	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69,893,012	70,420,363	100.75	
4 1 02	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>				
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. SUMBAR	69,893,012	70,420,363	100.75	
4 1 02 02	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>	69,893,012	70,420,363	100.75	
4 1 02 02 01	<b>RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</b>	69,893,012	70,420,363	100.75	
4 1 02 02 01 0001	<b>Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan</b>	64,293,012	64,410,363	100.18	
	Retribusi Sewa Bangunan pada Sekretariat Disperindag	23,665,176	26,269,167	111.00	
	Retribusi Sewa Rumah Dinas	18,547,836	16,322,796	88.00	
	Retribusi Sewa Bangunan pada UPTD BPSMB	1,776,000	446,400	25.14	
	Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan Workshop UPTD Logam	20,304,000	21,372,000	105.26	
4 1 02 02 01 0004	<b>Retribusi Pemakaian Laboratorium</b>	5,600,000	6,010,000	107.32	
	Retribusi Pengolahan dan Pengujian Minyak Atsiri UPTD PPMA	5,600,000	6,010,000	107.32	
	<b>JUMLAH</b>	<b>69,893,012</b>	<b>70,420,363</b>	<b>100.75</b>	

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat, 2025

Pada tabel terlihat capaian retribusi tahun 2025 sebesar 100,75% hal ini disebabkan retribusi sewa bangunan workshop/pemakaian workshop UPTD Logam, retribusi sewa bangunan pada sekretariat, dan retribusi pengolahan dan pengujian minyak atsiri melebihi target.

#### 3.4.2 Realisasi Anggaran APBD Tahun 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2025 mendapat pagu anggaran APBD untuk belanja operasional yakni sebesar Rp.27.169.618.946,- untuk membiayai kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja modal. Realisasi anggaran 2025 sebesar Rp. 25.387.766.676,- (93,44%) artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.781.852.270,- (6,56%). Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:



1. Sisa akomodasi, tiket pesawat narsum, belanja bahan praktek, sewa alat, sewa bus, dan makan minum kegiatan
2. Sisa pengadaan mesin peralatan untuk IKM
3. Sewa stand dan dekorasi pameran Kriya Nusa disebabkan pameran dibatalkan karena aksi demo di Jakarta
4. Workshop lapangan ke luar daerah yang batal dilaksanakan

Rincian realisasi anggaran dan realisasi capaian kinerja pada sub kegiatan Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.31 Rincian Realisasi Anggaran dan Realisasi Capaian Kinerja pada Sub Kegiatan pada APBD 2025**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>					<b>27.169.618.946</b>	<b>25.387.766.676</b>	<b>93,44</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					<b>18.821.683.354</b>	<b>17.702.729.995</b>	<b>94,05</b>
	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>11.146.000</b>	<b>11.115.000</b>	<b>99,72</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11 dokumen	11 dokumen	100	3.216.000	3.210.000	99,81
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	3 laporan	3 laporan	100	3.660.000	3.645.000	99,59



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	4 laporan	100	4.270.000	4.260.000	99,77
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>14.288.047.415</b>	<b>13.551.746.495</b>	<b>94,85</b>
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	93 Orang/Bulan	93 Orang/Bulan	100	13.907.887.415	13.186.640.495	94,81
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	12 dokumen	12 dokumen	100	380.160.000	365.106.000	96,04
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>3.000.000</b>	<b>1.911.032</b>	<b>63,70</b>
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah skpd	1 dokumen	1 dokumen	100	3.000.000	1.911.032	63,70
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>1.827.074.962</b>	<b>1.526.628.050</b>	<b>83,56</b>
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100	5.028.000	4.600.856	91,50
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100	1.261.000	1.261.000	100,00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	1 paket	1 paket	100	2.430.000	2.430.000	100,00



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	LOGAM]	bangunan kantor yang disediakan						
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	42 paket	42 paket	100	77.222.000	74.717.625	96,76
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	18 paket	18 paket	100	4.297.600	4.296.000	99,96
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD LOGAM]	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	17 paket	17 paket	100	5.615.700	5.615.700	100,00
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	9 paket	9 paket	100	48.650.320	48.246.465	99,17
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	7 paket	7 paket	100	4.774.300	4.774.300	100,00
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD - UPTD LOGAM]	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	4 paket	4 paket	100	5.595.000	5.595.000	100,00
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD - UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI (PPMA)]	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	2 paket	2 paket	100	2.620.100	2.620.100	100,00
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	33 dokumen	33 dokumen	100	5.390.000	5.390.000	100,00



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9 dokumen	6 dokumen	66,67	1.215.000	405.000	33,33
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD - UPTD LOGAM]	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9 dokumen	9 dokumen	100	1.215.000	1.215.000	100,00
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	50 laporan	50 laporan	100	1.679.236.742	1.382.936.804	82,36
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>53.954.580</b>	<b>47.889.301</b>	<b>88,76</b>
21	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	1 paket	100	3.913.200	3.900.001	99,66
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	5 unit	100	50.041.380	43.989.300	87,91
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>2.241.413.097</b>	<b>2.182.625.886</b>	<b>97,38</b>
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	100	900.000	105.000	11,67
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	1 laporan	100	229.664.000	227.004.510	98,84



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		yang disediakan						
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100	110.040.000	103.791.073	94,32
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD LOGAM]	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100	66.594.000	62.711.166	94,17
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI (PPMA)]	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100	53.386.500	45.703.875	85,61
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100	1.900.809.097	1.851.725.303	97,42
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>225.275.000</b>	<b>220.609.330</b>	<b>97,93</b>
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	12 unit	100	168.180.000	166.698.330	99,12



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	63 unit	63 unit	100	47.915.000	45.731.000	95,44
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	14 unit	100	9.180.000	8.180.000	89,11
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD LOGAM]	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	9 unit	100	7.760.000	7.760.000	100,00
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI (PPMA)]	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 unit	8 unit	100	5.080.000	5.080.000	100,00
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI (PPMA)]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	1 unit	1 unit	100	21.476.000	21.474.060	99,99
	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>					<b>1.638.682.649</b>	<b>1.616.572.240</b>	<b>98,65</b>
	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1.455.172.000</b>	<b>1.444.732.515</b>	<b>99,28</b>
35	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) yang aktif	8 BPSK	8 BPSK	100	1.455.172.000	1.444.732.515	99,28



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>182.360.649</b>	<b>170.714.725</b>	<b>93,61</b>
36	Pengembangan Layanan Kalibrasi[UPTD - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah sertifikasi kalibrasi yang diterbitkan	1200 sertifikat	1795 sertifikat	149,58	39.078.870	34.537.900	88,38
37	Pengembangan Layanan Pengujian [UPTD - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah laporan /sertifikat pengujian mutu barang yang diterbitkan	300 laporan	377 laporan	125,67	73.911.181	70.995.475	96,06
38	Pemantauan Mutu Produk [UPTD - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah produk potensial yang dipantau	7 produk	7 produk	100	69.370.598	65.181.350	93,96
	<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1.150.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>97,83</b>
39	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	2 laporan	2 laporan	100	1.150.000	1.125.000	97,83
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>					<b>1.816.430.000</b>	<b>1.498.185.516</b>	<b>82,48</b>
	<b>Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</b>					<b>208.720.000</b>	<b>156.720.000</b>	<b>75,09</b>
40	Fasilitasi Promosi Penggunaan	Jumlah UMKM yang	11 UMKM	10 UMKM	90,91	208.720.000	156.720.000	75,09



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri						
	<b>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>					<b>1.607.710.000</b>	<b>1.341.465.516</b>	<b>83,44</b>
41	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	549 UMKM	1587 UMKM	289,07	1.607.710.000	1.341.465.516	83,44
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>					<b>4.721.228.943</b>	<b>4.406.928.725</b>	<b>93,34</b>
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					<b>4.721.228.943</b>	<b>4.406.928.725</b>	<b>93,34</b>



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	28 dokumen	28 dokumen	100	3.986.404.610	3.723.212.785	93,40
43	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat [UPTD - UPTD LOGAM]	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	3 dokumen	3 dokumen	100	624.726.392	576.823.166	92,33
44	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat [UPTD - UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI (PPMA)]	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100	110.097.941	106.892.774	97,09
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>					<b>16.714.000</b>	<b>10.345.000</b>	<b>61,89</b>
	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>					<b>16.714.000</b>	<b>10.345.000</b>	<b>61,89</b>
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan	1 dokumen	1 dokumen	100	16.714.000	10.345.000	61,89



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab/Kota, dan industri besar sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat						
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>					<b>154.880.000</b>	<b>153.005.200</b>	<b>98,79</b>
	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>					<b>154.880.000</b>	<b>153.005.200</b>	<b>98,79</b>
46	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	1 dokumen	100	154.880.000	153.005.200	98,79

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat, 2025



Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 5 (lima) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka besaran alokasi dan realisasi untuk setiap sasaran strategis setelah dikeluarkan belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.34 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat	4,892,822,943	4,570,278,925	93.41
2	Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah			
3	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	3,455,112,649	3,114,757,756	90.15
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	391,306,000	376,221,000	96.14
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	4,522,489,939	4,139,868,500	91.54
	<b>Jumlah</b>	<b>13,261,731,531</b>	<b>12,201,126,181</b>	<b>92.00</b>

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat, 2025

Jika dibandingkan dengan hasil kinerja yang sudah dicapai dengan penggunaan anggaran, terdapat 5 (lima) sasaran strategis yakni sasaran strategis 1) meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat, 2) meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah, 3) meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing, 4) meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, 5) meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, sudah terjadi efektivitas penggunaan anggaran karena persentase capaian kinerja lebih besar dari persentase capaian anggaran. Potret tingkat efektivitas anggaran tersebut sebagaimana pada tabel berikut :



**Tabel 3.35**  
**Tingkat Efektivitas Anggaran Terhadap Kinerja**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp).			% Tingkat efektivitas
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat	Jumlah pelaku industri kecil dan menengah	56,803	58,426	102.86	4,892,822,943	4,570,278,925	93.41	73,63
2	Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah	Nilai produksi industri kecil dan menengah	30.00	30.31	101.03	4,892,822,943	4,570,278,925	93.41	69,06
3	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB	53.43	58.63	109.73	3,455,112,649	3,114,757,756	90.15	98,95
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	100.05	391,306,000	376,221,000	96.14	59,76
			(80.25)	(80.29)					
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik	Baik	96.03	4,522,489,939	4,139,868,500	91.54	61,23
			(87.21)	(83.75)					



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan di sektor perindustrian dan perdagangan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan di Sumatera Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 yang secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang ditetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran yang diturunkan kedalam 5 (lima) indikator kinerja yaitu 1) indikator kinerja jumlah pelaku industri kecil dan menengah dengan capaian 102,86 persen (sangat tinggi), 2) indikator kinerja nilai produksi industri kecil dan menengah dengan capaian 101,03 persen (sangat tinggi), 3) indikator nilai sektor perdagangan dalam PDRB dengan capaian 109,73 persen (sangat tinggi), 4) indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan capaian 100,05 persen (sangat tinggi), dan 5) indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan capaian 96,03 persen.
2. Capaian kinerja keuangan masih baik yaitu dengan realisasi penyerapan anggaran APBD pada belanja operasi dimana termasuk didalamnya belanja pegawai pada tahun 2025 yakni sebesar 93,44 persen atau Rp. 25.387.766.676,- dari jumlah pagu anggaran belanja operasi sebesar Rp. 27.169.618.946,- serta realisasi fisik sebesar 99,06 persen yang disebabkan kondisi force mayor terjadinya kerusuhan demo di Jakarta sehingga kegiatan pameran Kriya Nusa tidak dapat terlaksana. Untuk belanja operasi diluar belanja pegawai tahun 2025 sebesar 92 persen atau Rp 12.201.126.181,- dari jumlah pagu anggaran Rp. 13.261.731.531,-.

### **4.2 UPAYA PERBAIKAN AKUNTABILITAS KINERJA DIMASA YANG AKAN DATANG**

Dari Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2025, terdapat beberapa rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan upaya perbaikan dimasa yang akan datang, yakni :



### Perencanaan Kinerja

Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Lanjut
Dokumen rencana aksi agar menjabarkan kegiatan atau aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada PK.	Melakukan penyelarasan rencana aksi dalam pencapaian kinerja pada PK
Dokumen realisasi rencana aksi seluruh unit kerja/bidang agar memuat kendala/hambatan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada PK.	Memuat kendala/hambatan pada rencana aksi seluruh unit kerja/bidang dalam pencapaian target pada PK.
Melengkapi dokumen hasil pantauan capaian kinerja organisasi yang dilaksanakan secara berkala	Melengkapi dokumen rapat bulanan dalam melakukan pemantauan capaian kinerja.

### Pengukuran Kinerja

Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Lanjut
Melaksanakan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang pada seluruh level organisasi.	Telah dilakukan inovasi dalam pengumpulan data capaian kinerja melalui google sheet dari eselon 2 sampai ke level staf yang bisa diakses kapan saja sehingga pemantauan lebih efektif. Untuk kedepannya pengukuran kinerja pada es 2 sampai es 3 beserta fungsional madya dipimpin oleh kadis setiap bulannya dan pengukuran kinerja secara berkala setiap bulan dari es 4, fungsional tertentu, sampai staf dipimpin oleh es 3 masing-masing yang dapat didokumentasikan.
Melengkapi hasil monitoring pengukuran kinerja dengan kendala/hambatan pencapaian kinerja serta upaya pencapaian target kinerja.	Memuat kendala/hambatan pada dalam pencapaian target pada PK dan upaya dalam pencapaian target kinerja pada rapat-rapat evaluasi yang dituangkan dalam notulen rapat.



Terus berupaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh unit/satuan kerja dan pegawai atas hasil pengukuran kinerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Disetiap rapat pimpinan/kadis menegaskan terkait kinerja dan capaiannya mulai dari es 3 sampai staf kepada seluruh ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li><li>2. Melakukan desk capaian kinerja per bidang dan UPTD yang dihadiri oleh ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li><li>3. Masing-masing ASN melakukan pengisian realisasi rencana aksi per TW dan melakukan pengisian capaian kinerja tiap bulannya</li></ol>
--	--

### **Pelaporan Kinerja**

<b>Rekomendasi LHE 2025</b>	<b>Rencana Aksi Lanjut</b>
Informasi dalam Laporan Kinerja agar menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian indikator kinerja secara menyeluruh (orang, anggaran, mekanisme/SOP)	Laporan Kinerja akan menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian indikator kinerja secara menyeluruh (orang, anggaran, mekanisme/SOP)
Informasi dalam laporan kinerja agar menjadi perhatian pegawai dengan dilibatkannya seluruh pegawai dalam rapat evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala.	Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyusunan Renja dan Renja Perubahan, Perubahan Perjanjian Kinerja 2025, dan Perjanjian Kinerja 2026.

### **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

<b>Rekomendasi LHE 2025</b>	<b>Rencana Aksi Lanjut</b>
Dokumentasi evaluasi internal yang dilaksanakan agar menampilkan alternatif perbaikan pencapaian target organisasi.	Melakukan pemantauan kinerja mulai dari tingkat eselon 2 sampai staf secara berkala dan mendokumentasikannya
Hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP agar ditindaklanjuti dengan dokumen yang sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut.	Akan melakukan tindak lanjut dengan dokumen yang sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP dan Biro Organisasi

# LAMPIRAN

# Perjanjian Kinerja

## Eselon 2



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Aur No. 1, Telp./Fax. 0751 - 891566, Kode Pos 25113 Padang  
<https://disperindag.sumbarprov.go.id>. lg : @disperindag\_sumbar  
email : [disperindag@sumbarprov.go.id](mailto:disperindag@sumbarprov.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Novrial, SE, MA. Ak**  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Sumatera Barat

**Selanjutnya disebut pihak Pertama**

Nama : **Mahyeldi**  
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

**Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA**  
Gubernur Sumatera Barat

  
**MAHYELDI**

Padang, Januari 2025  
**PIHAK PERTAMA**

  
**NOVRIAL, SE, MA. Ak**  
NIP. 19661105 199403 1 005

**PERJANJIAN KINERJA**

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah di Sumatera Barat	1.1 Jumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah (unit usaha)	58.803
2.	Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah	2.1 Nilai produksi industri kecil dan menengah (Rp triliun)	30,00
3.	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	3.1 Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp triliun)	53,43
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	4.1. Nilai akuntabilitas kinerja OPD	A (80,25)
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	5.1. Tingkat kepuasan terhadap organisasi	Baik (87,21)

NO.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 6.320.878.126,14	APBD
2.	Program Pengendalian Icin Usaha Industri	Rp. 18.140.000,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 177.170.000,00	APBD
4.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 1.084.043.960,00	APBD
5.	Program Penggunaan dan Pemesaran Produk Dalam Negeri	Rp. 1.949.250.110,00	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 21.137.361.644,85	APBD
7.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Rp. 985.461.000,00	APBN
8.	Program Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 151.358.000,00	APBN
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 32.434.662.841,00</b>	

Padang, Januari 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT



**MAHYELDI**

KEPALA DINAS



**NOVRIAH, SE, MCAk**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681105 199403 1 005

# Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

# BERITA RESMI STATISTIK

No. 12/02/13/Th. XXIX 05 Februari 2026

---



## Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV-2025

- Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2025 Tumbuh 0,39 Persen (*q-to-q*)
  - Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2025 Tumbuh 1,69 Persen (*y-on-y*)
  - Ekonomi Sumatera Barat hingga Triwulan IV-2025 Tumbuh 3,37 Persen (*c-to-c*)
-

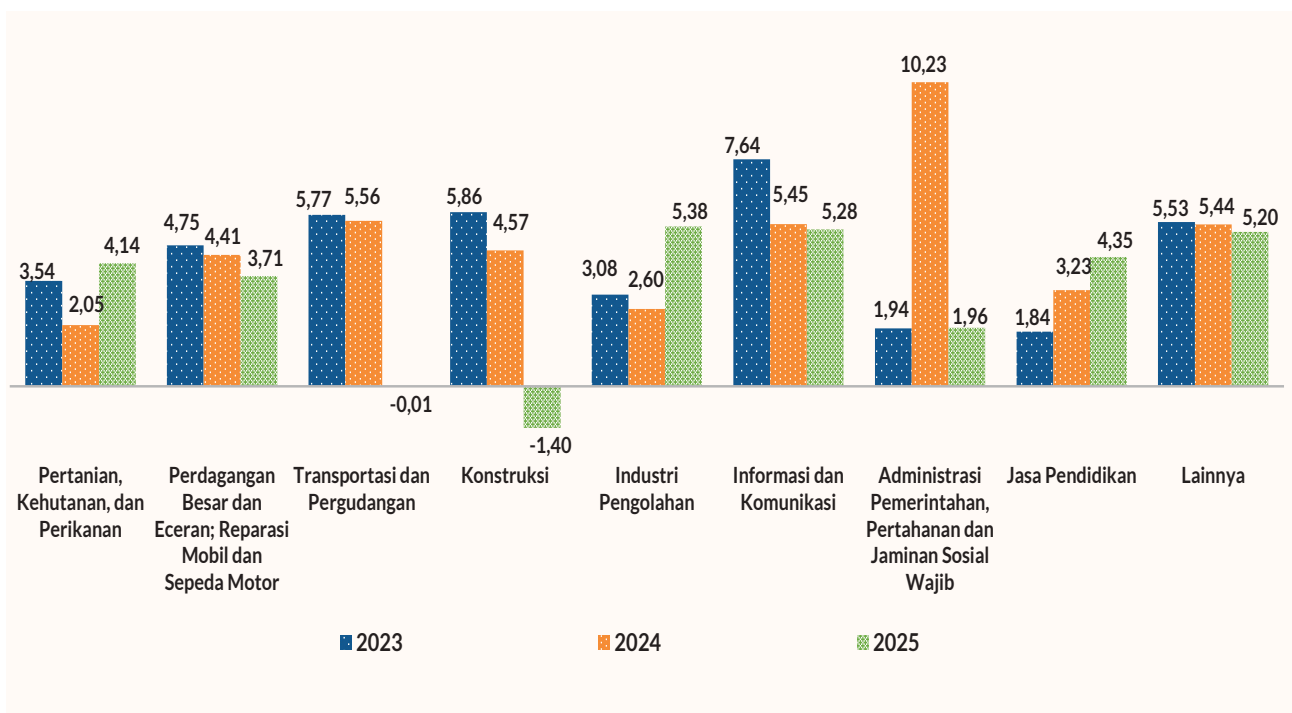


- Perekonomian Sumatera Barat pada 2025 dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 89,27 triliun rupiah dan atas harga konstan 2010 mencapai 51,85 triliun rupiah.
- Perekonomian Sumatera Barat tahun 2025 tumbuh sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,37 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 8,50 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Impor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 34,15 persen. Perlu diperhatikan bahwa komponen ini merupakan pengurang PDRB.
- Perekonomian Sumatera Barat triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,69 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Keuangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,58 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Impor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 71,00 persen. Perlu diperhatikan bahwa komponen ini merupakan pengurang PDRB.
- Perekonomian Sumatera Barat triwulan IV-2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,39 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,98 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,60 persen.

# A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

## 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025 (c-to-c)

Ekonomi Sumatera Barat tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 3,37 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Lainnya sebesar 8,50 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,09 persen. Sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 4,14 persen. kemudian Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 3,71 persen. Sedangkan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi mengalami kontraksi sebesar 0,01 persen dan 1,40 persen.

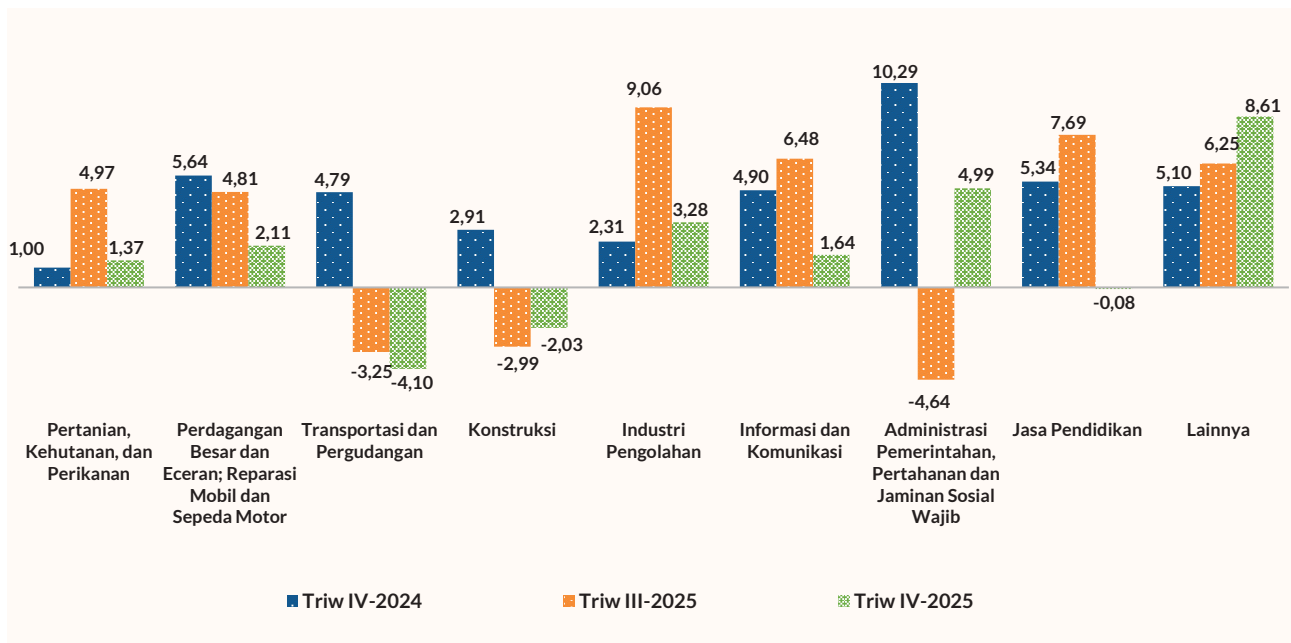


**Gambar 1** Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen), 2023-2025

Struktur PDRB Sumatera Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Barat didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,12 persen; diikuti oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,65 persen; Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,68 persen; Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 9,47 persen; dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan 8,55 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Barat mencapai 67,47 persen.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan IV-2024 (y-on-y)

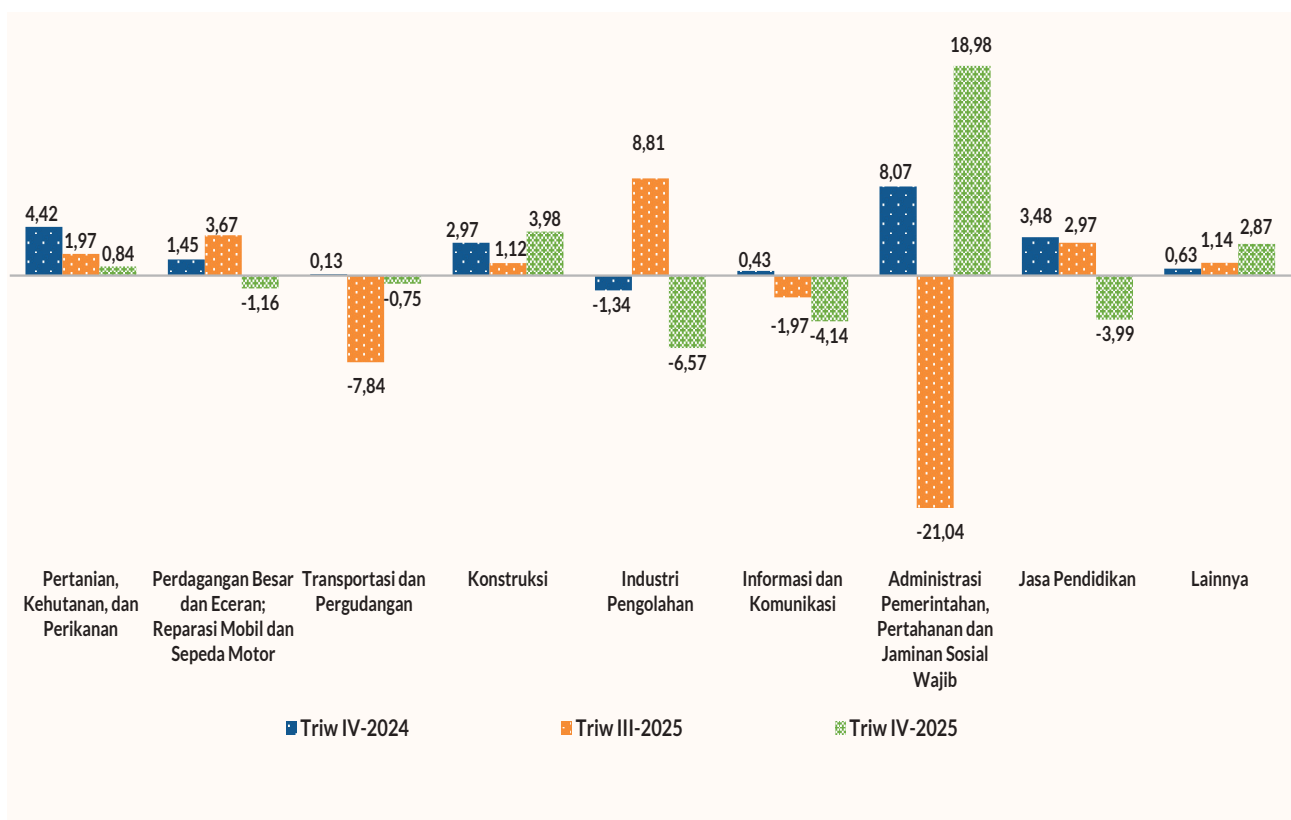
Ekonomi Sumatera Barat pada triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 1,69 persen (y-on-y) dibanding triwulan IV-2024. Lapangan usaha Jasa Keuangan serta lapangan usaha Jasa Lainnya, secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi, yaitu sebesar 15,58 persen dan 11,96 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,66 persen, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,63 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 1,37 persen. Adapun, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 2,11 persen, sementara Transportasi dan Pergudangan terkontraksi sebesar 4,10 persen, dan Konstruksi juga mengalami kontraksi sebesar 2,03 persen.



**Gambar 2** Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen), Triwulan IV-2024, Triwulan III-2025, dan Triwulan IV-2025

### 3. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan III-2025 (q-to-q)

Ekonomi Sumatera Barat sampai dengan triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 0,39 persen (q-to-q). Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi, yaitu sebesar 18,98 persen dan 9,98 persen, diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,83 persen. Sebaliknya Lapangan usaha Industri Pengolahan dan Informasi dan Komunikasi terkontraksi dalam, yaitu sebesar 6,57 persen dan 4,14 persen. Sementara itu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 0,84 persen. Adapun lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terkontraksi sebesar 1,16 persen, serta lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terkontraksi sebesar 0,75 persen.

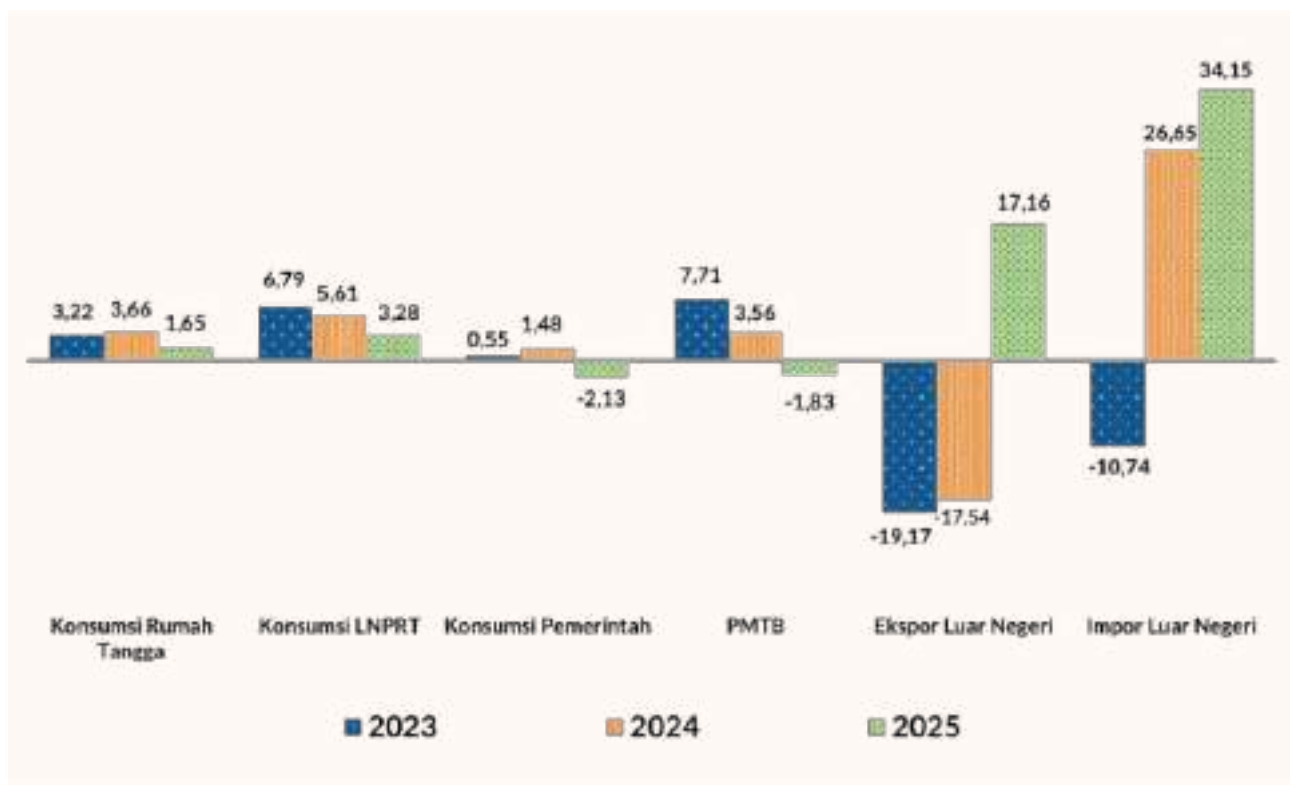


**Gambar 3** Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen), Triwulan IV-2024, Triwulan III-2025, dan Triwulan IV-2025

## B. PDRB Menurut Pengeluaran

### 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025 (c-to-c)

Ekonomi Sumatera Barat tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 3,37 persen. Pada tahun ini, komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen Impor Luar Negeri sebesar 34,15 persen, namun perlu diingat bahwa komponen ini adalah komponen pengurang PDRB. Komponen lain yang mengalami pertumbuhan yaitu komponen Ekspor Luar Negeri yang mengalami pertumbuhan sebesar 17,16 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,28 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan sebesar 1,65 persen. Adapun komponen yang mengalami kontraksi yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,13 persen, dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,83 persen.

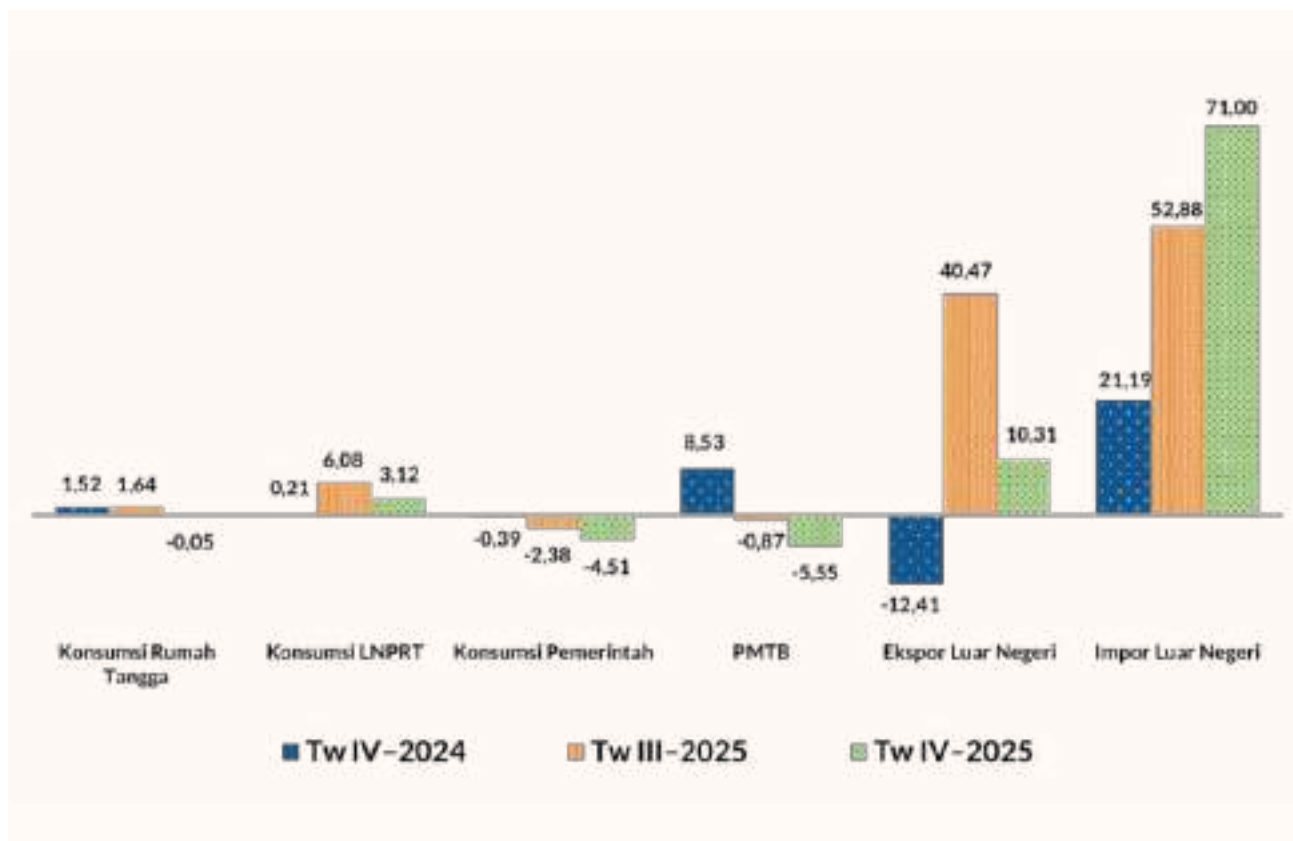


**Gambar 4** Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen), 2023-2025

Struktur PDRB Sumatera Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku 2025 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Barat, yaitu sebesar 51,50 persen, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 28,51 persen, komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 13,34 persen, komponen PK-P sebesar 8,79 persen, dan komponen PK-LNPRT sebesar 1,06 persen. Sementara itu, komponen Impor Luar Negeri sebagai pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 3,09 persen.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan IV-2024 (y-on-y)

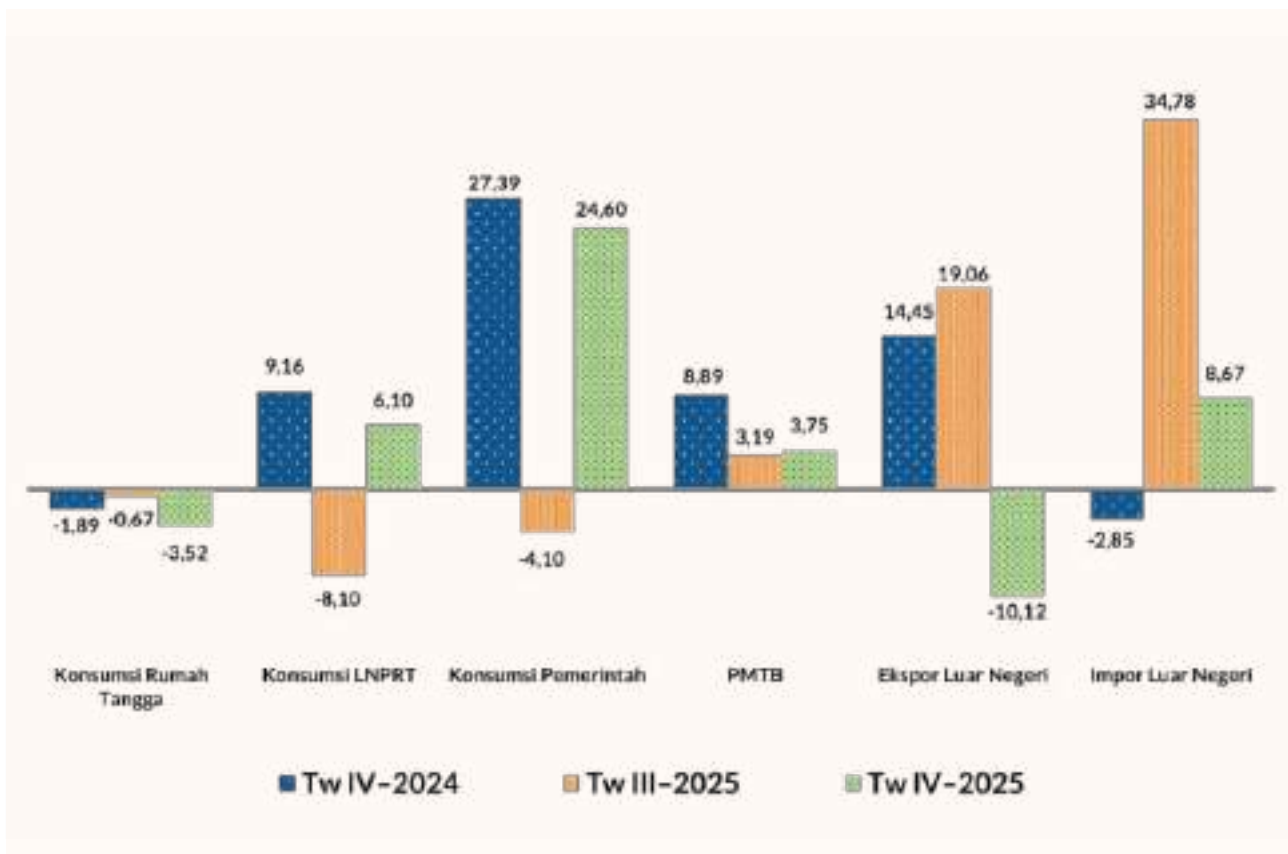
Ekonomi Sumatera Barat triwulan IV-2025 dibandingkan dengan triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,69 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen Impor Luar Negeri yaitu sebesar 71,00 persen. Perlu diingat bahwa komponen ini adalah faktor pengurang PDRB. Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 10,31 persen, komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 3,12 persen. Sebaliknya, komponen yang mengalami kontraksi yaitu komponen PK-RT terkontraksi sebesar 0,05 persen, komponen PK-P sebesar 4,51 persen, dan komponen PMTB yang terkontraksi sebesar 5,55 persen.



Gambar 5 Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen), Triwulan IV-2024, Triwulan III-2025, dan Triwulan IV-2025

### 3. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan III-2025 (*q-to-q*)

Ekonomi Sumatera Barat pada triwulan IV-2025 dibanding triwulan III-2025 tumbuh sebesar 0,39 persen. Pertumbuhan tertinggi adalah komponen PK-P sebesar 24,60 persen, diikuti oleh komponen Impor luar negeri sebesar 8,67 persen. Namun perlu diingat bahwa komponen impor luar negeri merupakan komponen pengurang PDRB. Selanjutnya komponen yang juga mengalami pertumbuhan adalah komponen PK-LNPRT sebesar 6,10 persen dan komponen PMTB sebesar 3,75 persen. Sementara itu, komponen yang mengalami kontraksi adalah komponen PK-RT sebesar 3,52 persen dan komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 10,12 persen.



**Gambar 6** Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Komponen Pengeluaran (*q-to-q*) (persen), Triwulan IV-2024, Triwulan III-2025, dan Triwulan IV-2025

## C. PDRB Pulau Sumatera

Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada tahun 2025 didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 23,54 persen, diikuti Riau sebesar 22,88 persen, Sumatera Selatan sebesar 13,71 persen, Lampung sebesar 9,98 persen, Kepulauan Riau sebesar 7,27 persen, Jambi sebesar 6,66 persen, Sumatera Barat sebesar 6,71 persen, Aceh sebesar 4,90 persen, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,22 persen, dan Provinsi Bengkulu sebesar 2,13 persen.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 6,94 persen, diikuti Sumatera Selatan sebesar 5,35 persen, Lampung sebesar 5,28 persen, Jambi sebesar 4,93 persen, Bengkulu sebesar 4,80 persen, Riau sebesar 4,79 persen, Sumatera Utara sebesar 4,53 persen, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,09 persen, Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, dan Aceh 2,97 persen.



Gambar 7 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Sumatera (persen), 2025

**Tabel 1 PDRB Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah), 2023–2025**

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	65,80	71,16	77,91	41,61	42,47	44,23
B. Pertambangan dan Penggalian	12,76	12,91	13,28	7,37	7,66	7,73
C. Industri Pengolahan	26,30	27,87	30,11	17,44	17,89	18,86
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,29	0,30	0,30	0,19	0,20	0,20
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,29	0,31	0,19	0,20	0,20
F. Konstruksi	31,76	33,56	33,34	17,58	18,38	18,13
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	51,70	54,98	58,63	32,03	33,57	34,64
H. Transportasi dan Pergudangan	35,35	37,00	37,60	20,13	21,25	21,25
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,29	4,57	4,82	2,19	2,31	2,39
J. Informasi dan Komunikasi	21,01	22,19	23,29	17,12	18,05	19,00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,63	10,25	11,14	5,64	5,98	6,43
L. Real Estat	6,50	6,96	7,47	3,90	4,13	4,37
M,N. Jasa Perusahaan	1,37	1,43	1,50	0,85	0,90	0,94
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19,90	22,03	22,49	10,12	11,02	11,42
P. Jasa Pendidikan	14,00	14,73	15,85	7,89	8,14	8,50
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,310	5,72	6,28	3,21	3,39	3,67
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,59	7,18	7,86	3,61	3,87	4,20
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>312,81</b>	<b>333,15</b>	<b>352,19</b>	<b>191,07</b>	<b>199,42</b>	<b>206,14</b>

**Tabel 2 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha (persen), Triwulan III-2025 dan Triwulan IV-2025**

Lapangan Usaha	Triw III-2025 Terhadap Triw II-2025 (q-to-q)	Triw IV-2025 Terhadap Triw III-2025 (q-to-q)	Triw III-2025 Terhadap Triw III-2024 (y-on-y)	Triw IV-2025 Terhadap Triw IV-2024 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2025	Sumber Pertumbuhan 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,97	0,84	4,97	1,37	4,14	0,88
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,14	1,46	-1,75	-2,62	0,95	0,04
C. Industri Pengolahan	8,81	-6,57	9,06	3,28	5,38	0,48
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-2,02	5,83	-1,78	2,63	0,85	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,37	-2,28	0,23	-2,95	0,38	0,00
F. Konstruksi	1,12	3,98	-2,99	-2,03	-1,40	-0,13
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,67	-1,16	4,81	2,11	3,71	0,62
H. Transportasi dan Pergudangan	-7,84	-0,75	-3,25	-4,10	-0,01	0,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,84	1,46	2,31	6,63	3,22	0,04
J. Informasi dan Komunikasi	-1,97	-4,14	6,48	1,64	5,28	0,48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,80	5,01	6,51	15,58	7,55	0,23
L. Real Estat	2,96	-1,01	6,62	4,09	5,78	0,12
M,N. Jasa Perusahaan	5,94	-0,49	6,30	4,72	5,22	0,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-21,04	18,98	-4,64	4,99	1,96	0,11
P. Jasa Pendidikan	2,97	-3,99	7,69	-0,08	4,35	0,18
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,82	9,98	6,93	11,66	8,09	0,14
Jasa Lainnya	-2,94	1,70	10,10	11,96	8,50	0,16
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,39</b>	<b>3,36</b>	<b>1,69</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya  
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya  
c-to-c: PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan tertentu dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

**Tabel 3 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha (persen), 2023–2025**

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,54	2,05	4,14	21,04	21,36	22,12
B. Pertambangan dan Penggalian	4,65	3,97	0,95	4,08	3,87	3,77
C. Industri Pengolahan	3,08	2,60	5,38	8,41	8,37	8,55
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,16	4,40	0,85	0,09	0,09	0,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,73	3,32	0,38	0,09	0,09	0,09
F. Konstruksi	5,86	4,57	-1,40	10,15	10,07	9,47
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,75	4,41	3,71	16,53	16,50	16,65
H. Transportasi dan Pergudangan	5,77	5,56	-0,01	11,30	11,11	10,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,71	5,37	3,22	1,37	1,37	1,37
J. Informasi dan Komunikasi	7,64	5,45	5,28	6,72	6,66	6,61
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,78	6,06	7,55	3,08	3,08	3,16
L. Real Estat	6,32	5,87	5,78	2,08	2,09	2,12
M,N. Jasa Perusahaan	6,88	4,72	5,22	0,44	0,43	0,43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,94	10,23	1,96	6,36	6,61	6,38
P. Jasa Pendidikan	1,84	3,23	4,35	4,47	4,42	4,50
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,29	5,60	8,09	1,70	1,72	1,78
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,06	7,27	8,50	2,11	2,16	2,23
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>4,62</b>	<b>4,37</b>	<b>3,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4 PDRB Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran (triliun rupiah), 2023–2025**

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	162,92	173,05	181,37	93,52	96,95	98,55
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,26	3,52	3,72	2,10	2,22	2,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	29,40	30,80	30,94	17,20	17,46	17,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	92,52	97,83	100,40	55,33	57,30	56,25
5. Perubahan Inventori	-0,85	-0,32	-0,36	-0,52	-0,19	-0,21
6. Ekspor Luar Negeri	36,90	35,47	47,00	23,38	19,28	22,59
7. Impor Luar Negeri <sup>1)</sup>	6,82	8,28	10,87	3,72	4,72	6,33
8. Net Ekspor Antar Daerah	-4,53	1,06	-0,01	3,78	11,13	15,92
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>312,81</b>	<b>333,15</b>	<b>352,19</b>	<b>191,07</b>	<b>199,42</b>	<b>206,14</b>

Keterangan: <sup>1)</sup> Impor Luar Negeri merupakan komponen pengurang

**Tabel 5 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen Pengeluaran (persen), Triwulan III-2025 dan Triwulan IV-2025**

Komponen	Triw III-2025 Terhadap Triw II-2025 (q-to-q)	Triw IV-2025 Terhadap Triw III-2025 (q-to-q)	Triw III-2025 Terhadap Triw III-2024 (y-on-y)	Triw IV-2025 Terhadap Triw IV-2024 (y-on-y)	Laju pertumbuhan 2025	Sumber Pertumbuhan 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,67	-3,52	1,64	-0,05	1,65	0,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-8,10	6,10	6,08	3,12	3,28	0,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-4,10	24,60	-2,38	-4,51	-2,13	-0,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,19	3,75	-0,87	-5,55	-1,83	-0,53
5. Perubahan Inventori	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6. Ekspor Luar Negeri	19,06	-10,12	40,47	10,31	17,16	1,66
7. Impor Luar Negeri <sup>1)</sup>	34,78	8,67	52,88	71,00	34,15	0,81
8. Net Ekspor Antar Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,39</b>	<b>3,36</b>	<b>1,69</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

c-to-c: PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan tertentu dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

<sup>1)</sup> Impor Luar Negeri merupakan komponen pengurang

**Tabel 6 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen Pengeluaran (persen), 2023–2025**

Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,22	3,66	1,65	52,08	51,95	51,5
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,79	5,61	3,28	1,04	1,06	1,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,55	1,48	-2,13	9,40	9,25	8,79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,71	3,56	-1,83	29,58	29,37	28,51
5. Perubahan Inventori	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6. Ekspor Luar Negeri	-19,17	-17,54	17,16	11,79	10,65	13,34
7. Impor Luar Negeri <sup>1)</sup>	-10,74	26,65	34,15	2,18	2,49	3,09
8. Net Ekspor Antar Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>4,62</b>	<b>4,37</b>	<b>3,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: <sup>1)</sup> Impor Luar Negeri merupakan komponen pengurang

**Tabel 7 Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera (persen), Triwulan III-2025 dan Triwulan IV-2025**

Provinsi	Triw III-2025 Terhadap Triw II-2025 (q-to-q)	Triw IV-2025 Terhadap Triw III-2025 (q-to-q)	Triw III-2025 Terhadap Triw III-2024 (y-on-y)	Triw IV-2025 Terhadap Triw IV-2024 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2025	Sumber Pertumbuhan 2025
	(2)	(3)	(4)	(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	1,71	-0,05	4,46	-1,61	2,97	0,03
2. Sumatera Utara	2,11	0,13	4,55	4,23	4,53	0,22
3. Sumatera Barat	-0,11	0,39	3,36	1,69	3,37	0,05
4. Riau	3,54	0,12	4,98	4,94	4,79	0,21
5. Jambi	2,21	1,30	4,82	5,24	4,93	0,07
6. Sumatera Selatan	2,25	-1,53	5,20	5,54	5,35	0,16
7. Bengkulu	-2,98	3,34	4,56	4,79	4,80	0,02
8. Lampung	0,69	-3,05	5,04	5,54	5,28	0,11
9. Kepulauan Bangka Belitung	-1,75	4,87	3,16	4,54	4,09	0,02
10. Kepulauan Riau	0,85	7,35	7,48	7,89	6,94	0,11
<b>Sumatera</b>	<b>1,81</b>	<b>0,36</b>	<b>4,90</b>	<b>4,54</b>	<b>4,81</b>	<b>1,00</b>

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya  
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya  
c-to-c: PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan tertentu dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

# PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BARAT TRIWULAN IV-2025



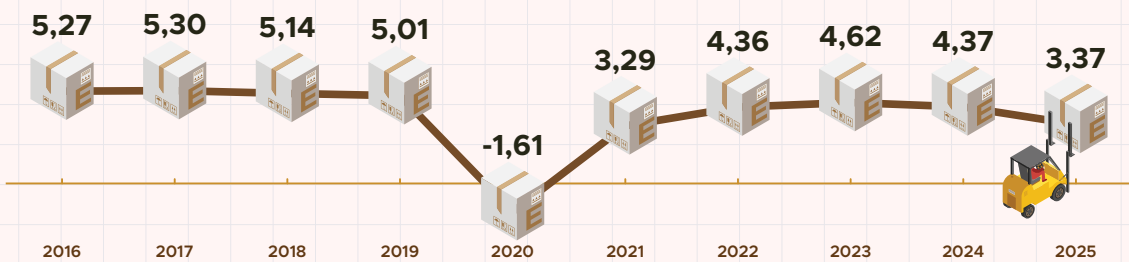
Berita Resmi Statistik No. 12/02/13/Th. XXIX, 5 Februari 2026

**Q-TO-Q** 0,39%   
 **Y-ON-Y** 1,69%   
 **C-TO-C** 3,37%   
 **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) HARGA BERLAKU** **Rp89,27 triliun**

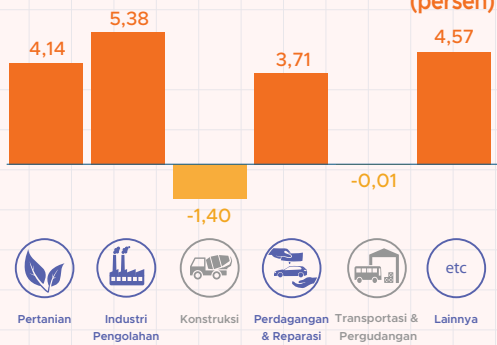
**PDRB PER KAPITA 2025**  
**Rp59,55 juta (US\$3.614,56)**



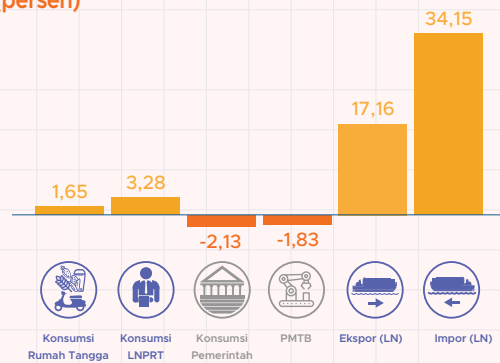
## PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 2016–2025 (persen)



## PERTUMBUHAN PRDB MENURUT LAPANGAN USAHA (persen)

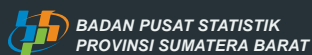
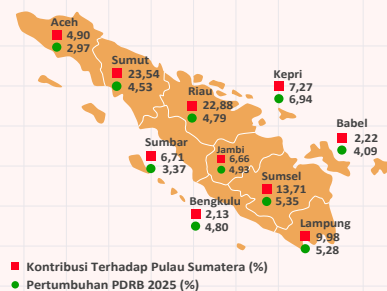


## PERTUMBUHAN PRDB MENURUT PENGELUARAN (persen)



## PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB DI PULAU SUMATERA

Sumatera Barat menyumbang 6,71% terhadap perekonomian di Pulau Sumatera dan hanya 1,49% terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat merupakan urutan ke-9 dibanding provinsi lain di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera, yaitu Kepulauan Riau serta yang terendah yaitu Aceh.



sumbar.bps.go.id

BPS Provinsi Sumatera Barat

BPS Provinsi Sumatera Barat

@bpssumbar

Gambar 8 Infografis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat, Triwulan IV-2025



Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:



**Nurul Hasanudin, S.ST., M.Stat.**  
Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat

☎ (0751) 442158, 442159

✉ nurulh@bps.go.id

Untuk layanan perpustakaan, penjualan data mikro, publikasi elektronik, publikasi cetakan, dan peta digital wilayah kerja statistik sesuai peraturan yang berlaku maupun konsultasi statistik dapat menghubungi Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)

Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No.48 Padang, Sumatera Barat 25135, Telp (0751) 442158, 442160

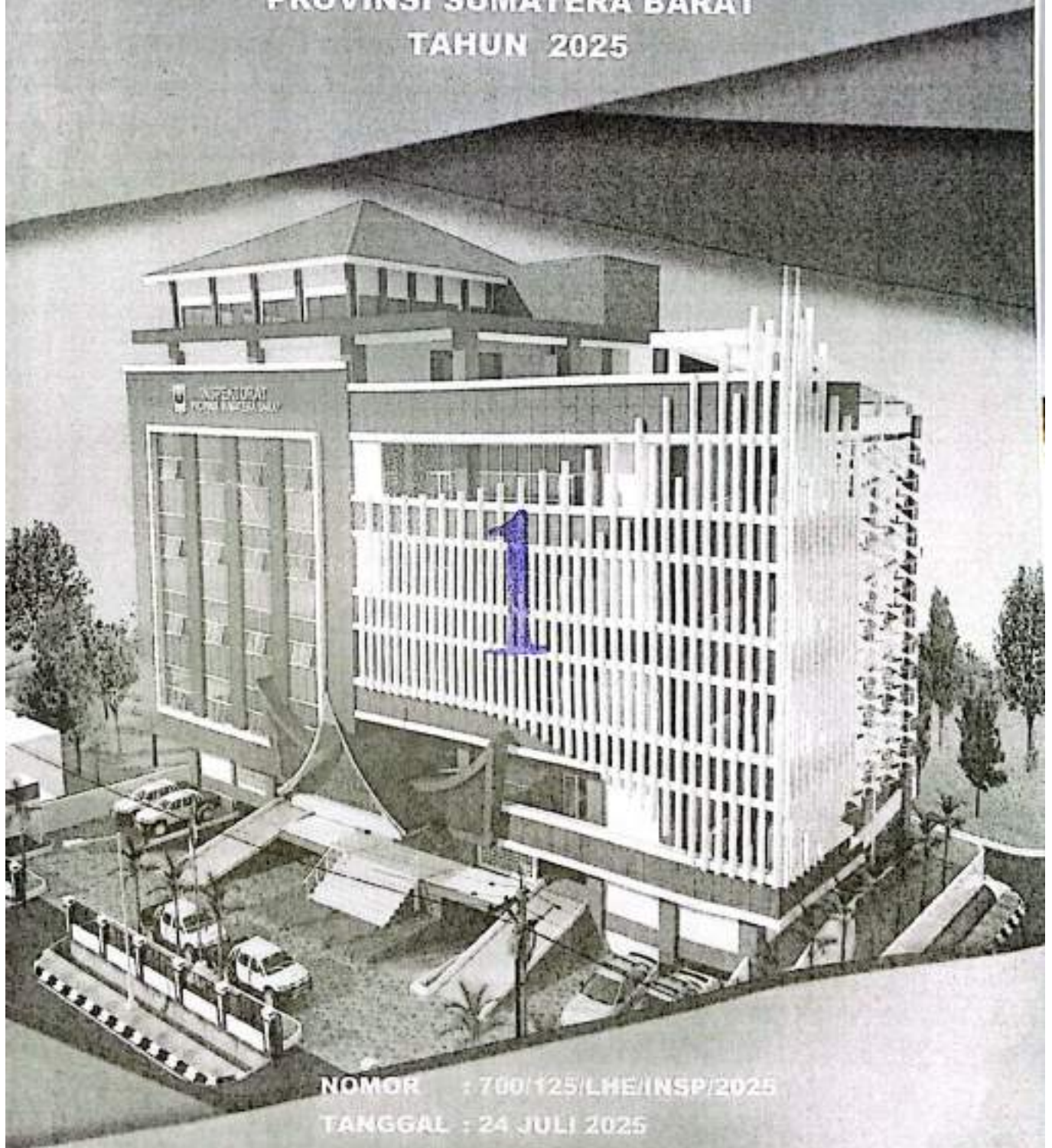
Homepage : <http://sumbar.bps.go.id>

E-mail : [sumbar1300@bps.go.id](mailto:sumbar1300@bps.go.id)



**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025**



**NOMOR : 700/125/LHE/INSP/2025  
TANGGAL : 24 JULI 2025**



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841  
e-mail : itprovsumbar@gmail.com

## HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
SATUAN/UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TAHUN : 2025

### I. PENDAHULUAN

#### A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-177-2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
7. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor ST-700/110/INSP/2025 tanggal 19 Mei 2025.

#### B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya; dan
6. Periode Evaluasi Tahun 2025.

### E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal 19 Mei s.d 20 Juni 2025.

### F. Susunan Tim Evaluasi

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Penanggung Jawab       | : Andri Yulika   |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Alfianori  |
| 3. Pengendali Teknis      | : Megah Vivyawati  |
| 4. Ketua Tim              | 1) Jelita Alamsyah<br>2) Dewi Selvie<br>3) Fakhru Rozi   |
| 5. Anggota                | 1) Khairul<br>2) G.B. Butet Lubis<br>3) Yanti JasVia<br>4) Viranita Arief<br>5) Yunhesvo Melya<br>6) Ranita Jasman<br>7) Jelly Nostiva<br>8) Egi Kurniawan<br>9) Mutia Ramatri |

### G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

## H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

### 1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas.
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian dan Perdagangan dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

### 3. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	<b>Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu

A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan memperoleh nilai 80,29 dengan kategori A (Memuaskan) dengan uraian berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	26,72
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,32
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75
4.	Evaluasi Internal	25,00	16,50
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		80,29
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

### 1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar 26,72 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra), dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKT dan PK), dokumen perencanaan aktivitas dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja telah diformalkan dan dipublikasikan.
- b. Tujuan/Sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran dan target telah memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevan dan terukur*).
- c. Target yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja (PK) Tahun 2024 dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata capaian sebesar 109,26%
- d. Seluruh pegawai telah merumuskan perencanaan kinerja.
- e. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk perencanaan kinerja sebagai berikut:
  - 1) Dokumen rencana aksi belum seluruhnya menjabarkan kegiatan atau aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada PK.
  - 2) Aktivitas realisasi rencana aksi belum seluruhnya memuat kendala/hambatan pencapaian target kinerja.
  - 3) Pantauan capaian kinerja organisasi belum dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap

### 2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 24,32 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan pedoman teknis pengukuran data kinerja yang dituangkan dalam SOP dan telah menggambarkan mekanisme yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- d. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan E-Sakip dan Dashboard Pembangunan.
- e. Catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk perencanaan kinerja yaitu:
  - 1) Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh level organisasi.
  - 2) Dokumen notulen hasil monitoring pengukuran kinerja belum menjabarkan kendala/hambatan pencapaian kinerja hanya fokus kepada realisasi program/kegiatan
  - 3) Setiap unit/satuan kerja dan pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

### 3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 12,75 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sudah disusun, diformalkan, direviu dan dipublikasikan.
- b. Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah menginformasikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan, dengan tahun sebelumnya, target jangka menengah dan level nasional serta telah menginfokan keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja
- d. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut:
  - 1) Laporan Kinerja belum mengungkapkan efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian indikator kinerja secara menyeluruh (orang, anggaran, mekanisme/SOP)
  - 2) Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian pegawai karena belum dilibatkannya seluruh pegawai dalam rapat evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala.

### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran evaluasi akuntabilitas kinerja Internal sebesar 16,50 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dituangkan dalam SOP.
- b. Pemantauan capaian kinerja telah dilaksanakan pada seluruh unit/bidang sampai dengan level staf, hal ini dapat dilihat dari realisasi rencana aksi, pengukuran PK dan laporan pemantauan masing-masing bidang.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah sebagai berikut:
  - 1) Dokumentasi evaluasi internal yang dilaksanakan belum menampilkan alternatif perbaikan pencapaian target organisasi.
  - 2) Hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan dokumen yang sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut.

### B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan direkomendasikan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen rencana aksi agar menjabarkan kegiatan atau aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada PK.
- b. Dokumen realisasi rencana aksi seluruh unit kerja/bidang agar memuat kendala/hambatan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada PK.

- c. Melengkapi dokumen hasil pantauan capaian kinerja organisasi yang dilaksanakan secara berkala.
2. **Pengukuran Kinerja.**
    - a. Melaksanakan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang pada seluruh level organisasi.
    - b. Melengkapi hasil monitoring pengukuran kinerja dengan kendala/hambatan pencapaian kinerja serta upaya pencapaian target kinerja.
    - c. Terus berupaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh unit/satuan kerja dan pegawai atas hasil pengukuran kinerja
  3. **Pelaporan Kinerja.**
    - a. Informasi dalam Laporan Kinerja agar menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian indikator kinerja secara menyeluruh (orang, anggaran, mekanisme/SOP)
    - b. Informasi dalam laporan kinerja agar menjadi perhatian pegawai dengan dilibatkannya seluruh pegawai dalam rapat evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala.
  4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
    - a. Dokumentasi evaluasi internal yang dilaksanakan agar menampilkan alternatif perbaikan pencapaian target organisasi.
    - b. Hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP agar ditindaklanjuti dengan dokumen yang sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**PIH. INSPEKTUR**  
  
**ANDRI YULIKA, SH, M.Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19721026-199701 1 003

- c. Melengkapi dokumen hasil pantauan capaian kinerja organisasi yang dilaksanakan secara berkala.
2. **Pengukuran Kinerja.**
    - a. Melaksanakan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang pada seluruh level organisasi.
    - b. Melengkapi hasil monitoring pengukuran kinerja dengan kendala/hambatan pencapaian kinerja serta upaya pencapaian target kinerja.
    - c. Terus berupaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh unit/satuan kerja dan pegawai atas hasil pengukuran kinerja
  3. **Pelaporan Kinerja.**
    - a. Informasi dalam Laporan Kinerja agar menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian indikator kinerja secara menyeluruh (orang, anggaran, mekanisme/SOP)
    - b. Informasi dalam laporan kinerja agar menjadi perhatian pegawai dengan dilibatkannya seluruh pegawai dalam rapat evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala.
  4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
    - a. Dokumentasi evaluasi internal yang dilaksanakan agar menampilkan alternatif perbaikan pencapaian target organisasi.
    - b. Hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP agar ditindaklanjuti dengan dokumen yang sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Pt. INSPEKTUR**



**ANDRI YULIKA, SH, M.Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19721026 199701 1 003

**PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PER  
RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Tahun 2025**

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	1371034904830004	Yolly Herradia	4	4	3	4	4	3	4	4	4
2	1371090802890005	Radiyan	3	3	3	4	3	3	4	3	4
3	1404126909010002	ARTIVA DWI PUTRI	3	3	3	4	3	3	3	3	4
4	3374022805940006	Rudolf Valentino	4	3	3	4	4	4	4	4	4
5	1371062805800001	Herry salim	3	4	3	4	4	4	4	4	4
6	1371111708970011	Rahaka Panji Prawira	4	3	2	4	3	3	3	3	4
7	1371064205820017	Khris Murti Diana Harefa	3	3	3	4	3	3	3	3	3
8	1371014507960002	Monica Elisia	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	1304033003890002	Dike Putra Ganda	4	4	3	4	3	3	4	3	4
10	1371062203720003	Darmansyah Bustamam	4	4	3	4	4	4	4	4	4
11	1310055703010001	Nadila Stevenia	2	1	2	1	2	2	2	1	2
12	1303036706910001	Ayu Sartika	1	4	4	4	4	3	3	3	4
13	1306041506920003	YUDA PRIMA PUTRA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	1771082606810002	Eka maritin	4	4	4	4	3	3	4	3	4
15	1371114512890010	Admiriska stefany	4	4	3	4	4	4	4	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
16	1306025908060005	Nabila Hendrika	3	3	3	3	4	3	3	4	4
17	1307085103930002	YULIATI	3	3	3	4	3	4	4	4	4
18	1376015106840001	Yone Yurika	3	3	3	4	3	3	3	3	3
19	1307094404750003	Haltis tanti	3	3	3	2	3	3	3	3	3
20	1372015408910121	Rosa gusmaria	4	3	3	3	4	4	3	4	4
21	1376035611920001	Siti Rahmami	3	3	3	3	4	4	4	4	4
22	1306150504770001	Adril	3	4	3	4	4	4	4	3	4
23	1305021411760001	Weri Nova Afandi	3	3	3	3	3	3	3	2	3
24	1771086204810002	Nandia raseki	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	1371114604870007	Nilla Averiza	3	3	4	4	4	4	4	3	4
26	1371011107750008	Hermansyah	3	3	3	4	3	3	4	2	3
27	1371060712990012	Rozy Saputra	4	3	3	4	3	4	3	3	3
28	1371040606780008	Syugara Rio isato	4	3	4	4	3	3	4	3	4
29	1371104105830002	Dewi rusfa	4	3	3	3	3	3	4	4	4
30	1304046310970003	Nada Nafion	3	4	3	3	3	4	4	4	4
31	1371104205980004	Tuti Andriani	4	4	3	4	4	4	4	4	4
32	1371110903920021	Adi rahmad raharjo	3	4	2	4	4	4	4	3	4
33	1301012704950003	RISKAL ILHAMI	4	4	3	4	4	4	4	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
34	1306094304850001	HILDA	4	4	4	4	3	4	4	4	4
35	1371094908900006	Dissya Bennaogest	4	3	2	4	4	4	4	2	3
36	1371102410880004	Eka Firman Syafputra	3	4	3	4	4	3	3	2	3
37	1302070608880001	Tommy Putra	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	1371071507850006	Ullia Rahman	4	4	4	4	4	4	4	3	4
39	1371103012940002	Ivan Pratama	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	1503035403000001	ANNISA NADHIFA HELMI	3	3	3	4	3	3	3	3	4
41	1271074606930001	DEWITA IRMA ULINA S	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	3328110706950006	Adfan Marâ€™ie Annur	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	1371040912820011	Anjas insani	2	4	3	4	4	4	4	3	4
44	1371065908800007	Nelvianti	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	1706026010830005	Sri Purwanti	3	4	4	4	4	4	4	4	4
46	1308072505970001	ALDO MAIHENDRA	4	4	3	4	3	4	4	4	4
47	1301097003970002	Dini Wariska	4	4	3	4	4	4	4	4	4
48	1371036307810007	PATRICIA PAT	4	4	3	4	4	4	4	3	4
49	1301055612930003	Dessy Novela	3	3	3	4	3	3	3	3	4
50	1306025703950004	Ike Supriwardi	4	3	3	4	3	3	4	3	4
51	1371096509960011	FADILLA SEPTRIA ZELLI	3	4	4	3	3	4	4	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
52	1371114312970005	Renny Putri	3	3	2	3	3	3	3	2	4
53	1301055004800002	Monariza	3	3	3	4	3	3	4	3	4
54	1305012108910002	Rahmad hidayat	3	3	3	3	3	3	3	3	4
55	082111814988	Yunda Marsela	2	1	1	2	3	2	2	2	3
56	083801723596	Muhammad Fadjri Ramadhan	2	2	3	4	3	3	3	2	2
57	082236315412	Dirli adito	3	2	3	4	3	4	3	3	3
58	081363218884	Yanuardi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	081363701296	NONONG HANUGRAH	3	3	3	3	3	3	3	3	2
60	085704156910	Muhammad Faisal Arief	4	3	3	4	3	3	3	3	4
61	081363279902	Andri Muhamad Zen	3	3	3	4	3	3	3	3	4
62	085376476888	Suci Anugrah, S.Sos.,M.M	3	3	3	4	3	3	3	2	3
63	081374157271	Susi santi	4	4	4	3	4	4	4	4	4
64	081261444425	Jumiati	3	3	3	3	3	3	3	3	4
65	081293484871	Cici Mandasari	3	4	3	4	3	4	4	3	4
66	082371400114	Risnawati	3	3	3	3	3	3	3	3	3
67	089529969169	puteri ramah sahuri	4	3	3	3	3	4	3	3	4
68	081374655120	Yulia nengsih	3	4	4	4	4	4	4	4	4
69	082170593289	Evriboy	4	3	3	4	3	3	3	3	4





No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
106	083187148882	Tahlia Ramadhani	4	4	4	3	3	3	3	4	4
107	089524525142	Zakki Zaidan Ardian	3	3	3	2	3	3	3	3	4
108	081363053644	Leni Marlina	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109	082378764975	Mhd Harris,ST	3	2	3	4	3	3	3	3	4
110	082169668945	Silvia Anggraini	3	3	3	2	2	3	3	3	4
111	085263798173	Zulkhairatullail	4	3	3	4	3	3	3	2	3
112	08126796417	ILHAMDI	3	4	3	4	4	3	3	2	4
113	085271808055	Iret	3	3	2	3	3	3	3	2	3
114	085374058708	DEWI ANGGRAINI	3	3	3	4	3	3	3	3	3
115	085364669191	DINA RAMADINA	3	3	3	4	3	3	3	3	4
116	082181131058	Widia Rosa	4	3	3	4	3	4	4	4	3
117	083177024701	Helmawati	3	4	3	3	3	3	3	4	4
118	089639462929	Mardianis	3	3	3	3	3	3	3	3	3
119	081374220865	Alfaizal	3	3	2	3	3	3	3	2	3
120	089529060911	Wike Zubaidah	3	3	3	3	3	3	3	3	4
121	081371535821	Sri Melda Ayu	4	4	3	4	4	4	4	4	4
122	081270336901	Mira Irma Suryani	3	3	3	4	3	3	2	2	3
123	082384428055	Levy riska	4	3	3	4	3	4	4	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
124	089677744568	rahmi syahfitri	3	2	3	3	3	3	3	3	3
125	081218329919	Muthia Sri Devi	3	3	2	4	3	3	3	3	4
126	082385533282	Dira Irsanti	3	3	3	4	3	3	3	3	4
127	085375077058	Resti aulia	3	3	3	2	3	3	3	3	4
128	081363936683	Heni Setiawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4
129	082390065006	RAHMIATI JHON	3	3	2	2	3	3	3	2	3
130	082384643842	Sofiya yenni	4	4	4	4	4	4	4	4	4
131	085376385252	Yurina kasmayanti	3	3	3	2	3	3	4	4	3
132	088215070606	Sofia	3	3	3	4	3	4	3	3	4
133	081374430410	Ledi sefenti	3	3	3	4	3	3	4	4	4
134	082286975196	Lucy febrina yulman	3	4	4	4	3	3	4	4	4
135	081270574508	Malahayati	3	3	3	4	3	4	4	3	4
136	081363103756	Hendra Yaldi	3	4	4	3	3	3	4	3	4
137	081310818597	Nurainas	3	3	3	3	3	3	4	3	4
138	08126724704	Yelsi Safitri	3	3	2	3	3	3	3	3	4
139	081277471515	Neli Diana	3	3	3	2	3	3	3	3	4
140	0811669870	Ilham yudha putra	4	4	3	3	3	3	3	3	4
141	08126726163	Prof.Dr.apr Amri Bakhtiar,MS, DESS	4	4	4	3	4	3	4	3	4



No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
160	082286075746	Nurul Azizah	4	3	3	4	3	3	3	3	3
161	081374230935	Rrkoesindralina	3	4	3	4	4	4	4	4	3
162	081364679997	Rudolf Valentino	3	3	3	4	3	4	3	4	4
163	081270284780	KHRIS MURTI DIANA HAREFA	4	4	4	4	4	3	4	3	4
164	085375516766	Rahaka Panji Prawira	4	4	4	4	4	4	4	4	4
165	08126719915	Herry Salim	3	4	3	4	4	3	4	3	4
166	082391375137	Ade Syamsuar. SPt MSE	3	3	3	4	3	3	4	2	4
167	082169870345	Tarmizi	3	3	3	3	3	3	3	2	3
168	081364610395	Eggy Rizal Costadinov	4	4	4	4	4	3	4	3	4
169	082123835252	Silvilestari	4	4	4	4	4	4	4	4	4
170	081363650550	Jendra Pranata	4	4	3	4	3	3	3	3	4
171	082169166166	Yuliratmi	4	3	3	4	3	3	3	3	4
172	081374206941	Arie Erwadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	081218368038	Dilla Eva Yani	4	4	4	4	4	4	4	4	4
174	085274333998	Muhammad Rafi, S. ST	3	3	3	3	3	4	4	3	4
175	081266111966	Ade Daharis	4	4	3	4	3	3	3	3	4
176	081270263500	jonny alfa putra	3	3	3	3	3	3	3	3	4
177	085274728343	yasir yanto	4	4	3	4	4	4	4	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
178	083180644981	Muhammad Kariim Abdul Jabar	3	3	3	3	3	3	3	3	4
179	082397264390	RIO DWINANDA	4	4	4	4	3	3	3	4	4
180	081363228515	MOHAMMAD EDWAR	3	3	3	4	3	3	3	3	3
181	081363341280	NURMASDI.M	3	3	3	3	3	3	3	2	3
182	081266699662	Roni syah putra	4	3	4	4	2	4	3	3	3
183	083837101763	Ermalinda	3	3	3	3	3	3	3	3	4
184	082279483440	Deni susanati	3	3	4	4	3	3	4	4	4
185	081266900592	Winda adriani	3	3	3	4	3	3	3	2	3
186	081275948015	christina kurnia putri	4	3	4	4	4	4	4	4	4
187	081267333931	INDONES	3	3	3	3	3	3	3	3	3
188	081267145054	Hendra anthony hatta,sh,mm	3	3	3	4	3	4	4	4	4
189	081319545076	Yeni sheara siatuty	3	3	2	4	2	3	3	2	3
190	082170726625	Bustari	3	3	3	4	3	4	4	4	4
191	081373995435	Bismi Rahma putri	3	4	3	4	4	4	3	4	4
Total			637	633	602	686	631	645	657	605	705
NRR			3.34	3.31	3.15	3.59	3.3	3.38	3.44	3.17	3.69
NRR Tertimbang			0.37	0.36	0.35	0.4	0.36	0.37	0.38	0.35	0.41
IKM			3.35								

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Konversi IKM			83.75								
Nilai Layanan			B: Baik								

<b>Keterangan :</b>	
U1 - U9	Unsur - Unsur pelayanan
NRR	Nilai rata-rata
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
NRR Per Unsur	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang	NRR per unsur x 0.111 per unsur

<b>IKM UNIT PELAYANAN</b>			
<b>Mutu Pelayanan :</b>			
A	(Sangat Baik)	:	88,31 - 100,00
B	(Baik)	:	76,61 - 88,30
C	(Kurang Baik)	:	65 - 76,60
D	(Tidak Baik)	:	25,00 - 64,99

<b>No.</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>NILAI RATA-RATA</b>
U1	Persyaratan	3.34
U2	Prosedur	3.31
U3	Waktu Pelayanan	3.15
U4	Biaya/Tarif	3.59
U5	Produk Layanan	3.3
U6	Kompetensi pelaksana	3.38
U7	Perilaku pelaksana	3.44
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.17
U9	Sarana dan Prasarana	3.69

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
OPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025**

NILAI IKM	Nama Layanan	
<b>84</b>	<b>Jumlah</b>	<b>: 191 Orang</b>
	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>: L = 73 orang / P = 118 orang</b>
	<b>Pendidikan</b>	<b>: SD = 1 orang</b>
		<b>SMP = 2 orang</b>
		<b>SMA = 67 orang</b>
		<b>DIII = 9 orang</b>
		<b>S1 = 88 orang</b>
		<b>S2 = 20 orang</b>
		<b>S3 = 2 orang</b>
	<b>Periode</b>	<b>: 01-01-2025 s/d 31-12-2025</b>

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT